

MAJALAH



PARLEMENTARIA

EDISI 131 TH. XLV, 2015



MENANTI ALUN-ALUN DEMOKRASI

MEMBERDAYAKAN
UKM MENYAMBUT MEA

PILKADA SERENTAK,
MOMENTUM PILIH
PEMIMPIN IDEAL

RUU MINOL :
LINDUNGI MASYARAKAT
DARI BAHAYA MIRAS

PENGAWAS UMUM:

Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/

KETUA PENGARAH:

Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH:

Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA:

Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI:

Irfan, S.Sos, MMSI (Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI:

Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan),

Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR:

M. Ibnuur Khalid, Iwan Armanias, Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI:

Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI:

Nita Juwita, S.Sos, Supriyanto, Agung Sulistiono, SH,

Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO:

Eka Hindra

FOTOGRAFER:

Rizka Arindyia, Naefuroji, M. Andri Nurdriansyah

Yaserto Denus Saptoadji, Andi Muhamad Ilham, Jaka Nugraha

SEKRETARIAT REDAKSI:

I Ketut Sumerta, S. IP

SIRKULASI:

Abdul Kodir, SH, Bagus Mudji Harjanta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI,

Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI,

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350

Fax. (021) 5715536,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com;

www.dpr.go.id/berita

 @dpr_ri

PENGANTAR REDAKSI

Pada edisi ini, Parlementaria mengangkat isu soal pembangunan alun-alun demokrasi, sebagai informasi sekaligus penjelasan kepada publik mengenai rencana aksi DPR. Di era keterbukaan sekarang ini, maka semua rencana kerja DPR semestinya juga diketahui publik termasuk pembangunan alun-alun demokrasi, tidak hanya untuk kepentingan DPR periode sekarang ini saja, melainkan juga untuk DPR periode selanjutnya.

Tujuan Dewan Perwakilan Rakyat membangun alun-alun demokrasi juga untuk mengembalikan kompleks parlemen sebagai kawasan politik seperti perencanaan awal, sesuai cetak biru tata ruang yang dicanangkan pemerintahan Presiden Ir. Soekarno. Pada awalnya, Gedung DPR/MPR RI bukan gedung untuk legislator, melainkan untuk menyelenggarakan Conference of the New Emerging Forces (Conefo) pada tahun 1966 di Jakarta.

Menurut Wakil Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso, sarana prasarana di gedung ini memang disiapkan untuk menampung sejumlah persidangan namun belum disiapkan untuk mendukung interaksi rakyat dengan para wakil rakyat. Itulah sebabnya Gedung

DPR RI perlu direvitalisasi menjadi gedung parlemen modern dan diantaranya dilengkapi sarana alun-alun demokrasi ini.

Hal yang sama dikatakan anggota FPP DPR Achmad Mustaqim, rencana menghadirkan “alun-alun demokrasi” diharapkan akan bisa memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat maupun penggiat demokrasi untuk bisa mengekspresikan dengan baik dan benar, sehingga tidak kontraproduktif. “Kalau semua demo dilakukan terbuka, risikonya tak terkendali bahkan menyebabkan aksi anarkis yang bisa menimbulkan korban jiwa atau kekerasan lain,” tukasnya.

Selain menguraikan perkembangan pembahasan di tiga fungsi pokok DPR, edisi kali ini juga mengulas mengenai lahirnya Badan Keahlian DPR (BKD) untuk memenuhi tuntutan Dewan yang sangat dinamis periode sekarang ini. Tak ketinggalan dalam rubrik kiat sehat disajikan artikel mengenai ‘Cara Sehat dan Aman Diet’. Di tengah-tengah kesibukannya dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya anggota Dewan memang dituntut untuk selalu sehat dan segar dan bersemangat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Kini Majalah Dan Buletin Parlementaria Hadir Lebih Dekat Dengan Anda

Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI
Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI
Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI
Loby Gedung Setjen DPR RI
Ruang Loby Ketua
Ruang Loby Wakil Ketua
Ruang Yankes

Terminal 1 dan 2
Bandara Soekarno Hatta

Stasiun Kereta Api Gambir

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com.



DAFTAR ISI

PROLOG	
Menanti Alun-Alun Demokrasi	6
LAPORAN UTAMA	
Ini Untuk Kita dan Generasi Mendatang	10
SUMBANG SARAN	
Alun-Alun Demokrasi: Avenue Rakyat Berdemonstrasi	22
PENGAWASAN	
Tarik Ulur Nasib PMN	24
Pilkada Serentak, Momentum Pilih Pemimpin Ideal	26
ANGGARAN	
Kinerja Pajak 2015 Gagal Capai Target	30
LEGISLASI	
RUU Minol : Lindungi Masyarakat dari Bahaya Miras	34
FOTO BERITA	36
KIAT SEHAT	
Medikopomologi Buah Sebagai Diet Dan Obat	44
PROFIL	
Novita Wijayanti, Wakil Ketua BURT DPR RI, Panah Perjuangan Srikandi Senayan	46
KUNJUNGAN KERJA	52
SOROTAN	
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto Surat Edaran Hanya Untuk Intern Polri	62
LIPUTAN KHUSUS	
Belajar Pada Industri Kreatif Tiongkok	66
Memberdayakan UKM Menyambut MEA	68
SELEBRITIS	
Soimah: Pemerintah Kurang Peduli Seniman	70
PERNIK	
Dengan BKD, Dukungan Keahlian Mudah Dikoordinasikan	72
PARLEMEN DUNIA	
Parlemen dan Peran Ruang Publik Di Jerman	74
POJOK PARLE	
Yang Penting Nawaitu	78

PROLOG 8



MENANTI ALUN-ALUN DEMOKRASI

Dinamika demokratisasi di negeri ini sungguh luar biasa. Setelah para mahasiswa meneriakkan pekik reformasi dari Gedung DPR, Senayan, Jakarta Mei, 1998, perjalanan demokratisasi bangsa ini terus menanjak. Sekarang Indonesia didaulat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, bahkan bisa jadi terbesar pertama karena tidak ada negara di dunia yang menerapkan pemilu langsung sebesar dan dengan tantangan geografis seluas ini.

LAPORAN UTAMA 10

INI UNTUK KITA DAN GENERASI MENDATANG

Kehadiran Parle ke ruang kerja pimpinan BURT disambut hangat dua pimpinan, Roem Kono dan salah seorang wakilnya Agung Budi Santoso. Sejak mendapat mandat jajaran pimpinan BURT sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang bertugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan ini, terus memantapkan upaya mewujudkan DPR sebagai parlemen modern.



PROFIL 46



NOVITA WIJAYANTI
**Wakil Ketua
BURT DPR RI,
Panah Perjuangan
Srikandi Senayan**

HAK TKW CACAT PERMANEN

Kami dari LSM Peduli Kemiskinan Kabupaten Karawang sebagai kuasa dari Abdullah bin Bedi yaitu suami dari Tarsinah binti Wakim menyampaikan permasalahan sehubungan kondisi istrinya yang mengalami kecelakaan berat (cacat permanen) saat bekerja di Bahrain sebagai TKI yang belum sepenuhnya mendapatkan gaji/upah dan belum terealisasi klaim asuransinya hingga saat ini.

Bahwa BNP2TKI hanya membantu proses pemulangan. Tarsinah pada 23 Juni 2015 sementara PT. Duta Kahuripan sebagai PJTKI yang memberangkatkan Sdri. Tarsinah tidak bertanggung jawab.

Kami memohon rekomendasi DPR RI agar Sdri. Tarsinah mendapat hak-haknya selama bekerja di Bahrain.

*Arta Maulana
Karawang, Jawa Barat*

PENGHAPUSAN AYAT 3 PASAL 4 DRAFT PKPU TENTANG PENCALONAN PILKADA

Adapun pertimbangan penghapusan Pasal 4 ayat (3) draft Peraturan KPU tersebut adalah sebagai berikut:

- Menimbulkan multitafsir di tingkat KPU Kabupaten/Kota/Provinsi dan di masyarakat umum sehingga dikhawatirkan akan terjadi konflik fisik.
- Terjadi diskriminasi pelaku korupsi dengan para teroris dan pelaku

narkoba, padahal ketiga pelaku tersebut wajib kita berantas bersama.

- Terhadap orang yang sudah selesai menjalani hukuman penjara, wajib diperlakukan sama di mata hukum.
- Menurut UU, selama tidak dicabut hak memilih dan dipilih oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka ybs

tetap diperlakukan sama.

- Bertentangan dengan UU No.1 Tahun 2015 tentang Pilkada dimana KPU tidak diperkenankan menambah/mengurangi isi dan cukup terwakili oleh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Kami memohon agar Komisi II DPR RI mengingatkan KPU untuk menghapus ayat tersebut.

*Mahdi Salman
Dompu, Nusa Tenggara Barat*

POLA MEMBERDAYAKAN KEHIDUPAN BANGSA PEDULI PENDIDIKAN

Saya selaku pemerhati pendidikan ingin menyampaikan aspirasi kepada Komisi X DPR RI, mengenai kebijakan dalam dunia pendidikan.

- Bahwa dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pengadu yakin bangsa Indonesia dapat bersaing dengan negara lain yang telah dibuktikan dengan banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang berprestasi di luar negeri maupun dalam negeri, baik dalam *science*, matematika dan beberapa bidang ilmu lainnya.
- Bahwa dalam era dunia yang sangat kompetitif saat ini, diperlukan sumber daya manusia yang handal yang salah satunya dicapai melalui dunia pendidikan, baik formal maupun informal.
- Berkaitan dengan dunia pendidikan, pengadu berharap agar Pemerintah cq. Menristek Dikti lebih bijaksana dalam mengambil setiap keputusan, khususnya dalam kasus pemberian sanksi dan penutupan terhadap beberapa universitas dan perguruan tinggi swasta dengan alasan antara lain:
 - Pemerintah belum sepenuhnya mampu menyediakan pendidikan bagi semua warganya sehingga masih di-



<http://pgr-jateng.info/>

perlu bantuan dari pihak swasta.

- Bahwa dengan berdirinya satu universitas/Perguruan Tinggi Swasta dapat memberdayakan dosen dan karyawan + 100 – 200 orang dan mempunyai 20.000 – 30.000 mahasiswa, sehingga telah turut mencerdaskan dan menopang kehidupan orang banyak.

*Al Fadjar Ansory
Kediri, Jawa Timur*

PENYAMPAIAN PENAMBAHAN DATA-DATA SENGKETA TANAH PTPN DELI SERDANG

Kami selaku Kuasa Hukum dari Masyarakat Pasar 3 Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menyampaikan tembusan surat dan penambahan data-data terkait kepada Instansi Pemerintah sehubungan konflik pertanahan antara masyarakat setempat dengan PTPN II (dahulu PTP IX), seluas 74 ha di areal Pasar 3, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Bahwa objek tanah yang menjadi perkara tersebut adalah tanah garapan rakyat milik orang tua klien pengadu yang tergabung dalam keanggotaan BPD Lepindo-SU (mantan pejuang kemerdekaan/eks tentara B-III Sumatera Timur) sejak tahun 1952/1953 yang dilindungi dengan UU Darurat No. 8 tahun 1954 dan Peperti No. 2 tahun 1960.

Bahwa PTPN II (dahulu PTP IX) menguasai tanah tersebut berdasarkan Skep Menteri Agraria No. SK/44/HGU/65

tanggal 10 Juni 1965, tanpa mengindahkan hak-hak penggarap yang dilindungi oleh UU Darurat No. 8 tahun 1954 jo Peperti No. 2 tahun 1960.

Kami melampirkan peta lokasi dan bahan-bahan terkait lainnya agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan penilaian dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan Skep Mendagri No. Sk.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981, dinyatakan bahwa tanah asal PTP IX yang digarap oleh para petani di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, merupakan tanah yang dikeluarkan dari areal PTP IX, sehingga tanah tersebut dinyatakan kembali menjadi tanah yang dikuasai Negara dan ditegaskan sebagai objek landreform yang didistribusikan kepada para penggarap sesuai dengan pasal 1 huruf a PP No. 224 Tahun 1996.

Kami telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada instansi terkait, diantaranya kepada Bupati Deli Serdang,

namun sampai saat ini permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan dengan baik.

Kami telah menyampaikan tembusan surat kepada DPR RI terkait permasalahan yang sama berdasarkan registrasi surat No. DK.02/01411/2015, tanggal 6 Februari 2015 dan DK.02/00788/2015, tanggal 22 Januari 2015.

Sebagai informasi, bahwa surat pengadu sebelumnya tertanggal 7 Maret 2014 yang disampaikan kepada Ketua DPR RI, perihal pemberitahuan mengenai keterkaitan BPD Lepindo SU dengan Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Rakyat (TPSTGR) dalam sengketa tanah di areal Hervetia tersebut, telah ditindaklanjuti dengan meneruskan permasalahan tersebut kepada Komisi II dan III DPR RI (berdasarkan Surat Karo Wasleg Setjen DPR RI tanggal 6 November 2014, No.DAP/10726/Setjen DPR RI/PL.01/11/2014, perihal pemberitahuan).

*P. Sihole SH
Medan, Sumatera Utara*



MOHON DITINJAU ULANG RAPERDA/PERDA TENTANG TATA CARA/PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Kami selaku ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Dompu, NTB ingin menyampaikan kepada Ketua DPR RI sbb :

1. Bahwa Raperda/Perda Tentang Tata Cara/Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Dompu, NTB dinilai sangat merugikan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Perangkat Desa Kabupaten Dompu karena bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 2014 ttg Desa. Dimana pada ketentuan Peralihan Pasal 28 ayat 2 Raperda tersebut disebutkan "Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa yang mengangkatnya".
2. Bahwa Raperda tersebut terdapat diskriminasi dalam perlakuan terhadap obyek Raperda itu sendiri, yaitu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) menyebutkan "Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

ayat (2) menyebutkan "Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya dengan masa jabatan Kepala Desa yang mengangkatnya"

Ayat (3) menyebutkan "Perangkat Desa yang sebagaimana ayat (1) yang telah habis masa jabatannya dan memenuhi syarat sebagaimana pasal (6) dapat diangkat kembali sebagai Perangkat Desa sesuai dengan mekanisme ketentuan aturan dan undang-undang yang berlaku".

3. Adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap Perangkat Desa, menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Dompu melahirkan ketentuan yang bersifat animprasial ataupun melakukan tebang pilih.

4. Kami memohon kepada Ketua DPR RI untuk mengirim surat kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Dompu agar meninjau peralihan Pasal 28 ayat 2 Perda tersebut.

*Sudirman AM
Dompu, Nusa Tenggara Barat*

MENANTI ALUN-ALUN DEMOKRASI

Dinamika demokratisasi di negeri ini sungguh luar biasa. Setelah para mahasiswa meneriakkan pekik reformasi dari Gedung DPR, Senayan, Jakarta Mei, 1998, perjalanan demokratisasi bangsa ini terus menanjak. Sekarang Indonesia didaulat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, bahkan bisa jadi terbesar pertama karena tidak ada negara di dunia yang menerapkan pemilu langsung sebesar dan dengan tantangan geografis seluas ini.



Demokrasi pada hakekatnya adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Pertanyaannya sudahkah penduduk negeri ini berdemokrasi?

Data Polri menunjukkan sepanjang tahun lalu telah terjadi 65 kasus konflik sosial dalam skala besar di Indonesia, itu belum termasuk data tawuran antar pelajar dan mahasiswa yang hampir selalu mewarnai halaman media. Budaya demokrasi seharusnya memberi ruang bagi siapa saja untuk bicara, menyampaikan idenya, memperdebatkan ide itu

dalam satu ruang publik yang menjunjung tinggi perbedaan diantara sesama. Apabila sistem itu secara bertahap dibangun, mekanisme disiapkan bersama dan disepakati, masyarakat akan lebih berjiwa besar menyikapi suara-suara yang tidak sama.

Sebagai lembaga politik yang persi- dangannya kaya dengan dinamika perbedaan DPR tentu harus mengambil peran memulai proses itu. Salah satu langkah adalah melalui pembangunan *speaker corner* di alun-alun demokrasi. Mantan wartawan yang saat ini bekerja

sebagai analis Kartika Susanti menyebut hal ini sebagai sebuah tuntutan kekinian.

“Mengacu pada kondisi saat ini adalah aneh apabila negara demokrasi tidak punya alun-alun demokrasi,” tekan dia. Ia kemudian berbagi pengalaman ketika menikmati atmosfir demokrasi yang menyeruak diantara asrinya

taman dan lingkungan di *Hyde Park*, Inggris. Ada perasaan lepas, plong ketika sudah berhasil menyuarakan atau mungkin tepatnya meneriakkan gagasan, fikiran, pendapat yang pada kondisi tertentu tidak mendapat tempat semestinya.

Alun-alun sebagai tempat masyarakat menyampaikan aspirasi sebenarnya sudah lama lekat pada bangsa Indonesia. Jadi ini bukan sesuatu yang baru atau budaya yang diimpor dari mancanegara. Sebagai contoh di Alun-Alun Yogyakarta ada kebiasaan jika warga menghadapi permasalahan pada sebuah kebijakan yang telah ditetapkan kerajaan maka mereka akan duduk bersila seharian tidak jauh kawasan wringin kurung (pohon beringin yang dipagar). Saat menyampaikan aspirasi ia biasanya mengenakan pakaian dan tutup kepala berwarna putih. Pada saat raja melihat keberadaan warga tersebut maka ia akan memerintahkan petugas untuk memanggil dan mendengar persoalannya secara langsung.

ALUN-ALUN DEMOKRASI AKAN MENJADI KAWASAN WISATA DEMOKRASI, MASYARAKAT TERUTAMA GENERASI MUDA DATANG SAMBIL BELAJAR. BUKAN HANYA DI KAWASAN ALUN-ALUN DEMOKRASI MEREKA BISA DATANG KE PERPUSTAKAAN DPR YANG NANTINYA DITATA LEBIH REPRESENTATIF.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam acara peresmian Pembangunan Alun-alun Demokrasi

“Aksi penyampaian aspirasi seperti ini biasa disebut *pepe*, ini asli budaya kita sejak zaman penjajahan dahulu, jadi sudah lama. Tapi kemudian seiring perkembangan waktu dan bentuk pemerintahan kondisi ini berubah. Cara penyampaian aspirasi tidak lagi dipusatkan di alun-alun, masyarakat berunjuk rasa lebih terbuka bahkan tidak terkendali dan anarkis,” kata anggota Komisi IX DPR Imam Suroso dalam kesempatan wawancara di Jakarta akhir November lalu.

Pengalaman lain tentang keberhasilan alun-alun demokrasi di Parlemen Australia disampaikan Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso. Ia menyaksikan sendiri bagaimana aksi unjuk rasa yang berlangsung di lapangan cukup luas di bagian depan gedung itu. Ia mengamati kegiatan penyampaian aspirasi, berorasi, yel-yel yang dilakukan suku Aborigin – penduduk asli Australia ini berlangsung tertib. Para pengunjung rasa dilihatnya juga menyiapkan tenda di lapangan rumput. Itu diperkirakan tempat menyimpan logistik, layanan kesehatan darurat atau peralatan pendukung untuk unjuk rasa.

“Pada waktu berkunjung ke sana demo suku Aborigin di lokasi yang telah disiapkan oleh Parlemen Australia. Saya melihat pengunjung rasa ini diberi ruang untuk menyampaikan aspirasinya, unjuk rasa juga berlangsung tertib. Fasilita-

tas seperti alun-alun demokrasi ini juga saya temui di parlemen dari negara lain. Nah ini seharusnya juga bisa kita fasilitasi,” kata dia. Jadi sebenarnya apa lagi yang dinanti? Kajian sudah dilakukan dan rakyat yang sedang larut dengan demokrasi membutuhkannya. Masukan dari parlemen negara lain juga sudah lebih dari cukup.

Ketua BURT Roem Kono menjelaskan persiapan pembangunan alun-alun demokrasi di DPR sudah dilakukan. Ia menggambarkan alun-alun demokrasi itu seperti tempat orang berkreasi, berinovasi, bersuara dalam rangka menyampaikan satu pandangan, bisa pula memperjuangkan satu hal yang tidak mendapatkan keadilan. Siapapun yang datang ke situ menurutnya harus dilayani dengan baik, sarana prasarana yang memadai, taman yang layak jadi mereka datang seperti berwisata bukan hanya menyampaikan aspirasi, berorasi tapi juga dapat menikmati taman di situ. Akan tetapi kalau bicara soal teknis kata dia bukan menjadi domain BURT tetapi kesetjanaan. Dewan hanya meletakkan dasar-dasar dan kesetjanaan dimintanya jangan terjebak aspek teknis pembangunan semata. Harapannya tempat itu nantinya bisa jadi satu karya artistik, monumen penting dan menjadi bagian dari kekayaan demokrasi bangsa ini.

Alun-alun demokrasi akan menjadi

kawasan wisata demokrasi, masyarakat terutama generasi muda datang sambil belajar. Bukan hanya di kawasan alun-alun demokrasi mereka bisa datang ke Perpustakaan DPR yang nantinya ditata lebih representatif. DPR lanjut dia baru belajar ke Parlemen Jepang yang memiliki koleksi 40 juta judul. Di sini hal seperti itu diabaikan di negara lain dipelihara. Parlemen Amerika Serikat punya lebih banyak koleksi, ada 100 juta judul lebih. Ini tekannya perlu lakukan sekarang bukan hanya untuk kepentingan kita tapi yang lebih penting untuk generasi yang akan datang.

Wartawan Majalah Ummi Didi Muardi mengingatkan agar wakil rakyat di Senayan menjauhkan diri dari korupsi dan kolusi termasuk ketika menyiapkan proyek mulia ini. Roem Kono meyakinkan hal tersebut sudah menjadi perhatian dewan, “Harus transparan, harus berkualitas dan juga harus mengikuti aturan yang berlaku. Saya kira dalam kerangka itu patokan kita adalah aturan perundang-undangan yang berlaku. Kita ingin aturan berjalan, pengawasan berjalan. Kita dari BURT berkomitmen tidak akan ikut campur dalam proses pelaksanaannya tapi dalam masalah pengawasan tentu kita berwenang, kita harus mengetahui apa yang telah dilaksanakan setjen,” pungkask dia. (TIM) FOTO:

ANDRI/PARLE/IV

ROEM KONO : KETUA BURT DPR RI

INI UNTUK KITA DAN GENERASI MENDATANG

Kehadiran Parle ke ruang kerja pimpinan BURT disambut hangat dua pimpinan, Roem Kono dan salah seorang wakilnya Agung Budi Santoso. Sejak mendapat mandat jajaran pimpinan BURT sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang bertugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan ini, terus mematangkan upaya mewujudkan DPR sebagai parlemen modern.



Sejumlah langkah ditetapkan, termasuk menjangking aspirasi dari masyarakat, akademisi dari perguruan tinggi serta tentu tidak kalah penting melirik parlemen negara lain. Roem kemudian memaparkan apa yang didengar dan dilihatnya langsung di Parlemen Jepang. Termasuk tentang peran Polisi Parlemen di negara 'matahari terbit' yang menurutnya menjadi masukan berharga untuk perbaikan pengamanan kompleks parlemen di Senayan. Wawancara kali ini menggali lebih jauh tentang upaya mewujudkan parlemen modern diantaranya tentang salah satu sarana yang dinanti publik Alun-alun Demokrasi. Berikut petikannya;

Penataan DPR menjadi parlemen modern bagaimana perkembangannya sejauh ini? Saya ingin bicara mengenai DPR sebagai lembaga legislatif ini adalah tonggak bagi bangsa kita sepanjang masa. Tonggak demokrasi, tonggak dalam rangka menampung seluruh aspirasi masyarakat, tonggak dalam rangka pengawalan bangsa kita ke depan, tonggak dalam rangka pengawalan Pancasila, pengawalan NKRI. Agenda penting berbangsa lahir dari sini semua. Lembaga parlemen menjamin berdiri kokohnya bangsa ini terus menerus sepanjang masa. ini harus kita pikirkan bersama, lembaga ini harus kita hormati bersama, harus kita junjung tinggi, berwibawa dan juga harus mempunyai tata kelola yang profesional baik pelayanan masyarakat dan menjaga citra lembaga.

Pak Roem baru berkunjung ke parlemen Jepang, apa yang bisa dipelajari? Setiap orang melihat sesuatu dari negara, berkunjung ke gedung parlemennya maka ia akan menyimpulkan, wah.. demokratisasi ada di bangsa ini. Kita telah berkunjung ke parlemen lain Hongaria, Jepang mereka betul-betul lembaga parlemen legislatif dan menjadi sentrum bangsa. Mengatur bangsa meletakkan arah daripada bangsa ke depan. Ini harus kita pahami betul. Itulah sebabnya DPR diperlukan penataan, menyesuaikan aspek pendukung, penguatan kelembagaan secara keseluruhan,

aspek pelayanan, aspek kenyamanan ini penting. Diperlukan reformasi parlemen modern, kita harus melakukan itu, itu tuntutan zaman, era globalisasi, teknologi informasi yang telah berkembang demikian hebat. Demokrasi berkembang dinamis diperlukan penataan kelembagaan.

Penataan itu bukan berarti proyek pembangunan fisik saja ya? Aspek etika dewan dikuatkan, legislasi dikuatkan, masalah hubungan internasional harus dikuatkan semua. Nah tentu itu perlu sarana prasarana, kenyamanan dalam bekerja. Jadi kita harus terus membangun pemahaman kepada publik bahwa penataan parlemen modern ini jadi penting. Kalau orang melihat secara kasat mata memang itu tidak penting tapi kalau melihat tatanan bangsa dan negara itu penting.

Bagaimana dengan hasil studi banding ke parlemen negara lain? Kita sudah studi banding kemana-mana, salah satu kesimpulannya adalah demokrasi kita memang sudah kebablasan. Demokrasi itu bukan berarti membuka ruang kebebasan sebebas-bebasnya, keinginan tidak terpenuhi melakukan anarki. Itu salah kaprah. Demokrasi tetap ada tatanannya dalam sistem mekanisme yang harus menjadi kesepakatan bersama. Saya melihat negara lain itu tertata rapi ketika kita masuk kompleks parlemen seperti masuk kawasan yang berwibawa. Kita kemudian berketetapan hati diperlukan penyesuaian dan penataan supaya lembaga kita bisa sejajar dengan parlemen di negara lainnya.

Gedung DPR itu kan rumah rakyat? Kita perlu sosialisasi tentang pemahaman tata kerja di lembaga parlemen ini.

Ada ruang terbuka yang bisa diakses masyarakat dan tentu ada ruang-ruang yang hanya boleh diakses kalangan terbatas. Ini bisa menyangkut rahasia negara, dll. Kita prinsipnya terbuka tapi tentu tidak semua ruang boleh diakses publik dengan mudah. Penekanan kita adalah kenyamanan dan keamanan itu penting.

Bagaimana soal peran polisi parlemen? Itu juga penting untuk kita tetapkan di DPR. Bukan karena saya Ketua BURT tetapi karena kita ingin meletakkan dasar-dasar reformasi penataan kompleks parlemen dengan baik. Kita juga

ingin punya alun-alun demokrasi, tempat menyalurkan aspirasi masyarakat, berorasi tentang fikiran dan ide mereka. Parlemen negara lain sudah menyiapkan hal ini.

Perkembangan soal alun-alun demokrasi? Kalau soal teknis itu kita serahkan kepada Setjen DPR kita menetapkan alur fikirnya. Bagi kita, alun-alun demokrasi itu seperti tempat orang berkreasi, berinovasi,

bersuara dalam rangka menyampaikan satu pandangan, bisa pula memperjuangkan satu hal yang tidak mendapatkan keadilan. Nah kita ingin mereka datang ke situ dilayani dengan baik, sarana prasarana yang memadai, taman yang layak jadi mereka datang seperti berwisata bukan hanya menyampaikan aspirasi, berorasi tapi juga dapat menikmati taman disitu. Ini satu gambaran saya tapi kalau soal teknis itu bukan domain BURT tapi domain kesetjanaan. Kita meletakkan dasar-dasar ini dan kesetjanaan jangan terjebak aspek teknis pembangunan semata, kita ingin tempat itu nantinya bisa jadi satu karya artistik, monumen penting dan menjadi bagian dari kekayaan demokrasi bangsa ini.



KITA DI DPR INI TIDAK PUNYA PUSTAKA YANG MENYIMPAN ARSIP DAN DOKUMEN YANG SEHARUSNYA MENJADI SEJARAH BANGSA INI. DI SINI HAL SEPERTI ITU DIABAIKAN DI NEGARA LAIN DIPELIHARA.

**PEGAWAI SETJEN DPR ITU HARUS TANGKAS
DIA HARUS PAHAM TUGASNYA SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI, INDEPENDEN, PAHAM
PROTOKOLER, INTERPRENEUR. PNS DISINI
TIDAK SAMA DENGAN PNS KEMENTERIAN DAN
LEMBAGA LAIN. TUGASNYA HARUS MAMPU
MENDUKUNG PELAKSANAAN PERSIDANGAN,
MELAKUKAN KAJIAN, PENELITIAN TERHADAP
TANTANGAN BANGSA KE DEPAN.**

Bisa jadi wisata demokrasi ya? Bisa seperti itu wisata demokrasi, masyarakat terutama generasi muda datang sambil belajar. Bukan hanya di kawasan alun-alun demokrasi mereka bisa datang ke Perpustakaan DPR yang nantinya kita siapkan luasnya memadai. Kita baru belajar ke parlemen jepang di sana koleksinya ada 40 juta judul. Disini kita berapa? itupun berantakan. Kita di DPR ini tidak punya pustaka yang menyimpan arsip dan dokumen yang seharusnya menjadi sejarah bangsa ini. Di sini hal seperti itu diabaikan di negara lain dipelihara. Parlemen Amerika Serikat juga lebih banyak lagi ada 100 juta judul lebih. Ini perlu kita lakukan sekarang bukan hanya untuk kepentingan kita tapi yang lebih penting untuk generasi yang akan datang.

Sorotoan publik yang utama adalah soal transparansi, bagaimana? Ini jadi perhatian kita betul, harus transparan, harus berkualitas dan juga harus mengikuti aturan yang berlaku. Saya kira dalam kerangka itu patokan kita adalah aturan perundang-undangan yang berlaku. Kita ingin aturan berjalan, pengawasan berjalan. Kita dari BURT berkomitmen tidak akan ikut campur dalam proses pelaksanaannya tapi dalam masalah pengawasan tentu kita berwenang, kita ingin mengetahui apa yang telah dilaksanakan setjen. Kita bekerja dalam kerangka bagaimana meningkatkan wibawa parlemen dimasa yang akan datang, museum, pustaka, *media center* itu perlu kita tata ulang.

Media Center, ruang wartawan, ini menarik nih? Dalam kunjungan ke luar negeri saya sering bertanya dan mengamati langsung dimana posisi ruang wartawannya. Mereka katakan ada di satu ruangan yang sudah kita tata dengan baik dan layak. Saya cermati hampir semua menyiapkan satu ruangan besar. Ketika anggota parlemen ingin bicara semua sudah siap di tempatnya. Ini sistem yang harus diciptakan, kita ingin membuat nyaman semua yang bekerja di kompleks parlemen ini. Ruangan wartawan ada kantinnya, ada *smoking area* dan itu artinya tidak boleh merokok sembarangan. Ini tugasnya kita untuk menyiapkan itu, pelaksanaannya kesetjenan. Itulah sebabnya penguatan lembaga kesetjenan itu menjadi penting.

Maksud penguatan lembaga kesetjenan? Jangan kesetjenan bekerja rutinitas tetapi ide-ide membangun lembaga ber-



henti. Sudah begini saja, nah ini yang harus kita ubah *mindset* kita. Pegawai Setjen DPR itu harus tangkas dia harus paham tugasnya sebagai pegawai negeri, independen, paham protokol, interpreneur. PNS disini tidak sama dengan PNS kementerian dan lembaga lain. Tugasnya harus mampu mendukung pelaksanaan persidangan, melakukan kajian, penelitian terhadap tantangan bangsa ke depan.

Ada yang menarik dari Pergub DKI yang sudah menyebut Alun-Alun Demokrasi DPR padahal wujudnya belum ada? Iya itu dia, kita perencanaan sudah mulai berjalan kita hanya memonitor. Sebagai pelaksana kesetjenan harus menjiwai apa



Ketua BURT Roem Kono saat meninjau Ruang Wartawan DPR RI

itu ruang demokrasi. Mudah-mudahan mekanismenya berjalan. Kita sudah menyiapkan rambu-rambunya di burt dan teknisnya dilaksanakan kesetjenan.

Bagaimana dari internal dewan sendiri apakah semua dapat memahami program ini? Saya rasa semua dapat memahami proyek ini cuma kita harus membangun pemahaman terus agar semakin yakin. Kita tentu tidak membangun sekaligus selesai karena reformasi kawasan parlemen akan terus berjalan.

Kemungkinan 7 langkah menuju parlemen modern ini tidak akan selesai dalam 5 tahun tapi 10 tahun, namun dasar itu sudah kita letakkan mulai dari sekarang. Jangan asal bangun, asal bongkar dan terus tiba-tiba ter-bengkalai. Teknisnya akan terus berjalan, tahap demi tahap. kita berharap doa dan restu dari masyarakat Indonesia semoga niat baik mewujudkan DPR yang aspiratif, yang lebih modern bisa kita wujudkan bersama. (SC/IKY)

FOTO: IWAN ARMANIAS, JAKA/PARLE/IW

RUANG ASPIRASI DI ALUN-ALUN DEMOKRASI

Ketika berkunjung ke Gedung Parlemen Australia, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga — BURT DPR RI Agung Budi Santoso menyaksikan sendiri bagaimana aksi unjuk rasa yang berlangsung di lapangan cukup luas di bagian depan gedung itu. Ia mengamati kegiatan penyampaian aspirasi, berorasi, yel-yel yang dilakukan suku Aborigin — penduduk asli Australia ini berlangsung tertib. Para pengunjung rasa dilihatnya juga menyiapkan tenda di lapangan rumput itu, diperkirakan untuk menyimpan logistik, layanan kesehatan darurat atau peralatan pendukung untuk unjuk rasa.

“Pada waktu berkunjung ke sana ada demo suku Aborigin di lokasi yang telah disiapkan oleh Parlemen Australia. Saya melihat pengunjung rasa ini diberi ruang untuk menyampaikan aspirasinya, unjuk rasa juga berlangsung tertib. Fasilitas seperti alun-alun demokrasi ini juga saya temui di parlemen dari negara lain. Nah ini seharusnya juga bisa kita fasilitasi,” katanya dalam kesempatan wawancara di ruang kerjanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia menyebut sejumlah negara lain yang juga memiliki alun-alun demokrasi seperti Inggris dengan The Royal Park, Hyde Park yang eksistensinya sudah menjadi bagian dari dinamika masyarakat di negara itu sejak ratusan tahun lalu. Ia berharap alun-alun demokrasi di DPR pada saatnya akan menjadi area publik bagi seluruh lapisan masyarakat. Mereka dapat dengan mudah mengakses dan kemudian berorasi menyampaikan ide, fikiran dan gagasannya untuk kehidupan berbangsa yang lebih baik. Lebih jauh kehadiran alun-alun tersebut juga menambah ruang terbuka hijau bagi masyarakat di Jabodeta-

Wakil Ketua BURT DPR RI
Agung Budi Santoso

bek, sehingga menjadi sarana rekreasi bernuansa parlemen.

“Tidak hanya diartikan khusus untuk berdemo, berorasi tapi juga kita menjadi fasilitas rekreasi publik yang bisa dinikmati oleh rakyat dengan nuansa khas. Berwisata sambil belajar tentang keparlemenan, dinamika demokrasi di DPR dari masa ke masa, jadi ini seperti wisata demokrasi. Jadi tidak harus yang datang melakukan aksi unjuk rasa,” terang politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Lebih jauh ia memaparkan sebenarnya budaya menyampaikan aspirasi di alun-alun sudah menjadi bagian dari dinamika rakyat sejak era kerajaan di sejumlah daerah di tanah air. Ada istilah yang namanya *mepe* (berjemur), yaitu cara yang dilakukan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada rajanya dengan duduk diam bersila, berpanas-panas di alun-alun. Di sisi lain biasanya terdapat pendopo yang berisi kursi kerajaan, dari situlah raja melihat aksi rakyatnya dan kemudian memanggilnya masuk ke dalam istana untuk menyampaikan aspirasi.

Dalam era demokrasi yang lebih modern, penyampaian aspirasi ini berubah. Rakyat tidak lagi duduk diam tapi diberi ruang untuk bicara, berorasi menyampaikan pendapatnya di alun-alun itu. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, tentunya DPR RI mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menampung serta mendengarkan aspirasi rakyatnya untuk sepenuhnya di perjuangkan. Permasalahannya sampai hari ini tidak ada sarana pendukung untuk itu. Unjuk rasa

masyarakat belakangan bukan mengedepankan gagasan tetapi di benak publik demonstrasi adalah kemacetan, mengganggu pengguna jalan, yang pada akhirnya kepentingan publik terganggu. Bahkan di depan Gedung DPR tidak jarang pengunjung rasa memblokir jalan

tol.

“Kalau yang naik tol orangnya sehat semua tidak apa-apa, tapi kalau diantara pengguna jalan tol itu ada yang sakit perlu mendapatkan perawatan kan kasihan, atau ibu hamil yang waktunya sudah melahirkan masih dalam mobil ini kan juga kasihan. Nah tentunya berdasarkan pemikiran-pemikiran seperti itulah kita wajib membuat alun-alun demokrasi ini.” tekan wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat I ini.

Menurut Agung, suatu tempat seperti alun-alun demokrasi sebagai sarana rakyat untuk menyampaikan aspirasi itu sudah menjadi kebutuhan pokok negara. “Itulah makanya di periode sekarang ini pimpinan DPR juga bersama kami (Pimpinan BURT DPR) memandang perlu untuk segera di bangun alun-alun demokrasi ini,” tekan politisi yang juga bertugas di Komisi Perhubungan dan Infrastruktur ini.

Alun-alun demokrasi yang akan dibangun di sisi kiri halaman Gedung DPR RI adalah ruang terbuka publik sebagai simbolisasi partisipasi rakyat untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang akan terorganisir. Masyarakat yang berorasi di dalam Alun-alun Gedung DPR RI, maka aspirasinya akan terdengar langsung baik oleh pimpinan maupun anggota MPR/DPR/DPD RI yang sedang bertugas, sehingga akan lebih dekat dan lebih mudah untuk merespon dan menemui masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Selain itu, hal ini tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak mengganggu lalu lintas di depan Gedung DPR RI seperti yang terjadi selama ini.

Tujuan Dewan Perwakilan Rakyat membangun alun-alun demokrasi juga untuk mengembalikan kompleks parle-

men sebagai kawasan politik seperti perencanaan awal, sesuai cetak biru tata ruang yang dicanangkan pemerintahan Presiden Ir. Soekarno. Pada awalnya. Gedung DPR/MPR RI bukan gedung untuk legislator, melainkan untuk menyelenggarakan *Conference of the New Emerging Forces (Conefo)* pada tahun 1966 di Jakarta. Sarana prasarana di gedung ini memang disiapkan untuk menampung sejumlah persidangan namun belum disiapkan untuk mendukung interaksi rakyat dengan para wakil rakyat. Itulah sebabnya Gedung DPR RI perlu direvitalisasi menjadi gedung parlemen modern dan diantaranya dilengkapi sarana alun-alun demokrasi ini.

“Kalau Pak Kar-
no dulu dalam tata kotanya wilayah Monas untuk pemerintahan, Jalan Sudirman untuk bisnis, disini (Senayan) adalah *political venue* dan sebagian lagi untuk sarana olahraga. Tapi perkembangan sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Kita sebenarnya berkeinginan itu

ALUN-ALUN DEMOKRASI YANG AKAN DIBANGUN DI SISI KIRI HALAMAN GEDUNG DPR RI ADALAH RUANG TERBUKA PUBLIK SEBAGAI SIMBOLISASI PARTISIPASI RAKYAT UNTUK MENYAMPAIKAN BERBAGAI ASPIRASI YANG AKAN TERORGANISIR.

untuk mengembalikan seluruh kawasan ini menjadi kawasan politik/parlemen seperti semula walaupun itu mungkin agak sulit,” jelas Agung.

Agung berharap masyarakat dapat melihat secara jernih rencana penataan kompleks parlemen dengan sarana pendukung seperti alun-alun demokrasi, museum, perpustakaan dan gedung kantor yang dapat menampung aktifitas anggota dewan dan staf pendukungnya. Khusus alun-alun demokrasi agenda pembangunan sudah diresmikan oleh pimpinan DPR pada 21 Mei 2015. Ia meyakini dengan proses yang berlangsung transparan dan akuntabel niat baik ini dapat diwujudkan. (SC/NAZ) FOTO: JAKA/PARLE/IV

Alun-alun Demokrasi di Hyde Park London

Bertandang ke kota London, Inggris tidak lengkap kalau tidak mampir ke sebuah taman yang fenomenal, Hyde Park. Taman dengan luas 142 hektar ini berada ditengah kota dan menjadi ruang publik yang berhasil memanusiaikan warganya. Mereka bisa melakukan beragam aktifitas di taman ini seperti berolahraga, berjemur, berkuda, istirahat, dan bersosialisasi. Satu bagian dari taman ini bahkan menyediakan ruang bagi warga masyarakat untuk berorasi, mengekspresikan ide, gagasan dan fikirannya. Bagian ini sering disebut sebagai *the speaker corner*.



“Di sana bebas mau ngomong apa saja. Saya ke sana saat masih kuliah di *University of Westminster* bersama teman-teman sekampus lintas negara, ada dari Rusia, Malaysia, Tunisia dan Argentina. Salah satu teman dari Tunisia mengusulkan bagaimana kalau kita berpartisipasi di *speaker corner, Hyde Park*,” kata Kartika Susanti mantan wartawan majalah *Tempo* kepada *Parle* beberapa waktu lalu di Jakarta. Salah satu temannya dari jurusan politik memilih tema yang cukup panas yaitu badai demokratisasi di Timur Tengah yang dinilai digerakkan kepentingan barat atau dikenal dengan Arab Spring.

Kartika yang saat ini berkarir sebagai *research analyst* di salah satu perusahaan di Jakarta ini menjelaskan, pada kegiatan penyampaian aspirasi pribadi atau kelompok kecil tidak ada proses melapor, mendaftar dan administari lain untuk tampil di alun-alun demokrasi Hyde Park. Tinggal datang, mencari ruang yang kosong dan mulai berorasi. Pada saat awal orasi tentu penonton utama adalah teman-teman satu kampus yang datang bareng, namun pelan tapi pasti kerumunan bertambah dari warga masyarakat yang sedang menikmati suasana taman yang asri itu. “Kita harus kuat mental apabila pada saat orasi tiba-tiba ada saja penonton yang menginterupsi pembicaraan dan menyampaikan ketidaksetujuan atau pandangan berbeda,” tutur dia. Dalam pengamatannya walaupun perdebatan berlangsung panas pihak-pihak yang berbeda pendapat masih mampu untuk saling menahan diri. Para pihak tetap mampu menjaga agar tetap pada koridor ‘perang kata’ tidak larut sampai pada kontak fisik.

Dalam pembicaraan dengan *Bagian Media dan Komunikasi Kedutaan Besar Inggris* di Jakarta, Hyde Park merupakan salah satu taman kebanggaan yang dikelola oleh pihak kerajaan Inggris, The Royal Park. Sejarah demokratisasi di taman ini sudah dimulai sejak tahun 1872 ketika parlemen Inggris mengizinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya baik dibidang sosial maupun



<http://cronkitenews.asu.edu>

politik di kawasan ini. Tradisi itu berhasil dipertahankan sampai sekarang. Namun untuk jumlah masa yang lebih besar pihak *The Royal Park* telah menetapkan sejumlah peraturan. Pelaksananya tentu tidak dikawasan *Speaker Corner* tapi di area yang lebih luas yaitu di *Reformer's Tree* melewati *Cumberland Gate*. Peraturan yang tidak boleh dilewati adalah para koordinator lapangan diminta untuk menghubungi Kepolisian Metropolitan dan otoritas terkait lainnya sebelum memulai aksi. Prinsipnya ada empat poin yang harus dicatat, waktu yang tersedia (tidak bersamaan dengan agenda pihak lain), tidak ada resiko gangguan publik, tidak melibatkan hiburan, menyepakati syarat dan ketentuan yang ditetapkan *The Royal Park*.

Organisasi yang akan berunjuk rasa juga harus menyampaikan proposal tertulis yang berisikan tujuan acara, nama dan alamat organisasi, tanggal dan waktu acara, berapa banyak peserta yang diharapkan hadir, siapa saja yang melakukan orasi, berapa lama perkiraan waktu pelaksanaan, persetujuan dari aparat terkait dan rencana pergerakan masa dan estimasi resiko. Hal yang tidak kalah penting pihak *The Royal Park* harus diyakinkan bahwa organisasi yang akan menggunakan kawasan *Hyde Park* mampu mengelola massa dan agenda kegiatan yang direncanakan. Paparan tentang kesiapan dipresentasikan dalam pertemuan dengan manajemen taman, Kepolisian Metropolitan London dan pihak terkait lainnya. Ada prosedur yang harus dilewati, namun tidak ada upaya untuk mempersulit masyarakat untuk tampil di *Hyde Park*. Ada alat ukur yang dapat diterima semua pihak sehingga

keputusan akhir dapat dipahami sebagai upaya untuk menjamin ketertiban dan keamanan yang harus dikedepankan. Apabila pengajuan dinilai layak, silahkan berunjuk rasa di *Hyde Park*. Sejauh ini sejumlah aksi unjuk rasa besar pernah berlangsung di *Hyde Park* seperti unjuk rasa menentang aksi militer ke Irak yang mampu menghadirkan massa mendekati 2 juta orang. Sejumlah orator hadir dalam kesempatan itu diantaranya artis *Vanessa Redgrave*, *Tim Robbins*, aktifis *HAM Bianca Jagger*, mantan anggota parlemen *Tony Benn*.

Bersama teman-temannya *Kartika* mengaku sangat menikmati atmosfer demokrasi yang menyeruak diantara asrinya taman dan lingkungan di *Hyde Park*. Ada perasaan lepas, plong ketika sudah berhasil menyuarakan atau mungkin tepatnya meneriakkan gagasan, fikiran, pendapat yang pada kondisi tertentu tidak mendapat tempat semestinya. Ia mengaku merekam kegiatan tersebut dan menyebarkannya di media sosial, termasuk *youtube*. *Parle* berkesempatan menyaksikannya di alamat <https://youtu.be/nBmcvodB14E>. Ketika ditanya apakah ada petugas keamanan yang mengawasi pada saat melakukan orasi, megister komunikasi di bidang *media and development* ini mengaku melihat dua petugas berseragam. Mereka berjalan santai sambil memperhatikan aktifitas masyarakat di area *Speaker Corner*. Namun ia meyakini seluruh kegiatan di sana dipantau, secara langsung dengan kehadiran aparat baik berseragam atau tidak. Bisa juga melalui perangkat kamera pemantau yang terpasang di sejumlah sudut di taman yang sebenarnya berjarak tidak terlalu jauh dari gedung

parlemen dan istana *Buckingham*.

"Saya juga pernah ikut unjuk rasa pada saat masih mahasiswa di Jakarta, sebenarnya maksud kita melakukan aksi damai tetapi tidak pernah ada jaminan setelah unjuk rasa berlangsung pasti damai. Mungkin karena aksi turun ke jalan itu pada saat semua kegundahan, kekesalan karena merasa tidak didengar sudah menumpuk di dada ya. Nah kalau itu bisa difasilitasi di sebuah taman demokrasi mungkin kegundahan itu bisa berkurang. Kalau DPR ingin membangun alun-alun demokrasi seperti *Speaker Corner* di *Hyde Park* itu bagus, bagus banget. Kita itu perlu membangun budaya dimana kita menyampaikan pendapat, ngomong bebas tanpa intimidasi dan untuk kepentingan berdebat bukan untuk demonstrasi rusuh tetapi hanya untuk perdebatan itu sendiri," tekan dia bersemangat.

Baginya sudah sepantasnya negara demokrasi seperti Indonesia memiliki taman atau alun-alun demokrasi. Budaya demokrasi seharusnya memberi ruang bagi siapa saja untuk bicara, menyampaikan idenya, memperdebatkan ide itu dalam satu ruang publik yang menjunjung tinggi perbedaan diantara sesama. Ia meyakini apabila sistem itu secara bertahap dibangun, mekanisme disiapkan bersama dan disepakati, masyarakat akan lebih berjiwa besar menyikapi suara-suara yang tidak sama. DPR tekannya harus memulai proses itu, melalui pembangunan *speaker corner* di alun-alun demokrasi. Itu sebuah tuntutan kekinian. Mengacu pada kondisi saat ini menurutnya adalah aneh apabila negara demokrasi tidak punya alun-alun demokrasi. (IKY)



ALUN-ALUN DEMOKRASI, SARANA BEREKSPRESI PENGGIAT DEMOKRASI

Sehubungan rencana akan diadakannya sebuah ruang atau alun-alun demokrasi, dalam kaitannya dengan perkembangan kehidupan demokrasi adalah hal yang sangat wajar. Seiring dengan perkembangan dunia yang makin maju, lembaga legislatifpun harus bisa merespon kemajuan jaman dengan menyesuaikan diri.

Demikian dikatakan anggota DPR Achmad Mustaqim dalam perbincangan dengan Parlemen di Jakarta. Politisi PPP dari Dapil Jateng VIII ini mengemukakan, salah satu rencana menghadirkan sebuah ruang “alun-alun demokrasi” diharapkan akan bisa memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat maupun penggiat demokrasi untuk bisa mengekspresikan dengan baik dan benar, sehingga tidak kontraproduktif. “Kalau semua demo dilakukan terbuka, risikonya tak terkendali bahkan menyebabkan anarkis yang bisa menimbulkan korban jiwa atau kekerasan lain,” tukasnya.

Selain itu, lanjut Mustaqim, sarana alun-alun demokrasi akan menciptakan generasi ke depan yang jauh egaliter terkait dengan system demokrasi yang kita anut. Sudah seharusnya lembaga legislatif, bisa memberikan pendidikan yang terukur, terarah sehingga hasil-hasil yang dari generasi mendatang jauh lebih baik dari pada generasi sekarang. Dengan lahirnya generasi yang lebih baik dalam menjalankan fungsi kenegaraan dengan system demokrasi yang baik, akan menghadirkan kehidupan demokrasi yang jauh lebih baik lebih egaliter dan responsif pada tuntutan masyarakat dan warganya.

Dengan hadirnya alun-alun demokrasi, menurutnya, akan terjadi dialog timbal balik antara anggota legislatif dan warga masyarakat. Mereka bisa bertemu secara langsung sehingga ada *take and give* terkait dengan berbagai informasi dan perkembangan internal

perpolitikan kita maupun politik global.

“Tiga aspek itu menjadi tepat dan wajar untuk membangun alun-alun demokrasi, apalagi telah disetujuinya anggaran Rp 700 M lebih dalam APBN 2016. Kepada pihak-pihak yang belum seiring dalam pemikiran ini, seharusnya bisa berdiskusi dengan semua pemangku kepentingan bahwa alun-alun demokrasi dimaksudkan untuk perkembangan demokrasi ke depan,” jelas politisi PPP ini.

Terhadap kritik sebagian masyarakat dimana kondisi perekonomian yang melemah ditambah masih tinggi kemiskinan dan pengangguran sehingga belum pantas DPR membangun proyek besar, Mustaqim menyatakan pemikiran seperti itu terlalu dini. Pasalnya dengan adanya alokasi anggaran yang diketok palu dalam APBN 2016, maka banyak pembangunan fisik yang nilainya jauh lebih besar dari perencanaan pembangunan alun-alun demokrasi.

Masih banyak gedung di berbagai wilayah Indonesia yang kurang optimal pemanfaatannya hanya karena seolah-olah dibutuhkan tetapi kehadirannya kurang dimanfaatkan dengan baik. Ini juga dijumpai dalam kunjungannya di beberapa daerah.

Karena itu terkait dengan alokasi anggaran untuk alun-alun demokrasi sebagai bagian dari mewujudkan parlemen modern, Mustaqim menilai masih cukup pantas, tidak terlalu berlebihan dilihat pemanfaatan yang sifatnya jangka panjang. Anggaran sifatnya tentatif karena proyek *multi years*, pencairannya tidak sekaligus tetapi bertahap sesuai dengan kondisi ekonomi kita. Artinya kata Mus-

taqim, di tingkat perencanaan anggaran sudah melihat aspek keseimbangan.

“Saya berharap, para penggiat dan LSM yang masih belum sepatutnya dengan pembangunan ini, perlu melihat dengan bijak bahwa hal itu masih bisa ditolelir dibanding dengan bangunan-bangunan yang sejenis di berbagai wilayah yang tingkat pemanfaatannya belum optimal. Kalau ini, kehadirannya sudah terbayang, insya Allah akan bermanfaat buat penggiat demokrasi dari seluruh elemen masyarakat,” tegasnya lagi.

Belum lama ini ada demo ribuan guru agama, PGRI dan aparat desa ke DPR. Menurutnya tidak pantas membiarkan mereka demo di tengah jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat. DPR mestinya bisa memberi ruang yang lebih pantas. “Kejadian seperti menggambarkan bahwa kita perlu tempat pantas yang sama-sama punya hak untuk berdemokrasi termasuk kepada yang belum setuju, sama-sama punya hak untuk memberikan arti demokrasi,” ujar dia dengan mengatakan, itulah yang kita tangkap esensinya. “Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi elemen masyarakat yang tersia-siakan karena tidak ada ruang yang pantas untuk melakukan ekspresi demokrasi,” terangnya.

Periode lalu sudah ada panggung demokrasi tapi tidak dimanfaatkan, menurutnya perlu niat politik dari anggota Dewan yang duduk di fraksi-fraksi. Dia sangat yakin, dalam setahun bertugas ini sudah beberapa kali menerima dele-

gasi dari kelompok masyarakat khususnya di Komisi VIII.

Sesungguhnya itu bisa diatur, sebab dalam skala kecil sudah diterapkan di fraksi. Itu contoh skala lebih besar, Setjen dalam konteks perencanaan sudah matang. Dalam pengaturan nanti anggota Dewan ikut mendampingi dan dia telah menyaksikan sendiri menerima pendemo guru-guru agama, banyak anggota Komisi VIII menerima dan dibahas bersama di rapat Komisi.

Terkait Pergub DKI Jakarta sudah menetapkan alun-alun demokrasi DPR, dia melihat dari konteks bahwa setiap ada demo, karena Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan yang secara teritorial dibawah Gubernur Ahok, maka titik ini dimunculkan dalam Pergub. Tetapi dalam konteks

nasional, maka lokasi alun-alun demokrasi itu berlaku untuk seluruh masyarakat tidak hanya masyarakat DKI.

“Pergub menyangkut teritorial DKI sehingga alun-alun di DPR juga menjadi kewenangan teritorial DKI. Sedangkan terkait fungsi dan pelaksanaannya, ada di bawah manajemen legislatif di Senayan,” jelasnya dengan menambahkan bahwa hal itu adalah bagian dari parlemen modern bagi DPR dan para penggiat demokrasi.

Dia menyatakan setuju dengan Pergub ini,

disamping setiap orang atau elemen masyarakat mempunyai hak berdemokrasi, maka orang lain juga mempunyai hak atas kelancaran dan kenyamanan dalam aktifitas sehari-hari. “Di titik ini saya setuju, mudah-mudahan Pemprov DKI ke depan berkordinasi khususnya adanya fasilitas alun-alun demokrasi dengan DPR,” pungkas Mustaqim. (MP) FOTO: IWAN

ARMANIAS/PARLE/IW

DENGAN HADIRNYA ALUN-ALUN DEMOKRASI, AKAN TERJADI DIALOG TIMBAL BALIK ANTARA ANGGOTA LEGISLATIF DAN WARGA MASYARAKAT. MEREKA BISA BERTEMU SECARA LANGSUNG SEHINGGA ADA TAKE AND GIVE TERKAIT DENGAN BERBAGAI INFORMASI DAN PERKEMBANGAN INTERNAL PERPOLITIKAN KITA MAUPUN POLITIK GLOBAL.

Anggota DPR
Achmad Mustaqim





ALUN-ALUN, DAHULU DAN KINI

Soekarno berpidato di Alun-alun Utara Yogyakarta



Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso

Alun-alun sebagai tempat masyarakat menyampaikan aspirasi sebenarnya sudah lama lekat pada bangsa Indonesia. Jadi ini bukan sesuatu yang baru atau budaya yang diimpor dari mancanegara. Sebagai contoh

di Alun-Alun Yogyakarta ada kebiasaan jika warga menghadapi permasalahan pada sebuah kebijakan yang telah ditetapkan kerajaan maka mereka akan duduk bersila seharian tidak jauh kawasan wringin kurung (pohon beringin yang dipagar). Saat menyampaikan aspirasi ia biasanya mengenakan pakaian dan tutup kepala berwarna putih. Pada saat raja melihat keberadaan warga tersebut maka ia akan memerintahkan petugas untuk memanggil dan mendengar persoalannya secara langsung.

“Aksi penyampaian aspirasi seperti ini biasa disebut *pepe*, ini asli budaya kita sejak zaman penjajahan dahulu, jadi sudah lama. Tapi kemudian seiring perkembangan waktu dan bentuk pemerintahan kondisi ini berubah. Cara penyampaian aspirasi tidak lagi dipusatkan di alun-alun, masyarakat berunjuk rasa lebih terbuka bahkan tidak terkendali dan anarkis,” kata anggota Komisi IX DPR Imam Suroso dalam kesempatan wawancara di Jakarta akhir November lalu.

Wakil rakyat yang juga budayawan ini menyebut ada catatan dalam Kitab Negarakertama karya Mpu Prapanca yang menyebut peran sentral alun-alun pada era kerajaan Majapahit. Masyarakat sudah melakukan beragam aktivitas seperti melaksanakan upacara keagamaan, berkumpul dan berdiskusi sampai pada agenda menyaksikan pelantikan pejabat kerajaan.

MAKNA KEHADIRAN ALUN-ALUN BAGI MASYARAKAT SEMAKIN BERGESER APALAGI KETIKA TERPAAN KOMERSIALISASI MENDERA BANGSA INI. ALUN-ALUN YANG SEHARUSNYA MENJADI RUANG PUBLIK DAN DISEJUMLAH WILAYAH BERADA DI LOKASI STRATEGIS MENJADI INCARAN PENGUSAHA.

Pada era perjuangan menumpas penjajahan alun-alun sering digunakan para tokoh bangsa seperti Bung Karno untuk menggelorakan semangat juang rakyat agar jangan menyerah pada penjajah.

Kondisi itu pelan tapi pasti berubah seiring perubahan rezim serta tatanan ideologi dan pemerintahan yang mengiringinya. Makna kehadiran alun-alun bagi masyarakat semakin bergeser apalagi ketika terpaan komersialisasi mendera bangsa ini. Alun-alun yang seharusnya menjadi ruang publik dan disejumlah wilayah berada di lokasi strategis menjadi incaran pengusaha. Pelan tapi pasti area itu berubah menjadi kawasan bisnis.

“Alun-alun yang telah menempatkan masyarakat di jalur yang benar sebagai makhluk sosial, pelan-pelan terkikis. Publik akhirnya juga larut dalam budaya konsumerisme, peran sosial mereka ditengah masyarakat semakin pudar,” papar politisi dari daerah pemilihan Jateng III ini. Ia kemudian mengajak semua pihak belajar pada ketegasan pemerintah di Inggris yang berhasil mempertahankan ruang publik sehingga taman kerajaan dengan luas mencapai 350 hektar berhasil dipertahankan. Mereka juga berhasil merawat budaya dan interaksi masyarakat di dalam taman yang pada hakekatnya berfungsi sebagai alun-alun tersebut.

PANGGUNG ASPIRASI

Membaca kondisi ini DPR mengusung ide untuk menyiapkan kawasan bagi masyarakat untuk berinteraksi, menyampaikan ide, gagasan dan fikiran tentang bangsa. Hutan kota yang ada disekitar kompleks parlemen Senayan dapat disulap menjadi taman bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang disebut dengan alun-alun demokrasi. Selama ini masyarakat tidak memiliki ruang khusus untuk berorasi bebas, berunjuk rasa sehingga kegiatan itu akhirnya digelar di ruang-ruang publik yang kemudian mengganggu ketertiban dan merusak fasilitas umum.

Bagi anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi rencana pembangunan alun-alun demokrasi di Gedung DPR adalah langkah positif yang patut didukung. Namun ia meminta seluruh langkah kerja disampaikan secara transparan dan berkala kepada masyarakat. Menurutnya sesuatu yang positif kalau tidak dikomunikasikan dengan baik bukan tidak mungkin ditanggapi negatif. Dalam era transparansi seperti sekarang ini setiap perencanaan perlu dijelaskan secara terbuka

kepada publik.

“Alun-alun demokrasi itu baik tidak masalah, tetapi yang baik belum tentu disikapi oleh masyarakat dengan baik pula. Jadi yang paling penting asas transparansi, *good governance* ada disana, itu yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Saya betul-betul sangat sedih apapun yang dilakukan DPR selalu dianggap negatif. Itu menunjukkan ada persoalan di dalam, itu menurut saya,” papar mantan wartawan ini.

Kehadiran alun-alun demokrasi ini menurut Taufiqulhadi bukan bagian dari upaya melarang masyarakat untuk berunjuk rasa atau berorasi di tempat terbuka lainnya. Gagasan ini tegas Imam merupakan bagian dari perjalanan demokrasi bangsa yang terus bergerak dinamis sejak era reformasi dikundak-dangkan. Dengan keberadaan alun-alun ini setiap orang atau



Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi

sekelompok masyarakat yang datang ingin menyampaikan aspirasinya, akan difasilitasi tempat dan akan ada petugas yang mendokumentasikan aspirasi tersebut. Seharusnya lanjut dia anggota DPR-pun dapat menerima langsung masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasinya.

“Jadi kalau mereka ingin pidato menyampaikan aspirasi cukup di ruang yang namanya alun-alun demokrasi. Rakyat itu sudah puas jika terfasilitasi penyampaian aspirasinya dan didengarkan oleh DPR dan pemerintah. Anggota DPR pun harus bersedia untuk datang ke alun-alun Demokrasi, ketika sedang ada penyampaian aspirasi dari masyarakat. Ini juga akan menjadi wadah komunikasi antara anggota DPR dan masyarakat,” kata politisi PDIP ini.

Hal ini seharusnya bukan hanya menjadi inisiatif DPR, tetapi dapat dibangun di berbagai daerah. Sehingga ada proses dialog yang intens di tengah masyarakat. Dosen Universitas Garut Soviyan Munawar menyebut alun-alun demokrasi sebagai sebuah wahana, media, momentum melahirkan gagasan dan merespon aspirasi rakyat dengan peran aktif dari pejabat dan lembaga perwakilan rakyat untuk mendengar, menggagas dan menyatukan tekad dan menampilkan kinerja terbaik bagi pencapaian kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

(AS/IKY) FOTO: IWAN ARMANIAS, JAKA/PARLE/IW

SUARA PUBLIK

NAJWA-MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

ALUN-ALUN DEMOKRASI ITU BAGUS, MEMBATASI DEMONSTRASI ITU TIDAK BAGUS.



Najwa mengaku sudah mendengar kabar angin tentang rencana DPR untuk membangun alun-alun demokrasi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebagai mahasiswa menurutnya ia peduli dengan setiap upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat, salah satunya melalui unjuk rasa.

“Kalau DPR mau menyediakan tempat berunjuk rasa, menyampaikan aspirasi, berorasi di alun-alun demokrasi menurut saya itu bagus. Nah yang tidak bagus itu kalau DPR melarang, membatasi kita mahasiswa berunjuk rasa, itu tidak bagus,” katanya kepada Parle, beberapa waktu lalu.

Baginya unjuk rasa adalah bagian dari demokratisasi yang perlu mendapat tempat di negara ini. Namun ia juga mengakui sejumlah kondisi yang meng-

ganggu warga masyarakat lain seperti kemacetan, pengrusakan fasilitas publik dan dampak lain dari proses demonstrasi itu.

Baginya kalau mempelajari maksud pembangunan alun-alun demokrasi sebenarnya ada positifnya. Ia juga mengakui pada kondisi tertentu media menyurutinya tidak berimbang, hanya mengkritisi sisi negatif dan meminggirkan hal positif.

“Iya namanya juga *power of media*, kita tahulah. Prinsipnya karena inikan untuk kebaikan bersama, masyarakat, ya harus kita dukung. Kalau perlu saya rasa setiap kampus harus punya alun-alun demokrasi, tempat mahasiswa menyuarakan apa yang ingin diperjuangkannya,” demikian Najwa. (IKY)

DIDI MUARDI - REDAKTUR MAJALAH UMMI

BANGUN, TAPI JANGAN KORUPSI

Hal paling disoroti Didi ialah masalah kedewasaan masyarakat ketika berdebat dan berbeda pendapat tentang beragam persoalan. Kondisi ini jauh berbeda dengan warga Inggris yang sudah punya alun-alun demokrasi di kawasan Hyde Park.

“Berdebat tapi tetap tersenyum, logika berfikir tetap jalan. Ini perlu dilatih sebenarnya sejak masih pelajar, adu argumentasi tanpa harus dibawa ke hati. Nah ruang publik untuk ini seharusnya diperbanyak, di situ mereka bisa berlatih cara berdebat, berdiskusi,” ujarnya dalam kesempatan bicara di salah satu hotel di Jakarta belum lama ini.

Pendidikan kemampuan seperti ini bisa dilakukan di sekolah atau di mana saja, tidak harus di alun-alun demokrasi. Namun apabila pembangunan



alun-alun menjadi ruang publik dengan mekanisme yang tertata baik seharusnya ini bisa menjadi solusi positif bagi masyarakat.

Ia menekankan apabila membangun alun-alun asal jadi proyek, tanpa mempersiapkan sistem pendukung dan upaya mencerdaskan publik pada akhirnya menjadi kontraproduktif. Alun-alun pada akhirnya menjadi tempat pergesekan kelompok masyarakat. Gagal berdebat, emosi bicara dan berujung tawuran.

“Jadi ini jangan asal jadi proyek, harus jelas penggunaan anggarannya, harus transparan. Seharusnya ada standar pembangunan fasilitas negara untuk taman dan gedung. Kalau hari gini orientasi membangun untuk korupsi, kapan majunya,” tandas Didi. (IKY)

WILLY - SOPIR TAKSI

TAHU ENGGAK, KALAU MACET KARENA UNJUK RASA KITA NOMBOK



Bagi Willi menghadapi kemacetan akibat aksi unjuk rasa sungguh membuat dia tidak berdaya. Ia mencoba menggambarkan kondisi ketika seseorang harus duduk menunggu sesuatu pada-

hal ada pekerjaan penting harus segera diselesaikan yaitu mencari nafkah untuk keluarga.

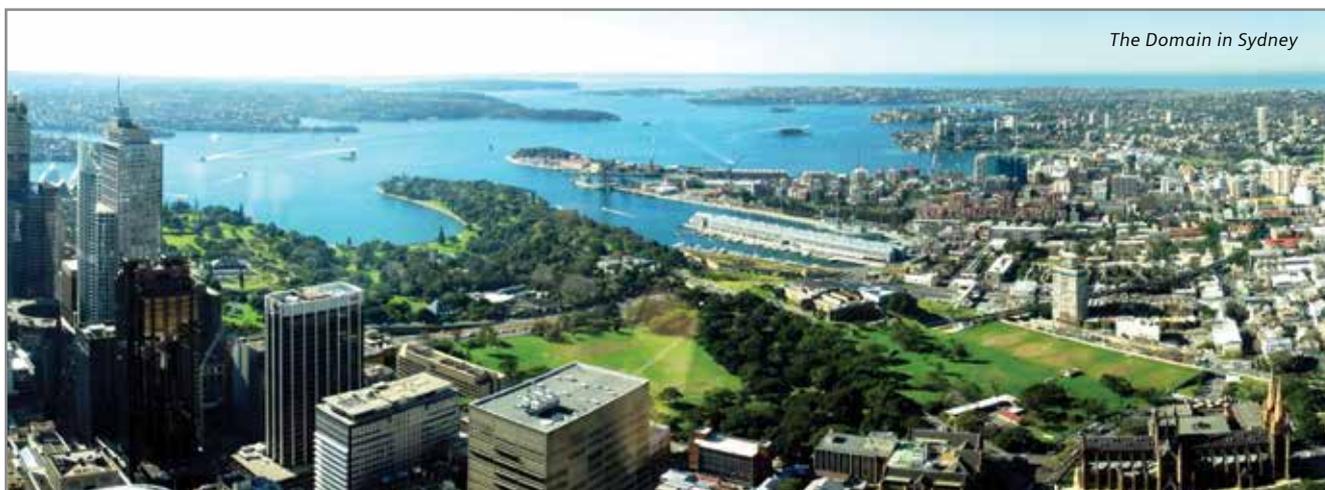
“Tahu tidak yang unjuk rasa setiap ada kemacetan, kita para sopir taksi terkena dampaknya, mobil tidak bisa bergerak berarti tidak bisa usaha. Saya pernah nombok sampai Rp300 ribu, yang unjuk rasa tahu *enggak tu?*” kata dia dengan nada tinggi, saat ditemui di kawasan Cawang, Jakarta.

Ia pernah menumpahkan *uneg-uneg*-nya tersebut kepada sekelompok buruh yang sedang melakukan unjuk rasa. Sebagai sesama pekerja para buruh menurutnya sudah bernasib lebih baik, penghasilan tetap bisa menyicil rumah dan

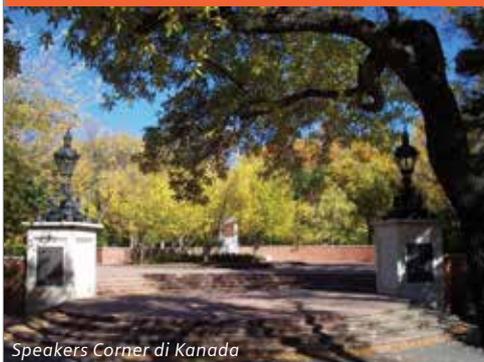
motor. Berbeda dengan sebagian sopir yang sudah 20 tahun bekerja sampai sekarang masih mengontrak rumah.

Ketika ditanya tentang rencana DPR ingin membangun alun-alun demokrasi sebagai tempat bagi masyarakat menyampaikan aspirasinya, menurutnya kebijakan tersebut tidak akan berdampak apa-apa kalau hanya ada di satu tempat.

“Kalau hanya di DPR saja, tidak akan mengurangi kemacetan di jalan, tidak ada pengaruhnya. Seharusnya alun-alun demokrasi itu ada di setiap wilayah, di Bekasi, Tangerang, Jakarta Utara, ada di mana-mana, jadi kalau unjuk rasa di sana saja,” pungkas dia. (IKY)



SPEAKERS CORNER DI NEGARA LAIN



INGGRIS

Hyde Park

AUSTRALIA

The Domain in Sydney

KANADA

Di Regina, Saskatchewan

ITALIA

Di Vittorio Veneto main square

MALAYSIA

Di Padang Kota Lama (Esplanade) Penang

BELANDA

Spreeksteen di Amsterdam

SINGAPURA

Di Hong Lim Park

TRINIDAD TOBAGO

Woodford Square di Port of Spain, Trinidad,

THAILAND

Di Bangkok

AMERIKA SERIKAT

Di Kampus Elon College

Alun-Alun Demokrasi: Avenue Rakyat Berdemonstrasi

Beberapa waktu lalu, pada tanggal 28 Oktober 2015, para mahasiswa yang berjaket Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) berdemonstrasi di depan pintu Gedung DPR/MPR Senayan. Pada malam itu ada 8 Mahasiswa laki-laki dan 1 mahasiswa perempuan ditahan oleh Polda Metro Jaya. Tuduhan yang dialamatkan kepada mereka adalah melawan aparat, membakar ban, yang disangka melakukan pengrusakan jalan aspal dan membuat tembok pagar DPR menjadi hitam. Selama ini keluhan warga tentang demonstrasi selalu dikaitkan dengan kemacetan dan terganggunya kepentingan individualnya. Atas nama kepentingan kota, kepentingan banyak orang, penguasa seringkali menggunakan pendekatan kekuasaan untuk melarang demonstrasi.

Sejak Anggota DPR berkantor di Senayan Gedung ex Conefo pada tahun 1964, tempat ini tidak pernah sepi dari catatan sejarah demonstrasi. Perubahan *regime* dalam sejarah politik di Indonesia tidak pernah sepi dari demonstrasi atau unjuk rasa, Mahasiswa, aktivis Perempuan, para guru honorer. Perubahan politik pada tahun 1998 juga ditandai dengan sekitar 65.000an aktivis mahasiswa dan LSM yang menduduki Gedung DPR/MPR. Menduduki secara harafiah dengan menaiki gedung bundar DPR. Seorang arsitek yang juga Anggota DPR menyatakan bahwa saat ini cukup berbahaya bila ribuan para demonstran menaiki gedung bundar tersebut seperti pada Mei 1998.

Demonstrasi akan terus ada dalam sejarah politik. Di negara yang demokrasinya sudah stabil, usia negara yang sudah ratusan tahunpun tetap ada demonstrasi. Konflik adalah bagian yang selalu ada dalam kehidupan politik. Apabila saluran politik tidak berjalan, maka demonstrasi dengan mobilisasi kekuatan massa menjadi pilihan bagi rakyat dan aktivis. Tempat yang paling tepat untuk melakukan demonstrasi adalah di depan gedung pusat kekuasaan yaitu Istana Presiden atau



Gedung Parlemen. Oleh karena itu sangat penting untuk membangun ruang terbuka di depan pusat kekuasaan. Hal itu sebagai simbol penguasa yang memperhatikan rakyatnya dan sebaliknya rakyat bisa menyampaikan aspirasi yang tersumbat karena sistem yang elitis.

KEBUTUHAN LAPANGAN TERBUKA

Kota-Kota ternama dunia memiliki ruang terbuka yang multi fungsi. Perencanaan kota di Inggris misalnya, selalu ada taman dan ruang terbuka -Square. Kedutaan Indonesia di London - berdekatan dengan Kedutaan Amerika Serikat - berada di sekitar Grosvenor Sq. Di depan kedua kedutaan ini selalu ada demonstrasi yang berhubungan dengan kebijakan kedua negara tersebut. London juga memiliki Hyde Park yang bisa berfungsi sebagai tempat konser musik dan juga sebagai tempat warga menyampaikan aspirasi politiknya. Di Buenos Aires Argentina sangat terkenal dengan Plaza de Mayo, tempat perempuan berdemo di depan istana Presiden yang menuntut keadilan karena keluarga mereka dihilangkan oleh negara. Di Beijing terkenal dengan Tianamen Square, yang merupakan lapangan sangat luas tempat parade dan tempat demonstrasi berdarah aktivis mahasiswa. Bagaimana dengan di Jakarta?



DEMOKRASI MEMBUTUHKAN RUANG TERBUKA. PEMBANGUNAN ALUN-ALUN DEMOKRASI MENJADI BAGIAN PENTING DARI PERENCANAAN KOTA. ALUN-ALUN INI MENJADI TONGGAK MEMBANGUN BUDAYA DEMOKRASI DI INDONESIA.

menggerakkan warganya untuk mengikuti visi pemimpinnya. Namun, pada kenyataan praktiknya pertentangan berbagai kepentingan kelompok seringkali penguasa melupakan rakyatnya. Demonstrasi menjadi tidak dapat dilakukan.

ALUN-ALUN DEMOKRASI BAGIAN PENTING LANDSCAPE POLITIK DI SENAYAN

Ruang terbuka yang multifungsi harus dibangun oleh DPR di kawasan Senayan yang dapat kita sebut sebagai Alun-alun demokrasi. Alun-alun demokrasi ini sebagai ruang publik bagi rakyat, dimana mereka akan aman berdemonstrasi di alun-alun ini. Polisi tidak boleh menggunakan kekerasan menghadapi rakyat baik mahasiswa, kelompok perempuan, buruh, guru honorer dan sebagainya dalam menyuarakan aspirasinya. Rakyat tidak bisa dilarang untuk bertemu, berdemo dalam jumlah besar dan menuntut agar kepentingannya didengar oleh para wakilnya. Dengan demikian alun-alun demokrasi menjadi *landscape* penting yang menyatu dengan fungsi perwakilan.

Dalam kehidupan politik, konflik, perbedaan pandangan adalah suatu hal yang biasa. Tradisi *lobbyist* belum membudaya. Sering pula penguasa bergaya 'pejabat' dengan menutup saluran rakyat dalam menyampaikan kepentingannya yang dihilangkan dan dirugikan oleh negara. Ruang terbuka sangat dibutuhkan untuk menyuarakan aspirasi, mengkritik tanpa perlu takut akan ditangkap oleh polisi. Persepsi negatif sebagian warga terhadap demonstrasi atau disebut demokrasi jalanan, harus disikapi secara positif oleh Anggota Dewan. Membangun alun-alun demokrasi menjadi keharusan dalam membangun pemerintahan yang bertanggung jawab. ***

Demonstrasi di bunderan HI sudah sangat sulit dengan direnovasi bangunan pinggiran air mancur.

Demokrasi membutuhkan ruang terbuka. Pembangunan alun-alun demokrasi menjadi bagian penting dari perencanaan kota. Alun-alun ini menjadi tonggak budaya demokrasi di Indonesia. Warga memiliki tempat berdemonstrasi yang aman dari tindak kekerasan para aparat negara. Bahkan warga membutuhkan ruang terbuka untuk dapat berdemonstrasi sampai malam. Saat ini Undang-Undang yang mengatur demonstrasi hanya boleh sampai jam 18.00.

Apabila demokrasi sudah berkembang dengan lebih baik, sebaiknya aturan tersebut harus dicabut. Penulis sering mengikuti demonstrasi untuk perdamaian di Sydney Australia, di malam hari dengan membawa lilin. Bahkan merencanakan suatu demonstrasi pun juga membutuhkan *art express*, alat peraga dan logistik lainnya. Suatu kegiatan gerakan sosial yang akan memberikan dampak berbeda agar suara kepentingan para demonstran didengar oleh pengambil keputusan.

Bagaimana dengan para penguasa/pejabat? Menjadi pejabat harus siap dengan tuntutan warga yang berbeda dengan logika para penguasa. Membangun demokrasi harus mendengarkan warganya, memberikan arahan, memimpin dan

TARIK ULUR NASIB PMN

Komisi VI DPR RI begitu panjang dan lelah membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk sejumlah BUMN. Badan Anggaran (Banggar) DPR juga mendebat panjang peruntukan PMN. Walau sudah disetujui di tingkat komisi dan Banggar, nasib PMN akhirnya tertunda setelah terjadi tarik ulur pembahasan pada Rapat Paripurna DPR akhir Oktober lalu.

PMN tidak masuk dalam agenda RAPBN 2016. Paripurna memutuskan baru akan membahasnya pada RAPBN-P 2016. PMN telah menyita energi politik di dua lembaga, legislatif dan eksekutif. Ada dua keinginan yang berseberangan. Di satu sisi, Pemerintah ingin segera menjalankan program pembangunan lewat suntikan PMN ke sejumlah BUMN. Di lain sisi,

DPR menekan pemerintah agar mengutamakan anggaran desa dan kebutuhan mendesak lainnya.

Presiden Joko Widodo sudah mengundang Pimpinan DPR ke istana awal November lalu untuk melobi para wakil rakyat agar seirama dalam menentukan nasib PMN. Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid mengungkapkan, Banggar sudah menyetujui alokasi anggaran PMN

dalam RAPBN 2016, kecuali F-Gerindra yang tak menyetujui. Ada catatan kritis dari Banggar DPR kepada pemerintah.

Catatan kritis pertama, PMN harus memberi keuntungan signifikan bagi negara. Selain sebagai agen pembangunan, BUMN harus mampu menggerakkan ekonomi nasional. Catatan kritis kedua, selama ini PMN belum memberi dampak kesejahteraan bagi masyarakat. “Ada sekitar Rp 40 triliun lebih PMN yang diajukan dalam RAPBN 2016. Tapi, dividennya turun hanya Rp 31 triliun. Ini artinya target memberi dividen kepada negara tidak terbukti,” kata Jazil.

Menggeser pembahasan PMN ke RAPBN-P 2016 merupakan jalan tengah yang dicapai saat paripurna lalu. Pemerintah diminta mengevaluasi kucuran PMN 2015 yang daya serapnya masih rendah. Hasil audit BPK atas PMN 2015 pada tengah semester nanti, juga akan menjadi rujukan DPR untuk menentukan kembali nasib PMN kloter kedua tahun anggaran 2016.

Menurut Jazil, anggaran PMN sebaiknya tidak dikucurkan ke banyak BUMN. Cukup ke BUMN pilihan saja, tapi dengan PMN yang besar dan memadai. Harapannya, BUMN tersebut bisa tumbuh besar menjadi perusahaan negara yang mampu bersaing di tingkat ASIA. Selama ini PMN yang diberikan, kata Jazil, diecer ke sejumlah BUMN dengan anggaran yang minim. Ada BUMN yang menerima Rp 500 miliar, ada pula yang menerima Rp 200 miliar.

Ia khawatir, suntikan PMN yang kecil itu tak menyehatkan BUMN. Sebaliknya



Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid

“PEMERINTAH DIBERI KESEMPATAN LAGI UNTUK BERPIKIR APA SIH PENTINGNYA PMN. JANGAN SAMPAI DUGAANNYA PMN DIJADIKAN SAPI PERAHAN DAN JADI SUMBER KEGIATAN POLITIK YANG TIDAK PERLU. PMN HARUS DIBERIKAN SECARA TERBATAS SAJA, TAPI JELAS TUJUANNYA. KALAU INFRASTRUKTUR KASIH SAJA KE SATU BUMN INFRASTRUKTUR. PILIH SALAH SATU, LALU DIBERIKAN KEKUATAN YANG LEBIH,” PAPAR JAZIL.

malah membebani negara saja. “Kalau nanti disuntik tambah tidak sehat, itu bukan tujuan PMN. Tujuannya, BUMN yang disuntik makin kuat dan memberikan sumbangan. Jangan menyuntik yang sudah mau mati. Nanti obatnya hilang, BUMN-nya mati. Inilah yang menciptakan keraguan,” kilah Jazil lagi.

Ditambahkan Anggota Komisi V DPR itu, pemerintah harus lebih selektif dalam mengucurkan PMN 2016. Yang tentu harus dihindari, PMN jangan menjadi sumber pendanaan politik dan BUMN yang mendapat PMN tidak dijadikan sapi perahan penguasa.

“Pemerintah diberi kesempatan lagi untuk berpikir apa sih pentingnya PMN. Jangan sampai dugaannya PMN dijadikan sapi perahan dan jadi sumber kegiatan politik yang tidak perlu. PMN harus diberikan secara terbatas saja, tapi jelas tujuannya. Kalau infrastruktur kasih saja ke satu BUMN infrastruktur. Pilih salah satu, lalu diberikan kekuatan yang lebih,” papar Jazil.

Politisi dari dapil Jatim X itu, menjelaskan, kelak realisasi pencairan PMN harus melalui pembahasan lagi di Komisi XI DPR. Dari Komisi XI kemudian dibicarakan di Banggar. Banggar sendiri, sambung Jazil, tak lagi membahas detail teknisnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan, Komisi VI sudah membahas usulan PMN dengan sangat transparan. Beberapa catatan penting dari Komisi VI, perlu dibentuk tim pengawas tersendiri atas penggunaan PMN. Asas transparansi harus dijunjung tinggi. Dan tak ketinggalan ada audit BPK yang harus diperhatikan sebagai rujukan evaluasi.

Komisi VI tak mempermasalahkan



Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin

bila usulan PMN yang telah dibahas secara maraton itu akhirnya ditunda oleh Paripurna hingga RAPBN-P 2016. “Tetapi patokan yang sudah diberikan Komisi VI harus dijalankan dan tidak ada lagi kriteria lain yang melenceng dari situ. BUMN yang akan menerima PMN haruslah BUMN yang mengedepankan infrastruktur, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan memperkuat UMKM,” ungkap politisi Partai Golkar tersebut.

Ketika sudah disetujui Komisi VI, usulan PMN tersebut mestinya melenggang mulus ke Banggar hingga Paripurna, lantaran komposisi fraksi di Komisi VI, Banggar, dan Paripurna sama. Adakah persoalan dengan komunikasi politik selama ini? Menurut Dodi, tak ada persoalan dengan komunikasi politik. Banggar, kata Dodi, tak hanya mengurus usulan anggaran dari Komisi VI. Banyak usulan anggaran dari komisi lain yang juga perlu pembahasan.

Ditambahkannya, Banggar melihat masih ada alokasi PMN yang lebih prioritas dari yang sudah disetujui Komisi VI. Seperti disampaikan Jazilul Fawaid sebelumnya, PMN sebaiknya tidak diberikan terlalu banyak ke sejumlah BUMN. Cukup 5-7 BUMN saja, tapi dengan alokasi PMN yang signifikan. “Tentu teman-teman di Banggar punya pertimbangan lain. Walaupun terjadi perdebatan lagi, saya kira wajar-wajar saja,” ujar Dodi lagi.

Komisi VI, sambung Dodi, tentu tak ingin PMN diberikan tanpa selektivitas dan evaluasi yang ketat. BUMN yang terus merugi dan makan uang negara, tak mungkin diberikan begitu saja. “Kalau kita suntik terus, nanti jadi BUMN yang malas. Kita juga tidak mau seperti itu. Harus diteliti satu per satu,” tandas politisi dari dapil Sumsel I tersebut. (MH)

FOTO: NAEFUROJI, JAKA/PARLE/IW



Pilkada Serentak, Momentum Pilih Pemimpin Ideal

Pilkada serentak yang dilangsungkan pada 9 Desember 2015 merupakan momentum demokrasi milik rakyat. Momentum demokrasi milik rakyat itu diharapkan mampu menghadirkan pemimpin-pemimpin daerah yang sanggup meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada tanggal itulah akan tercatat sebagai hari bersejarah terselenggaranya hajatan besar bagi rakyat Indonesia yang akan memilih calon pemimpin daerahnya. Menurut data dari KPU tercatat, ada sebanyak 9 provinsi untuk pemilihan gubernur, 224 kabupaten dan 36 kota. Pilkada Serentak 2015 merupakan hajatan pesta demokrasi terbesar di negeri ini.

Sejatinya, tujuan dari Pilkada serentak dapat menghemat biaya operasional dan meminimalisir terjadinya konflik yang berkepanjangan. Adapun perubahan sistem instrumen demokrasi untuk diselenggarakan secara serentak ini dilatari oleh keinginan untuk penghematan biaya politik, dan agar energi



pemerintah terhadap perhelatan demokrasi di daerah-daerah tidak secara terus-menerus.

Sementara tujuan utama dari pemilihan kepala daerah adalah memperoleh pemimpin ideal yang dapat membangun daerah dengan segala kemampuannya bukan karena banyaknya ma-

teri ataupun kedekatan dengan partai penguasa di daerah.

Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Irsyan Maududy mengungkapkan, terpilihnya seseorang menjadi kepala daerah, acapkali bukanlah kesesuaian atau harapan

bagi masyarakatnya memperoleh pemimpin yang berkualitas. Banyak kepala daerah yang tidak baik *track record*-nya terpilih, hal ini dikarenakan kesuksesan menjabat kepala daerah tidak terlepas dari kehebatan tim suksesnya dalam menghadapi kontestasi pilkada tersebut. Mereka melakukannya dengan berbagai cara, seringkali dilakukan dengan melanggar aturan yang ada, sehingga ketika menjabat kepala daerah menjadi bermasalah dan tersandung kasus hukum.

Pilkada serentak semestinya adalah pertarungan politik yang berwawasan kebangsaan yang menguntungkan rakyat. Politik berwawasan kebangsaan, adalah politik yang mementingkan rakyat, bukan politik yang mementingkan kelompok atau golongan atau bukan politik pragmatis dan transaksional. Untuk mewujudkannya maka semua perangkat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak bisa berfungsi secara optimal.

Pilkada serentak 9 Desember 2015 merupakan pilkada serentak tahap pertama. Setelah pilkada serentak 9 Desember 2015, direncanakan akan dilakukan pilkada serentak pada 2018 sebagaimana penjelasan Menteri Dalam Negeri pada Evaluasi dan Pemberian Penghargaan Pemilu 2014 di KPU beberapa waktu yang lalu.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR tanggal 1 September 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan laporan perkembangan tahapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 terutama yang terkait dengan mekanisme pencalonan, sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

SKENARIO TAHAPAN PILKADA SERENTAK

PEMILIHAN SERENTAK TAHAP PERTAMA
pada tahun 2015 untuk para Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2015

PEMILIHAN SERENTAK TAHAP KEDUA
pada tahun 2018 untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2016, 2017, dan 2018

PEMILIHAN Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak secara nasional pertama kali dimulai tahun 2020



Komisi II DPR rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri

Wakil Walikota.

Penyelenggaraan pilkada dalam konteks ke-Indonesiaan memang merupakan masalah yang rumit sehingga tahapan penyelenggaraan memerlukan keseriusan tersendiri terutama dalam upaya mendeteksi dini berbagai permasalahan yang mungkin timbul saat pelaksanaan.

Belum lagi sejumlah persoalan yang timbul karena latar belakang politik seperti mutasi sejumlah pejabat daerah yang terjadi di beberapa daerah. Terhadap permasalahan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman menegaskan agar daerah jangan melakukan mutasi pejabat guna memenangkan calon tertentu.

“Jangan coba-coba melakukan atau memutasi pejabat karena ini berpengaruh terhadap calon-calon tertentu. Jangan coba-coba aparat sipil negara untuk memenangkan calon tertentu,” kata Rambe Kamarul Zaman.

Rambe juga meminta agar KPU dan Bawaslu untuk lebih ketat mengawasi adanya KTP ganda. “Jangan ada mobilisasi perpindahan masyarakat dan juga permintaan KTP baru sebab untuk pem-

buatan KTP terakhir tanggal 1 Maret batas akhirnya,” tegas politisi Golkar ini.

PANTAUAN DPR

Guna memantau langsung persiapan dan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak, Komisi II DPR dan para anggota Komisi II DPR dengan memanfaatkan Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 telah terjun langsung ke beberapa daerah. Sejumlah permasalahan diantaranya soal anggaran untuk logistik seperti kotak suara, bilik suara, dan kesiapan data untuk daftar pemilih tetap (DPT) menjadi perhatian utama dalam upaya pengawasan kesiapan pelaksanaan pilkada serentak tersebut.

Dari hasil pantauan Komisi II DPR, masih ditemukan sejumlah permasalahan di beberapa daerah diantaranya: di Provinsi Jambi ditemukan adanya perbedaan Data Agregat Kependudukan dengan DPT pilpres 2014, dan terjadi pengurangan sejumlah 132.000 orang.

“Terkait hal tersebut di atas, Komisi II mengharapkan KPU Prov Jambi untuk berhati-hati dalam sinkronisasi data pe-

milih, sehingga tidak bermasalah dalam pembentukan DPS dan DPT,” kata Wakil Ketua Komisi II Wahidin Halim sebagaimana laporan kunjungan spesifik Komisi II ke Provinsi Jambi.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah adanya laporan dari Bawaslu Provinsi Jambi mengungkapkan permasalahan dengan Permendagri No. 51 Tahun 2015 yang telah menghapus beberapa hal sehingga panwas Kota/ Kabupaten panwasacam agak kerepotan anggarannya.

Sementara dari hasil pantauan Komisi II ke Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Lukman Edy terungkap bahwa MoU Sentra Gakkumdu untuk Pilkada belum dapat dibentuk menunggu perubahan MoU yang dilakukan Bawaslu RI, POLRI dan Kejaksaan Agung RI. Meskipun demikian, Panwas Kabupaten/ Kota telah melakukan kordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka pembentukan Sentra Gakkumdu Pilkada, namun untuk menuangkannya dalam bentuk MoU itulah masih terkendala dan menunggu perubahan MoU ditingkat pusat.

ANTISIPASI KONFLIK

Terkait dengan adanya kekhawatiran potensi konflik yang timbul saat pilkada serentak, dalam pantauan Komisi II DPR ke Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin Ahmad Riza Patria terungkap beberapa pihak mensinyalir bahwa Pilkada Gubernur di Kalimantan Tengah terindikasi terjadi konflik horizontal. Namun, Kepala kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menegaskan bahwa potensi konflik tersebut berada dalam pengawasan mereka sehingga dapat dipastikan tidak akan menimbulkan konflik yang serius.

Antisipasi terhadap konflik memang patut terus dilakukan antara lain dengan cara melakukan Bimbingan Teknis/Supervisi kepada KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2015, melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu/Panwas, melibatkan partisipasi masyarakat (kelompok disabilitas, kelompok marjinal, pemilih pemula, tokoh agama/adat/masyarakat/perempuan), melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggara pemilihan secara berjenjang, melakukan penyelesaian berbagai permasalahan secara internal sesuai dengan tingkatan dengan mengacu kepada PKPU Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, melakukan koordinasi dengan Pihak Bawaslu/Panwas Kab/Kota, Kepolisian dan pemangku kepentingan serta melakukan pemetaan potensi konflik.

Sementara Anggota Komisi II Azikin Solthanjadi dari Fraksi Partai Gerindra menyampaikan bahwa Komis II akan melakukan evaluasi terhadap semua Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak.

“Informasi yang kami dapatkan bahwa masih ada daerah yang belum mencairkan dana pilkadanya. Hal ini sangat berbahaya bagi suksesnya pelaksanaan pilkada, oleh sebab itu Komisi II akan melakukan kordinasi dengan Menteri Dalam Negeri agar memberikan teguran keras terhadap Kabupaten/Kota yang betul-betul tidak mencairkan dana



Simulasi pengamanan Pilkada Serentak



Anggota Komisi II Azikin Solthanjadi

pilkadanya,” ungkap Azikin.

“Ini kan sudah disepakati antara Komisi II dengan Mendagri bahkan pertemuan antara Mendagri, Kapolri, dan Kejaksaan terkait dengan suksesi Pilkada Serentak ini sudah dilakukan. Dan Mendagri sudah berjanji akan menyiapkan dana untuk pelaksanaan kegiatan pilkada ini. Ini sudah ditindaklanjuti oleh Mendagri kepada semua Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap pelaksanaan kesiapan pilkada diseluruh Indonesia,” ungkapnya.

Politisi Partai Gerindra ini tegaskan

bahwa Pilkada Serentak 2015 merupakan program nasional dan pilkada serentak yang pertama di Indonesia yang harus disukseskan bersama. “Dengan adanya informasi yang kami terima ini, kita akan melakukan evaluasi dan kordinasi kembali dengan Mendagri bahkan kalau perlu kita melakukan kunjungan spesifik untuk melihat sejauh mana kesiapan pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pilkada ini,” terang Azikin.

Dengan melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya konflik dalam pilkada serentak tersebut secara sistematis semoga penyelenggaraan pilkada serentak dapat berlangsung dengan tertib, aman dan lancar.

Hal terpenting lainnya terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak adalah bahwa pelaksanaan pilkada serentak merupakan momentum demokrasi milik dan untuk kepentingan rakyat karenanya harus sesuai dengan berbagai aturan dan norma yang berlaku di negeri ini. Berbagai permasalahan dan pelanggaran yang timbul dari penyelenggaraan pilkada serentak harus diselesaikan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, sehingga momentum demokrasi ini dapat terjaga. (SKR) FOTO:

RIZKA, IST/PARLE/IW

Kinerja Pajak 2015 GAGAL CAPAI TARGET

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Lebih dari 70 persen pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanah air bersumber dari penerimaan perpajakan.

Undang-undang APBN menyebutkan bahwa penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak memiliki empat fungsi penting dalam perekonomian, sehingga target dan realisasi penerimaan pajak menjadi hal yang *urgent* untuk diperhatikan.

Pertama, fungsi *budgetair* atau anggaran. Fungsi ini menyebutkan, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dimana pajak berperan untuk membiayai belanja negara. **Kedua**, yakni fungsi *regulerend* atau regulasi, yang dimaksudkan bahwa pajak dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan melalui berbagai ketentuan perpajakan. **Ketiga**, fungsi stabilitas, di-

si pendapatan, yakni pajak sebagai alat pemerataan penghasilan. Pajak dipungut dari masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih dan digunakan untuk membangun fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selama periode 2010-2014, realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2010, penerimaan pajak sebesar Rp 723,3 triliun, dan merangkak naik hingga sebesar Rp 1.146,8 triliun pada tahun 2014, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,2 persen per tahun.

Sejalan dengan semakin meningkatnya realisasi penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan dalam negeri juga meningkat, dari 72,9 persen pada tahun 2010 menjadi 74,2 persen pada tahun

2014. Pertumbuhan penerimaan perpajakan tertinggi terjadi di tahun 2011 sebesar 20,8 persen, tetapi setelah itu pertumbuhan pener-

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Target (APBNP)	743,3	878,6	1.016,2	1.148,3	1.246,0	1.489,3
Realisasi (LKPP)	723,3	873,8	980,5	1.077,3	1.146,8	1.366,9
Realisasi (%)	97,3	99,5	96,5	93,8	92,0	91,8

Ket: *) Perkiraan Realisasi
Sumber UU APBNP dan LKPP, berbagai tahun, diolah

mana pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif. **Keempat**, adalah fungsi distribu-

si penerimaan perpajakan terus menurun dari 12,2 persen pada tahun 2012 menjadi 6,5 persen pada tahun 2014.

Semakin menurunnya pertumbuhan penerimaan perpajakan disebabkan oleh semakin menurunnya penerimaan dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional sebagai dampak dari memburuknya perekonomian global



yang berpengaruh kepada perekonomian domestik. Selain itu, walaupun secara nominal penerimaan perpajakan naik setiap tahunnya namun jika dibandingkan terhadap target yang ditetapkan mengalami penurunan.

APBN-Perubahan 2015 menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.489,3 triliun. Namun, data menunjukkan realisasi pendapatan negara sebesar 63 persen atau Rp 1.109 triliun. Sedangkan realisasi belanja dari APBN-P 2015 mencapai 71 persen atau Rp1.408 triliun sehingga ancaman defisit kian nyata karena 2015 bakal berakhir kurang dari dua bulan lagi.

Penerimaan perpajakan sendiri per 30 September 2015 baru mencapai Rp



masi birokrasi dan perubahan struktur organisasi serta perbaikan administrasi perpajakan melalui *e-tax invoice* dan pencegahan *transfer pricing*.

Selain itu, dengan adanya peningkatan penegakkan hukum, perbaikan regulasi (intensifikasi) terkait PPh, PPN dan PPNBM, eskstensifikasi wajib pajak baru, optimalisasi kepabeanaan dan cukai, serta perbaikan mekanisme fasilitas penundaan pembayaran cukai, diharapkan dapat mencapai target. Namun dengan berbagai upaya tersebut, ternyata peningkatan penerimaan perpajakan 2015 setiap bulannya berkisar antara 5,1 hingga 8,0 persen.

Realisasi penerimaan perpajakan Semester I 2015 tercatat sebesar Rp 555,19 triliun atau 37,3 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2015. Secara nominal, memang sudah lebih tinggi dari semester satu tahun 2014, namun tidak dengan persentasenya. Pasalnya, Semester I APBNP 2014, penerimaan perpajakan telah mencapai 43,3 persen dari target yang ditetapkan.

Dari realisasi tersebut, penerimaan PPh migas telah mencapai Rp 27 triliun atau 54,5 persen dari target Rp 49,5 triliun, PPh non migas Rp 263,1 triliun atau 41,8 persen dari target Rp576,5 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai Rp 183,7 triliun atau 31,9 persen dari target Rp576,5 triliun. Sementara, untuk penerimaan cukai mencapai Rp 60,8 triliun atau 41,7 persen dari target Rp 145,7 triliun, bea masuk sebesar Rp 15,5 triliun atau 41,8 persen dari target Rp 37,2 triliun dan bea keluar Rp1,9 triliun atau 15,7 persen dari target Rp 12,1 triliun.

FOTO: <http://jownews.com/>

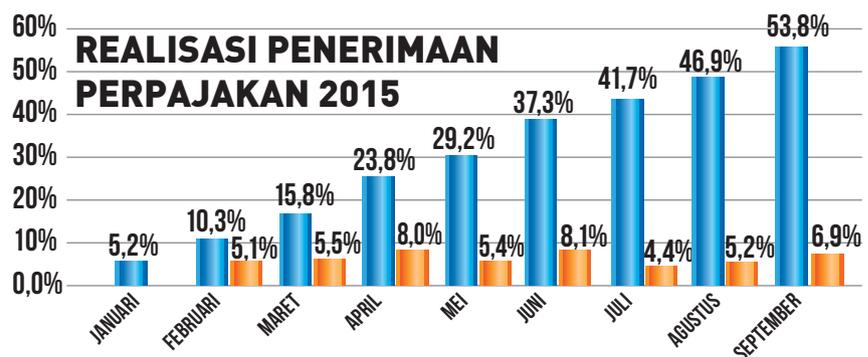
800,9 triliun atau 53,8 persen dari target dalam APBN-P. Dengan sisa waktu yang tinggal 2 bulan ke depan kemungkinan besar target pajak 2015 tidak tercapai.

MEMPERLEBAR DEFISIT APBN DAN SHORTFALL

Penerimaan perpajakan pada APBN 2015 direncanakan sebesar Rp 1.379,9 triliun. Hal ini dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2015 dan didukung oleh pelaksanaan kebijakan perpajakan secara menyeluruh. Namun dalam APBN-P 2015, target penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 1.489,3 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, dibutuhkan upaya

husus dan dukungan optimal untuk memenuhi peningkatan target pajak tersebut. Sejumlah langkah perbaikan di sektor pajak yang akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pencapaian tersebut adalah melakukan refor-



Sumber: Ditjen Perbendaharaan, diolah

ANGGARAN

Realisasi Penerimaan Perpajakan								
Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III 2015								
(dalam triliun rupiah)								
Uraian	APBNP	Realisasi TW I		Realisasi TW II		Realisasi TW III		
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Penerimaan Perpajakan	1.489,3	235,8	15,8	555,1	37,3	800,9	53,8	
a. Pajak Dalam Negeri	1.440,0	227,5	15,8	537,7	37,3	775,3	53,8	
i. Pajak Penghasilan	679,4	119,3	17,6	290,1	42,7	397,5	58,5	
Migas	49,5	12,8	25,9	27	54,5	39,7	80,2	
Non Migas	629,8	106,4	16,9	263,1	41,8	357,8	56,8	
ii. Pajak Pertambahan Nilai	576,5	82,6	14,3	183,7	31,9	271,7	47,1	
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	26,7	0,3	1,1	0,6	2,2	13,2	49,4	
iv. BPHTB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
v. Cukai	145,7	24,1	16,5	60,8	41,7	88,9	61,0	
vi. Pajak Lainnya	11,7	1,2	10,3	2,5	21,4	3,8	32,5	
b. Pajak Perdagangan Internasional	49,3	8,3	16,8	17,4	35,3	25,7	52,1	
i. Bea Masuk	37,2	7,5	20,2	15,5	41,7	22,6	60,8	
ii. Bea Keluar	12,1	0,9	7,4	1,9	15,7	3,0	24,8	

Sumber : Ditjen Perbendaharaan, diolah

Beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan perpajakan adalah perlambatan ekonomi triwulan I 2015. Selain itu, terjadi penurunan nilai impor yang disebabkan beberapa faktor, yang diantaranya karena tingginya biaya impor dan moderasi permintaan serta rendahnya harga komoditas dan depresiasi kurs rupiah. Penerimaan bea keluar realisasinya masih rendah karena bea keluar dari kelapa sawit masih nol yang disebabkan penurunan *threshold* atau ambang batas pengenaan kelapa sawit sekitar 20 persen menjadi antara US\$ 500 sampai US\$ 600 (dari semula US\$ 750 per metrik ton). Bea keluar masih didukung ekspor tembaga oleh perusahaan seperti Freeport dan Newmont.

Rendahnya penerimaan perpajakan semester I APBN-P 2015 menjadi salah satu faktor melebarnya defisit APBN menjadi Rp 76,4 triliun. Rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi pada Semester I tahun 2015 membuat Pemerintah merevisi target penerimaan perpajakan hingga akhir tahun 2015 menjadi

sebesar Rp 1.366,9 triliun atau lebih rendah Rp 122,2 triliun dari target dalam APBN-P 2015. Meskipun demikian, dalam perkiraan realisasi tahun 2015, target penerimaan perpajakan menunjukkan peningkatan sebesar 19,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

Triwulan III 2015, data penerimaan perpajakan menunjukkan di angka Rp 800,9 triliun atau 53,8 persen yang berhasil direalisasikan oleh Pemerintah. Dari realisasi tersebut, penerimaan PPh migas telah mencapai Rp 39,7 triliun atau 80,2 persen dari target Rp 49,5 triliun, PPh non migas Rp 357,8 triliun atau 56,8 persen dari target Rp 576,5 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai Rp 271,7 triliun atau 41,7 persen dari target Rp 576,5

triliun. Sementara, untuk penerimaan cukai mencapai Rp 88,9 triliun atau 61,0 persen dari target Rp 145,7 triliun, bea masuk sebesar Rp 22,6 triliun atau 60,9 persen dari target Rp 37,2 triliun dan bea keluar Rp3,8 triliun atau 32,8 persen dari target Rp 12,1 triliun.

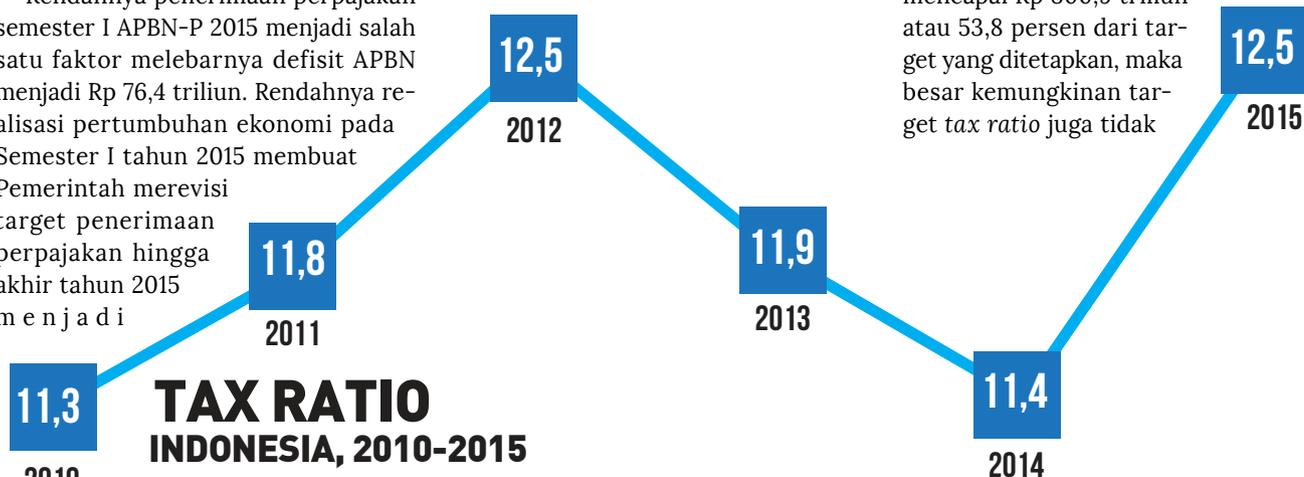
Pada Semester I, keterangan dari Menkeu, diperkirakan *shortfall* (selisih target dengan prediksi capaian) sebesar Rp 122 triliun. Namun pada Oktober 2015 diperkirakan *shortfall* meningkat menjadi sekitar Rp 130 - 140 triliun.

TAX RATIO TAK TERCAPI

Tax ratio Indonesia berangsur-angsur meningkat pada periode 2010-2012, namun mengalami penurunan di tahun 2013 dan 2014. Realisasi rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (*tax ratio*) tahun 2014 mencapai 11,36 persen. Persentase ini menurun sebesar 0,50 persen bila dibandingkan dengan *tax ratio* tahun 2013, yang sebesar 11,86 persen.

Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan perpajakan dibandingkan dengan PDB suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara dan menjadi salah satu indikator ketahanan fiskal suatu negara.

Untuk tahun 2015, *tax ratio* dalam APBN-P ditargetkan sebesar 12,53 persen. Namun mengingat pencapaian realisasi penerimaan perpajakan yang baru mencapai Rp 800,9 triliun atau 53,8 persen dari target yang ditetapkan, maka besar kemungkinan target *tax ratio* juga tidak



Sumber: LKPP, berbagai tahun dan UU APBNP 2015

tercapai. Akibatnya, *tax ratio* terhadap PDB tahun ini diperkirakan tidak mencapai 12 persen. Angka ini jauh di bawah target APBN-P 2015 yang 12,53 persen. *Tax ratio* tahun ini pun tidak lagi realistis.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, memperkirakan *shortfall* pajak tahun ini bisa mencapai Rp 240 triliun, dua kali lipat dari proyeksi pemerintah. Artinya penerimaan pajak tahun ini hanya mencapai 80 persen. Dengan memperhitungkan realisasi penerimaan pajak tanpa memasukkan bea dan cukai yang sebesar 80 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,7 persen, *tax ratio* tahun ini diperkirakan hanya 9,6 persen. Jika memperhitungkan keseluruhan perpajakan, bisa 90 persen dari target, jadi *tax ratio* mencapai 10,6 persen.

RENDAHNYA TAX COVERAGE RATIO DAN TAX COMPLIANCE

Tax coverage ratio merupakan perbandingan antara realisasi pajak yang berhasil dipungut dibandingkan dengan potensi pajak yang sebenarnya ada di dalam perekonomian. *Tax ratio* yang rendah bukan berarti potensi pajak kecil karena Indonesia memiliki potensi perekonomian besar. Yang kecil adalah keterbatasan pada kemampuan menggali potensi pajak itu sendiri atau *tax coverage* yang rendah. Keterbatasan menggali potensi pajak membuat *tax ratio* pajak berkisar pada angka 11 persen.

Berdasarkan LAKIP Kementerian Keuangan 2014 diketahui bahwa dari sekitar 45 juta orang yang berpotensi sebagai Wajib Pajak, hanya 26,91 juta yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dari angka tersebut, WP Terdaftar wajib SPT sekitar 18,35 juta WP dan yang menyampaikan SPT hanya 10,8 juta WP. Dari 10,8 juta WP yang menyampaikan SPT, setidaknya hanya 900 ribu orang yang membayar pajak sesuai kategori wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Salah satu penyebab rendahnya *tax coverage* adalah minimnya jumlah pegawai pajak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia.

Dua sasaran penting yang perlu dica-

SIMULASI PERHITUNGAN TAX RATIO



PDB Harga Berlaku s.d. Triwulan III 2015	Rp8.574,2 triliun
PDB Harga Konstan 2010 s.d. Triwulan III 2015	Rp6,708,1 triliun
Penerimaan Perpajakan s.d. Triwulan III 2015	Rp800,9 triliun
Tax Ratio Triwulan III Berdasarkan PDB Harga Berlaku	9,34%
Tax Ratio Triwulan III Berdasarkan PDB Harga Konstan	11,90%

Sumber: BPS DAN DITJEN PERBENDAHARAAN, DIOLAH

DUA SASARAN PENTING YANG PERLU DICAPAI PEMERINTAH YAKNI MENJADIKAN WAJIB PAJAK YANG MASIH DI LUAR UNTUK MASUK KE DALAM SISTEM PERPAJAKAN, DAN KEMUDIAN MENINGKATKAN COMPLIANCE (KEPATUHAN) WAJIB PAJAK YANG SUDAH BERADA DI DALAM SISTEM PERPAJAKAN.



pai Pemerintah yakni menjadikan wajib pajak yang masih di luar untuk masuk ke dalam sistem perpajakan, dan kemudian meningkatkan *compliance* (kepatuhan) wajib pajak yang sudah berada di dalam sistem perpajakan.

Dirilis dari data Ditjen Pajak, per 10 September 2015, tingkat kepatuhan wajib (*tax compliance*) pajak per orang baru mencapai 56,36 persen. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi, dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki NPWP. Angka tersebut jauh lebih

rendah dibandingkan tingkat kepatuhan 2014 yang mencapai 59,88 persen. Namun angka pada tahun 2014 sudah sampai dengan bulan Desember. Sehingga, masih ada peluang pada akhir tahun 2015 untuk meningkatkan *tax compliance*.

Di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak badan per 10 September 2015 baru mencapai 49,74 persen. Walaupun masih tergolong minim, capaian ini lebih tinggi dari tahun 2014, sebesar 47,34 persen. Kenaikan tersebut disebabkan banyak wajib pajak badan yang mulai memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.03/2015.

Dari berbagai data yang menunjukkan kinerja realisasi penerimaan perpajakan yang masih rendah, maka perlu dilakukan kebijakan terobosan baik intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan *extra effort* mengingat paket kebijakan ekonomi saat ini lebih memberi kelonggaran di bidang perpajakan. Penguatan, pembenahan dan penambahan sumber daya manusia serta penguatan kelembagaan otoritas perpajakan harus segera dilakukan. Bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka optimalisasi kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Tentu kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan secara sukarela atau *voluntary compliance*.

Ditulis oleh: Martiasih Nursanti (Analisis pada Sub Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran)

Disunting oleh: sf (Tim Parlementaria)

RUU MINOL : LINDUNGI MASYARAKAT DARI BAHAYA MIRAS

Keberadaan Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) dinilai sangat penting untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif yang timbul akibat mengonsumsi minuman beralkohol, utamanya bagi para generasi muda. Meski begitu, pembahasan RUU Minol kini menjadi sorotan berbagai kalangan.



Ketua Pansus RUU Minol Arwani Thomafi

Tak saja persoalan industri, beragam aspek perlu dipertimbangkan dalam RUU ini. Mulai persoalan ranah pembatasan peredaran hingga aturan pemidanaan. Apalagi, RUU Larangan Minol sudah mulai dibahas di tingkat Panitia Khusus (Pansus) yang melibatkan lintas komisi.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Minol Arwani Thomafi mengatakan, tidak sedikit tindak kejahatan seperti aksi pemerkosaan dan perampokan yang dilakukan seseorang akibat pengaruh negatif minuman beralkohol. Karena itu, keberadaan undang-undang larangan minol, menurut dia, sangat penting dan mendesak.

Bahkan, kata Arwani, beberapa daerah merasa sangat membutuhkan keberadaan UU Larangan Minol sebagai payung hukum untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif minol. “Selama ini hanya Perpres atau Permen yang dijadikan pijakan hukum untuk menindak dan menertibkan penyalahgunaan minol, tapi tidak efektif mencegah peredaran dan penyalahgunaan minol,” kata

Arwani dalam Forum Legislasi di Gedung DPR, baru-baru ini.

Selain untuk memberikan perlindungan terhadap generasi muda, keberadaan UU Larangan Minol juga sangat penting untuk memenuhi hak masyarakat atas lingkungan yang aman dan sehat.

Ke depan, imbuh politisi PPP itu memandang perlu segera dilakukan penguatan dalam konteks pengawasan yang disertai proses penegakan hukum yang jelas, sehingga kehadiran UU Larangan Minol ini efektif melindungi masyarakat dari pengaruh negatif minol. “Jadi, perlu ada penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang jelas sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga bekerja secara

efektif,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Arwani juga mengungkapkan masih banyak masukan dari berbagai *stakeholder* yang mesti didengar. Menurutnya, beragam masukan itulah yang akan dipertimbangkan untuk dielaborasi dalam RUU Larangan Minol.

Arwani, tak menampik perihal adanya pengecualian beberapa daerah yang masih diperbolehkan mengonsumsi minol. Hal itu disebabkan pertimbangan minol, semisal tuak yang masih dijadikan bagian dari adat daerah tertentu. Begitu pula pertimbangan pariwisata, dengan catatan hanya di tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan menjual dan mengonsumsi minol.

“Tidak perlu ada kekhawatiran. Kami akan meminta masukan dan kita ingin RUU ini tidak hanya menjadi tumpukan kertas saja. Tetapi bagaimana negara ini hadir memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) Fahira Idris, menyambut posi-

tif RUU Minol ini, karena dengan tegas akan memberikan perlindungan dari bahaya Miras khususnya bagi anak-anak. Mengingat dalam kajian GeNAM kerjasama dengan Pusat Kajian Kriminologi UI, di berbagai Lapas di Indonesia sebanyak 39 persen anak-anak melakukan kejahatan akibat pengaruh Miras. “Bahkan di Cipinang Jakarta sampai 70 persen akibat Miras,” tambahnya.

Dengan RUU Minol ini lanjut Fahira, maka RUU ini mempersempit ruang gerak produsen, distributor, dan konsumen Miras. “Anak-anak banyak terjerumus ke Miras selama ini karena Miras memang dekat dengan mereka. Di mana Miras dijual bebas dan sembarang tempat terma-

ANAK-ANAK BANYAK TERJERUMUS KE MIRAS SELAMA INI KARENA MIRAS MEMANG DEKAT DENGAN MEREKA. DI MANA MIRAS DIJUAL BEBAS DAN SEMBARANG TEMPAT TERMASUK SUPERMARKET. APALAGI DENGAN SANKSI PENJARA ANTARA 2 – 15 TAHUN, DAN DENDA RP 10 JUTA SAMPAI RP 1 MILIAR.



Ketua Pansus RUU Minol Arwani Thomafi dalam acara Forum Legislasi

suk supermarket. Apalagi dengan sanksi penjara antara 2 – 15 tahun, dan denda Rp 10 juta sampai Rp 1 miliar. “Jadi, RUU Minol ini makin menjauhkan Miras dari anak-anak, sama halnya aturan yang berlaku di luar negeri,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti soal pembatasan minol melalui RUU tersebut. Aspek kajian melalui RUU Larangan Minol mesti menjadi media pemerintah dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat. Menurutnya, ketika RUU tersebut sudah menjadi UU nantinya dapat mendorong simpul-simpul masyarakat peduli terhadap bahaya minol. “Pengawasan kita sudah sangat lemah,” ujarnya.

Fahira yang juga senator asal DKI

Jakarta itu berpandangan aspek fungsi pengawasan dalam RUU tersebut mesti diperkuat. Pasalnya peredaran minol tak lagi berada di mini market, namun juga di warung-warung di tengah masyarakat. Meski masih terdapat beragam kekurangan, setidaknya Fahira menilai RUU tersebut sudah dapat menjawab kepentingan pariwisata. Terlebih, beberapa persen dari cukai minol menurut draf RUU tersebut mengamanatkan diperuntukan sosialisasi bahaya minol.

Sementara itu, Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyorot dari aspek cukai. Ia berpandangan terhadap barang yang terkena cukai mestinya tidak dapat dijual bebas. Sebaliknya, miras hanya dijual bagi mereka kalangan tertentu.

Berbeda dengan Indonesia, mesti minol masuk barang yang terkena cukai, mereka masih dapat berpromosi dan beriklan. “Ini semua (aturan) ditabrak, ini kriminal juga,” katanya.

Ia berpandangan jika cukai dilekatkan terhadap barang ‘bermasalah’, sehingga negara mengingatkan masyarakat untuk tidak mengkonsumsinya. Meski minol merupakan barang legal, namun tidak berarti bagus buat kesehatan. Makanya, negara hadir untuk kemudian membuat regulasi dengan melakukan pengetatan peredaran minol.

“Tapi jangan sampai RUU ini disahkan kemudian hanya jadi macan kertas, sehingga tidak bisa mengeksekusi. Jadi jangan terlalu *happy* dengan RUU ini. Kalau saya sebagai muslim saya setuju dengan larangan itu, tapi apakah negara sudah siap untuk semua,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Pengurus *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* Anggara Suwahju RUU Larangan Minol mesti mempertimbangkan terkait dengan pemidanaan. Menurutnya dengan adanya aturan pemidanaan dalam RUU tersebut, setidaknya dapat bakal menambah *over* kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Tak hanya itu, dengan mudahnya memenjarakan orang, negara makin terbebani dengan anggaran. Ia menyarankan, Pansus dalam menyusun RUU terkait aturan pemidanaan mesti menghitung *cost benefit* bagi negara. Ia berpandangan biaya kesehatan bagi narapidana di Lapas amatlah kecil.

“Kalau mau melarang harus dihitung *cost benefit*-nya dalam proses penegakan hukum. Jangan sampai bikin UU tanpa memikirkan *cost benefit* nya,” ujarnya.

Lebih lanjut Anggara berpandangan ketika pemerintah dan DPR menginginkan kodifikasi aturan dalam RKUHP, semestinya aturan pemidanaan tidak lagi dibuat dalam RUU. Ia berharap antar lintas komisi dalam konteks pemidanaan mesti satu persepsi. “Jangan sampai RUU ini beda semangat, Komisi III semangatnya *lex specialis*, komisi lainnya beda,” pungkasnya. (NT) FOTO: AN-DRI/PARLE/IW



KAGUMI KERIS

Pimpinan DPR RI memberikan cinderamata sebuah keris kepada Former Minister of Economy, Trade, and Industry, and Chairman of General Council of Liberal Party of Japan, Mr. Toshihiro Nikai, dalam rangkaian kunjungan Delegasi Jepang ke DPR RI.

FOTO: DENUS, ANDRI





SILATURAHMI

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersilaturahmi dengan santri di Pesantren Yayasan Al Ashriyyah Nuruliman. Desa Waru Jaya, Kec. Parung, Kab. Bogor.

FOTO: ANDI MUHAMMAD





JEBOL

Tim Kunker Komisi X dipimpin Abdul Kharis Almasyhari masih menemukan berbagai kerusakan pada sekolah-sekolah di Manado antara lain atap yang jebol.

FOTO: RIZKA ARININDYA





MENGAJAR

Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjuna antusias berinteraksi dengan siswi SD Muhammadiyah 2, Limboto, Kab. Gorontalo.

FOTO: NAEFUROJI





NORMALISASI KALI CILIWUNG

Tim Komisi V DPR RI meninjau Proyek Pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur dipimpin Ketua Komisi Fary Djemi Francis.

FOTO: EKA HINDRA



PANSUS PELINDO II

Tim Pansus Hak Angket Pelindo II saat mengunjungi JCT dan Pelindo II di Tanjung Priok.

FOTO: JAKA NUGRAHA



MEDIKOPOMOLOGI BUAH SEBAGAI DIET DAN OBAT



Oleh: dr. Dito Anurogo

Selain lezat, buah ternyata multikhasiat. Salah satunya untuk diet.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah diet dimaknai sebagai aturan makanan khusus untuk kesehatan. Sehingga ada pula istilah “diet lengkap” yang berarti “ramuan makanan untuk ikan yg kadar gizinya memadai untuk kebutuhan suatu jenis” dan istilah “diet makrobiotik”, yang bermakna “usaha mencapai kondisi sehat melalui diet (dengan memerhatikan faktor tradisi, ekologi, iklim, usia, jenis kelamin, dan faktor individual) dan menghindari makanan yang mengandung bahan kimia tertentu. Penulis cenderung memaknai diet dalam arti luas, yakni semua bahan pangan (alami, buatan, olahan) yang sehat dan berkhasiat. Di artikel ini, penulis membatasi hanya pada cakupan medikopomologi.

Medikopomologi adalah istilah yang penulis ciptakan untuk menyebut diet yang bersumberkan buah-buahan yang berkhasiat medis, untuk pencegahan, penyembuhan, dan pengobatan. Medikopomologi berasal dari kata mediko (medis, kedokteran) dan pomologi (ilmu tentang buah-buahan). Jadi, medikopomologi adalah diet atau terapi (pengobatan) berbasis buah.

SEJARAH

Sejarah diet setua peradaban umat manusia. Karena diet terkait dengan makanan, maka tanpanya, boleh jadi “spesies” manusia takkan bertahan hidup.

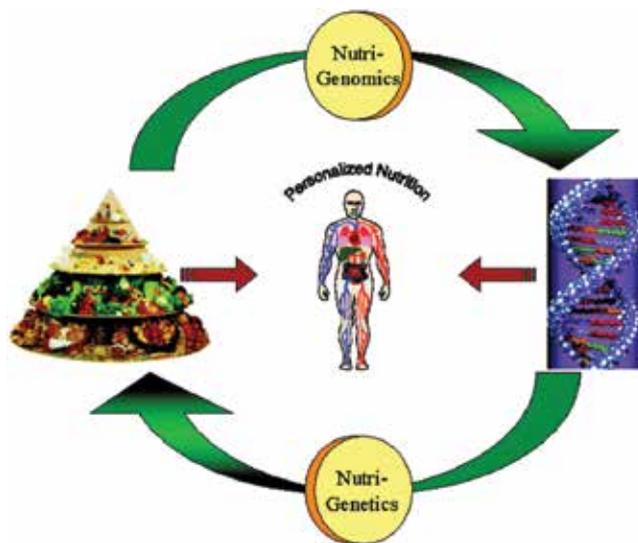
Bermula dari zaman manusia purba, era *Australopithecines*, dimana saat itu diet mereka benar-benar alami, berupa: akar, umbi, buah, serangga, cacing, ulat, dan beberapa hewan kecil. Manusia purba (*early humans*) cenderung berburu dan memancing, sedangkan manu-

(hasil) panen, buah kering (terutama apel), dan daging (setelah melalui proses pengasapan) hewan ternak yang dibantai di musim gugur.

Di zaman perunggu (*Bronze Age*), hasil kebun yang baru saja dipanen, sayur-mayur, dan anggur sudah mulai membudaya. Tradisi minum ini berkembang di era pertama dan kedua SM. Hal ini dibuktikan dari ditemukannya anggur dan minyak *amphorae* asli Mediterania Barat yang digali oleh Crockery dari situs arkeologis di Swiss.

Di abad pertengahan, seiring perkembangan budaya menulis, maka diet dan pengobatan berhasil didokumentasikan. Di Mesopotamia, penduduk Nippur, Sumeria kuno telah mengenal tablet di tahun 2100 SM. Farmakope Sumeria berisi sekitar 250 obat-obatan medis yang berasal dari tanaman. Racikan

obat yang berasal dari tanaman disebut dengan istilah *shammu*. Di Mesir, dikenal Thot, dewa kebijaksanaan dan juga juru tulis, mewariskan buku-buku kedokteran. Salah satu warisan terpenting dan monumental adalah *Ebers papyrus* (1600-1500 SM). Di Persia, penduduknya menggunakan beragam diet dan herbal dari perpaduan budaya Mesopotamia, Mesir, Yunani, dan India. Penduduk Persia percaya pada pohon keabadian *gaokerena*, yang konon disekitarnya ditumbuhi tanaman yang berkhasiat penyembuhan. Di India, dikenal *Ayurveda*,



sia di zaman batu (*old stone age*) mulai mengumpulkan sereal, madu, dan susu hewan. Upaya pertama untuk “membudidayakan” makanan dapat dilacak sejak era prasejarah (*protohistory*), sedangkan berbagai teknik fermentasi, pengasinan, penggunaan minyak, rempah, serta bumbu, pengasapan, dan pengobatan berkembang di masa sejarah (*history*).

Bukti-bukti arkeologis berhasil mengungkapkan pelbagai diet (kemiri, almond, buah beri, dan beragam buah-buahan musiman). Adonan kue di musim dingin 3600 SM terbuat dari tanaman

seni dan ilmu pengetahuan keabadian, yang diungkapkan oleh Brahma sekitar 1300 SM. Di China, terdapat *The Huangdi Neijing* yang dikenal sebagai kitab induk Kaisar Kuning (2697 – 2598 SM) atau *Yellow Emperor's Inner Canon*, yang menjadi dasar dari ilmu kedokteran selama lebih dari 2000 tahun. Di Yunani, diet dan seni penyembuhan masih bersifat mistik dan heroik. Dengan menyembah dewa-dewi atau menyebut nama pahlawan tertentu, seperti Paeon dan Hercules. Meskipun demikian, pengobatan berbasis tanaman juga dikenal, karena terdapat *The Odyssey*, kitab kedokteran yang konon ditulis oleh Homer di tahun 850 SM. Di abad keemasan Yunani, dikenal sekolah kedokteran (Cnide dan Cos di Rhodes) dan lahirnya Hippocrates (460-377 SM).

Di era modern sekarang ini, seiring perkembangan riset dan teknologi, maka berkembang pesat pula berbagai diet. Dari makanan fungsional (*functional foods*) hingga *nutrigenomics-nutrigenetics*. Makanan fungsional berhasil membuktikan bahwa makanan tertentu dapat digunakan untuk mencegah infeksi, meningkatkan dan memperbaiki fungsi homeostasis (keseimbangan) tubuh, dan mengurangi faktor-faktor risiko untuk penyakit-penyakit tertentu. Sedangkan *nutrigenomics-nutrigenetics* dapat didefinisikan sebagai studi aspek molekuler dari interaksi gen dan nutrisi di tingkat genomik (sekuens dan polimorfisme gen), transkriptomik (DNA), proteomik (deteksi protein), dan metabolomik (bioassays, kimiawi analitik). Regulasi diet ini multikompleks dan melibatkan multi-lintasdisipliner, salah satunya bioinformatika. Singkatnya, gen dapat memengaruhi metabolisme nutrisi dan sebaliknya, nutrisi dapat memengaruhi ekspresi gen.

DIET BUAH

Semua buah dapat dijadikan *role models* untuk diet, terutama berdasarkan kajian medikopomologi. Namun mengingat keterbatasan ruang, maka yang akan dibahas berikut ini hanyalah anggur, pepaya, dan pisang.

Buah anggur (*Vitis vinifera*) me-

miliki khasiat sebagai antidiabetes. GSPE (grape seed proanthocyanidin extract) dilaporkan efektif mengobati diabetik nefropati. GPSE (250 mg/kg berat badan/hari) juga memperbaiki kerusakan jantung yang berhubungan dengan glycation. Selain itu, ekstrak biji anggur juga memiliki efek antihiperglikemik sehingga bermanfaat mencegah diabetes melitus tipe 2. Quercetin pada anggur mampu mengubah ekspresi regulator siklus sel dan protein apoptosis sehingga berpotensi mencegah kanker prostat, menghambat mutasi protein p53 dan fase G2-M sehingga berpotensi mencegah kanker payudara, menghambat diferensiasi sel sehingga baik mencegah keganasan kolorektal (usus besar dan anus), juga berperan di fase G2/M sehingga berpotensi mengobati leukemia.

Buah pepaya (*Carica papaya*) matang berkhasiat mengobati sakit perut, kembung, wasir, luka di saluran kemih, penyakit kulit (kurap/kadas, *psoriasis*), diare menahun, disentri, mengurangi kegemukan, peluruh dahak, pelancar kencing, pereda nyeri perut. Buah pepaya mentah berkhasiat melancarkan buang air besar, membantu berkemih, buah kering mengurangi pembesaran limpa dan hati, menghilangkan racun akibat gigitan ular, punya aktivitas antiradang dan antibakteri. Kandungan asam amino *phenylalanine*, *tyrosine*, dan *glycine* pada buah pepaya yang mentah dilaporkan bermanfaat mengobati penderita anemia sel sabit. Bagi wanita hamil, berhati-hatilah, sebab buah mentah dapat menggugurkan kandungan. Ekstrak buah dan biji pepaya memiliki aktivitas *bacterici-*

dal (pembasmi bakteri). Biji dan daging buah pepaya juga bersifat penghambat pertumbuhan bakteri (*bacteriostatic*).

Buah pisang (*Musa spp*) mengandung senyawa bioaktif *carotenoids* (pro-vitamin A,



beta-cryptoxanthin, lycopene, beta-carotene, dsb) yang berkhasiat sebagai penguat sistem imun, reduksi risiko berkembangnya penyakit degeneratif, kardiovaskuler, kanker, katarak, degenerasi makuler, dsb. Sedangkan flavonoid bermanfaat untuk kesehatan manusia karena adanya efek antioksidan, efek antimutagenik, antitumor, menghambat sistem enzim (misalnya *prostaglandin synthase*, enzim kunci di dalam biosintesis eikosanoid), membantu mempertahankan proteoglikan dari jaringan konektif dan mencegah penyebaran (*metastasis*) bakteri atau tumor.

Diet buah berdasarkan perspektif medikopomologi adalah alternatif yang prospektif bagi masyarakat modern. Selain sehat, berkhasiat, juga membuat tubuh kita sehat. Dan, yang tak kalah penting, saat disantap pasti lezat. Hmm, yuk kita coba!

*Dito Anurogo, dokter digital, penulis 17 buku, peminat medikopomologi, sedang studi di S2 IKD Biomedis FK UGM. Email: ditoanurogo@gmail.com,

PROFIL

A portrait of a woman, Novita Wijayanti, wearing a yellow and black patterned hijab and a beige blazer. She is smiling and has her hands clasped in front of her. The background is a floral wallpaper.

NOVITA WIJAYANTI, WAKIL KETUA BURT DPR RI
**PANAH PERJUANGAN
SRIKANDI SENAYAN**

Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Itulah peribahasa yang tepat disandingkan pada Novita Wijayanti. Sang ayah, Fran Lukman beberapa periode dipercaya menjabat Ketua DPRD Cilacap, Jawa tengah. Sementara, sang kakek Tohid Lukman merupakan pendiri sekaligus Ketua sebuah Partai. Sedangkan nenek Novita, Sudinah merupakan aktivis tulen yang dikenal gigih memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Uniknya, meski pada akhirnya mengikuti jejak ayah dan sang kakek menjadi seorang politisi, namun siapa sangka jika awalnya, Novita tidak pernah berkeinginan menjadi seorang politisi. Ingin tahu kisahnya? Berikut penuturan Wakil Ketua BURT ini pada Rahayu Setiowati dan Naefuroji dari Parlemen-taria.

MASA KECIL

Masa kecil Novita Wijayanti sejatinya tak berbeda jauh dari kebanyakan anak di desanya. Sekolah, bermain sepeda, memetik buah di kebun, sesekali mengejar dan menangkap burung di sawah. Indah memang. Namun keindahan masa kanak-kanaknya itu sedikit terganggu. Bukan untuk membatasi diri pastinya.

Justru sebaliknya, sejak dini ia sudah diajarkan untuk menjaga sikap. Harus ramah, harus menjaga kesopanan, dan yang utama harus berbagi kepada teman-teman dan sesama. Padahal sebagaimana anak-anak lainnya, terkadang timbul rasa ingin memiliki sesuatu sendiri. Sebut saja ketika ia duduk dibangku sekolah dasar di SDN I Karang Pucung, ia harus berbagi bekal yang dibawakan sang bunda kepada teman-temannya.

“Kamu harus bagi dengan teman-teman kamu, jangan pelit. Kalau pelit malu sama teman-teman, apalagi kamu ini anak papah dan mama (tokoh-red),” kisah Novita menirukan ucapan sang bunda ketika itu.

Dulu waktu kecil, tambah Novita, tidak hanya berbagi makanan, tapi barang yang dimiliki juga harus boleh diminta. Seperti sepeda, burung piaraan, boneka. Kalau ada anak konstituen ayahnya

datang dan meminta, Novita diminta mengalah untuk memberikannya.

Tidak hanya itu, ketika teman-teman sebayanya asik bermain, Novita kecil justru kerap mengikuti tugas sang ayah hadir di sebuah rapat atau pertemuan dengan koleganya. Bahkan tidak jarang ia sampai terkantuk-kantuk hingga kemudian tertidur di mobil menunggu sang ayah rapat.

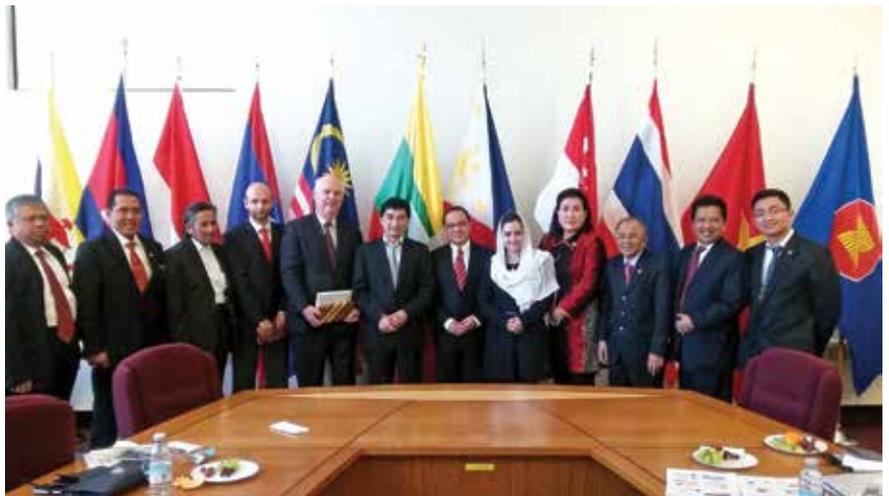
Memasuki usia remaja, tepatnya saat ia duduk di bangku Sekolah menengah pertama, tepatnya di SMPN I Karang Pucung beberapa “peraturan” keluargapun bertambah. Tidak hanya harus berbagi dengan teman serta menjaga kesopanan. Ia pun diminta untuk pandai-pandai memilih teman, teman yang baik akhlak

lu, ketika ia ikut mendampingi sang ayah disebut acara.

“Tidak saya duga-duga, ternyata tidak sedikit masyarakat di Dapil saya memilih saya karena mengingat masa kecil saya dahulu, yang selalu membagi makanan yang saya punya, dan selalu tersenyum saat ikut ayah saya ke sebuah acara. Ternyata hal yang kita anggap sepele itu, buat orang lain sangat besar maknanya. Dan itu menjadi pelajaran berharga untuk saya,” paparnya.

AKTIVIS ORGANISASI KEPEMUDAAN

Selepas sekolah menengah atas yakni SMU Yos Sudarso, Cilacap, Novita pun melanjutkan pendidikan di Universi-



Kunjungan BURT ke Canada

tentunya. Kedua orangtuanya tak ingin Novita terjerumus pergaulan yang salah, seperti pergaulan bebas dan narkoba. Dari sana tak berlebihan jika kemudian ia diwajibkan untuk ijin dan memberitahu kedua orangtuanya tatkala ingin pergi atau bermain bersama teman-temannya.

“Kalau dirasa saat itu kok begini banget ya, harus begini...harus begitu...tidak boleh ini...tidak boleh itu,” akunya.

Namun belakangan ia merasakan manfaatnya. Terutama ketika ia mulai aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan menjadi calon anggota legislatif dari sebuah partai politik pada tahun 2003 silam. Palsanya, tak sedikit masyarakat yang justru mengetahui dan mengingat dirinya ketika masih kanak-kanak dahu-

tas Soedirman (unsoed), khususnya di Fakultas Ekonomi. Ketika itu sempat timbul pergolakan batin dalam dirinya, apakah ingin memperdalam ilmu sosial dan politik agar dapat mengikuti jejak sang ayah, atau ingin mempelajari dunia bisnis yang juga sempat ditekuni sang ayah sebelumnya.

“Saat itu saya berfikir kalau ilmu politik agak sulit diterapkan dalam dunia bisnis. Namun sebaliknya, jika ilmu manajemen bisa dipakai sekalipun saya nantinya menekuni bidang politik. Misalnya bagaimana memenej atau mengatur sumber daya manusia. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memperdalam ilmu manajemen di Fakultas ekonomi,” kisah wanita kelahiran Cilacap, 24 November 1979 ini.

Menekuni bidang ekonomi, bukan berarti ia mengacuhkan dunia politik. Darah politisi agaknya begitu kental mengalir dalam dirinya. Hingga kemudian tak kuasa Novi hanya belajar dan menuntut ilmu akademik. Ia pun kemudian masuk ke berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, baik di dalam maupun luar kampus.

politiknya dengan menjabat Sekretaris Partai se-Kecamatan, kemudian merangkak naik menjadi sekretaris departemen wanita di Kabupaten.

“Di organisasi ini saya tidak hanya menambah teman-teman baru, jaringan baru, namun saya benar-benar belajar bagaimana mendiskusikan sebuah masalah, dan menyelesaikannya bersama-

bersama sang ayah.

“Saat itu saya ada di urutan nomer tiga, karena sistem ketika itu mengharuskan dua caleg laki-laki dan satu caleg perempuan,” kisahinya.

Dewi fortuna agaknya mulai mendekati Novita. Tak berbeda jauh dengan sang ayah, ia pun mendapati suara yang cukup banyak. Alhasil, dengan mudah ia pun melenggang ke DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ia terpilih menjadi anggota dewan termuda sekaligus meraih suara terbanyak.

Ia tak menampik anggapan apa yang ia raih ketika itu adalah berkat sang ayah. Meski demikian, ia yakin bahwa kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada dirinya itu adalah juga karena melihat niat dan tekadnya yang kuat untuk memperjuangkan nasib masyarakat Cilacap khususnya dan Jawa tengah pada umumnya.

Tahun 2004, Novita resmi menjadi anggota komisi C DPRD Provinsi Jawa tengah. Sementara sang ayah terpilih kembali menjadi Ketua DPRD Cilacap. Awalnya dikisahkan Novi, ada beban tersendiri baginya yang baru terpilih menjadi anggota legislatif dan langsung menduduki Komisi C yang merupakan komisi keuangan. Ia dituntut harus cerdas dalam menganalisa setiap permasalahan yang masuk di komisinya terkait tugas dan fungsi legislasi yang telah diamanatkan undang-undang kepadanya.

Untungnya Novi pun tergolong orang yang tidak pernah malu belajar dan bertanya atas segala hal. Termasuk mendiskusikannya kepada sang ayah. Untungnya sang ayah pun tak segan memberi masukan kepadanya. Saat itulah proses *learning by doing* berlangsung.

Tahun 2009 untuk kedua kalinya ia kembali bertarung dalam pemilihan legislatif. Sukses mengemban dan menjalankan “amanah” pada periode sebelumnya melancarkan langkahnya untuk kembali menjadi wakil rakyat. Ia kembali terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa tengah periode 2009-2014.

Di tengah perjalanan, muncul keinginan dari masyarakat Cilacap yang memintanya untuk menjadi Bupati di



Survey tanah longsor di Banyumas

Suatu hari beberapa orang yang tergabung dalam sebuah organisasi kemahasiswaan, GMNI (Gerakan Mahasiswa nasional Indonesia) mendatangi ayahnya yang ketika itu sudah menjabat sebagai Ketua DPRD Cilacap, Jawa Tengah untuk sekedar *sharing* dan meminta masukan untuk organisasi tersebut. Kesempatan itu tidak ia sia-siakan. Sepanjang pertemuan berlangsung, ia amati dengan seksama segala sesuatunya. Seketika itu juga ia tertarik dan kemudian memutuskan bergabung dalam organisasi tersebut.

Dari sana, ia masuk KNPI (Komite nasional pemuda Indonesia). Ia pun masuk dalam kepengurusan KNPI. Tahun 2002 ia berhasil menyandang gelar Sarjana Ekonomi dari Unsoed. Di sisi lain itu pertanda, waktu dan energinya pun dapat lebih banyak tercurah untuk berbagai aktivitas organisasi politiknya di luar kampus. Ia pun mengawali karir

sama. Semua itu sebenarnya sudah ada dalam teori-teori yang saya dapatkan di bangku kuliah. Namun itu hanya teori, dan di organisasi inilah saya merasakan sendiri prakteknya,” ungkap Novi, begitu ia biasa disapa.

ANGGOTA DEWAN TERMUDA

Satu tahun setelah itu muncullah “angin segar” bagi dirinya. Saat itu muncul undang-undang baru yang mengakomodir kesamaan hak perempuan dalam bidang politik lewat kuota tiga puluh persen perempuan. Dengan kata lain, setiap partai politik harus menyerahkan tiga puluh persen kader perempuannya untuk berlaga dalam pemilu legislatif. Hal itu pun tidak disia-siakan. Baginya itu merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik. Tahun 2004 merupakan pertama kalinya ia berlaga dalam ajang pemilu legislatif. Tidak tanggung-tanggung, ia pun bertarung



Sosialisasi 4 Pilar di SMA Negeri 3 Purwokerto

daerahnya tersebut. Dukungan pun bermunculan. Hingga akhirnya ia tak kuasa menolaknya. Bersama dengan para pendukungnya Novita “berjuang” untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat kampung halamannya itu.

Manusia bisa berencana, namun Tuhan lah yang menentukan. Meski saat itu sebenarnya dukungan untuknya dapat dikatakan mengungguli kandidat lainnya. Namun kenyataan berkata sebaliknya. Singkat cerita, ia urung memimpin daerah tersebut. Saat itu sempat muncul propaganda yang mencoba menghalangi dukungan masyarakat terhadapnya.

“Ada sebagian orang yang berpendapat akan terjadi konflik kepentingan jika saya menjadi Bupati, karena ayah saya ketika itu masih menjadi Ketua DPRD Cilacap,” jelas anak ketiga pasangan Fran Lukman dan Sumining ini.

Meski sempat merasa kecewa karena tidak dapat mewujudkan keinginan ma-

syarakat Cilacap yang menjadi pendukungnya, namun tidak tampak kesedihan dalam diri Novi. Itu jadi pelajaran tersendiri yang semakin mendewasakan kemampuan politiknya. Terutama bagaimana memahami karakter orang lain. Dengan kata lain, tidak semua yang dilihatnya putih itu memang putih. Karena terkadang apa yang dilihatnya putih itu sebenarnya tidaklah putih seutuhnya.

“Iya itu pelajaran berharga yang semakin mendewasakan saya. Hikmahnya banyak tapi mahal harganya,” seloroh Novita.

Novita pun mengaku tak pernah menyesali semua yang pernah dilaluinya. Baginya apa yang diraihinya saat ini merupakan kesempatan dari sang khalik yang tidak diberikan kepada semua orang. Tak ada kata lain selain mensyukurinya.

BANYAK JALAN MENUJU ROMA

Banyak jalan menuju Roma. Banyak

cara yang bisa dilakukannya untuk berbakti pada ibu pertiwi. Toh apa yang dilakukannya selama ini semata untuk masyarakat luas. Berbekal berbagai pengalamannya terdahulu ia pun kembali maju menjadi calon legislatif dalam Pemilu Tahun 2014 lalu.

Bedanya, dalam “perjuangannya” meraih kursi legislatif kali ini ia menggunakan “warna “bendera” yang berbeda dari sebelumnya. Dan ia pun yakin masyarakat Dapil (daerah pemilihan) Jawa Tengah VIII tempat dimana ia maju sebagai Caleg sangat paham komitmennya dalam memperjuangkan nasib rakyat dan negara.

“Saya telah berkomitmen berjuang untuk Rakyat Indonesia. Dimanapun saya berada dan di partai manapun, rakyat adalah yang paling utama di atas apapun. Karena bangsa ini berdaulat atas nama rakyat,” tegasnya.

Dugaannya pun tepat, kepercayaan rakyat Cilacap dan sekitarnya terhadap dirinya tak memudar sedikit pun. Hal itu



Saat mengikuti kunjungan BURT ke Parlemen Hungaria

terbukti dari perolehan suaranya dalam pemilihan umum 2014 lalu. Ia memperoleh suara yang cukup tinggi untuk Dapil Jawa Tengah VIII, yakni sebesar 83.327 suara. Hal itu tentu menjadi “modal” besar baginya untuk melenggang ke Senayan. Bertepatan dengan peringatan hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2014 lalu, Novita bersama dengan 559 calon anggota DPR RI lainnya resmi dilantik sebagai anggota DPR RI Masa Bakti 2014-2019.

Di Senayan, Novita duduk di Komisi V yang bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Selain itu ia juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang bertugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan

DPR, melakukan pengawasan terhadap Sekjen dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR, melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan alat kelengkapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR, DPD dan MPR yang ditugaskan oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah.

Meski demikian, ia mengaku jika konstituen atau rakyat yang berada di Dapilnya terkadang tidak tahu dan tidak mempedulikan di komisi berapa ia bertugas. Alhasil, tidak jarang masyarakat yang menyalurkan aspirasi di luar bidang komisi yang dinaunginya. Sebut saja ketika ia mendapati pengaduan masyarakat di Dapilnya terkait mahalnya biaya pendidikan nasional. Padahal masalah pendidikan sejatinya ada di komisi X (sepuluh). Begitupun saat para petani di Dapilnya mengalami kekeringan, dan mereka sangat membutuhkan traktor

untuk membajak sawahnya.

“Kalau saya bertemu langsung masyarakat, masyarakat kan tidak mau tahu di komisi apa saya, yang penting permasalahannya bisa tersampaikan, dan meminta bantuan saya untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut,” ungkapnya.

Novita mengakui tidak semua pengaduan dan aspirasi masyarakat di Dapilnya itu tidak semuanya bisa langsung ditanganinya. Namun ia mencoba untuk menampungnya, dan akan ia sampaikan kepada teman-teman di komisi yang menangani bidang tersebut saat rapat fraksi. Komisi tersebut lantas mendorong dan mendesak pemerintah sebagai pihak eksekutor untuk menindaklanjuti permintaan masyarakat tersebut.

Beberapa hasil “perjuangan” Novita yang sudah dirasakan masyarakat Dapilnya, seperti perbaikan infrastruktur jalan raya salah satunya di sekitar rel kereta di Sumpiuh, Purwokerto. Tidak

hanya itu, sadar akan pentingnya infrastruktur bagi kelancaran perekonomian sebuah daerah, ia pun tak segan mendorong dan mendesak Kementerian PU yang menjadi mitra kerjanya untuk melakukan perbaikan infrastruktur di sekitar pelabuhan di Cilacap.

Bahkan turunnya bantuan berupa traktor ke beberapa wilayah di Jawa tengah sedikit banyak juga merupakan “campur tangan” Novita yang ikut menyalurkan aspirasi masyarakat Dapilnya kepada komisi IV. Untungnya sejak kecil Novita sudah terbiasa turun ke sawah. Sehingga ketika penyerahan traktor berlangsung, ia tak merasa canggung turun ke sawah.

Sambil terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Dapilnya, Novita mengaku tidak memiliki target jabatan khusus untuk karir politiknya ke depan. Namun ia berusaha untuk tetap memegang teguh dan menjalankan “amanah” masyarakat.

“Kalau target yang dimaksud adalah jabatan atau posisi tertentu, tidak ada. Target saya ke depan sederhana, tetap dipercaya masyarakat dan memberi manfaat bagi masyarakat luas, bangsa dan negara,” pemegang gelar Magister Manajemen dari salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta ini.

KELUARGA SUMBER KEKUATAN

Wanita yang kini tengah mengambil gelar doktor jurusan kebijakan publik di Universitas Diponegoro ini mengakui bahwa apa yang telah diraihinya hingga saat ini sedikit banyak atas dukungan, dorongan dan bantuan dari keluarga, termasuk sang suami, Guritno Utomo. Ya, selama ini Guritno memberikan kebebasan pada sang istri untuk berkarir dan berkarya bagi bangsa dan negara.

“Keluarga adalah sumber kekuatan. Di tengah kondisi politik yang serba tak menentu dan terkadang memberikan tekanan tersendiri dalam diri saya, namun keluarga selalu ada buat saya. Keluarga yang selalu mendukung dan menemani saya di setiap kesempatan,” akunya.

Begitupun dengan anak semata wayangnya, Reyhan Wijaya Guritno yang



Kunjungan ke Yayasan Yatim Piatu di Kecamatan. Adipala

kini tengah duduk di bangku kelas 6 SD. Ia mencoba memberi pengertian pada sang buah hati akan aktivitas sang mama.

“Kebetulan keluarga saya itu tidak pernah protes, jadi apa yang saya dilakukan selalu di *support* gitu. Mungkin korban perasaan ya hehe...tapi tidak kok. Kalau tidak ada kegiatan, saya di rumah, waktu saya *full* untuk keluarga. Terserah anak saya mau ajak kemana saja,” ujarnya.

Novita mengakui kuantitas pertemuan dengan sang anak memang sangat penting, namun ia meyakini kualitas juga tidak kalah pentingnya. Meski hanya beberapa jam bertemu dengan sang buah hati di setiap harinya, namun dengan kualitas pertemuan yang maksimal, ia meyakini semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan sekalipun berjauhan, ia selalu menyempatkan diri untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan sang anak. Dengan begitu ia mengetahui segala permasalahan sang anak.

Untungnya, Novita pun memiliki kedua orangtua dan sang mertua yang siap mendidik dan merawat cucunya. Terlebih lagi profesi sang mertua sebagai dokter yang notabene sangat peduli terhadap pendidikan, termasuk pendidikan sang cucu. Tidak jarang sang mertua ikut menemani belajar Reyhan, buah hati Novita. Terbukti, sejak kelas satu sekolah dasar nilai rapor Reyhan selalu tertinggi.

Meski pendidikan akademik penting, namun sebagaimana didikan sang orangtua kepadanya dahulu, Novita juga mencoba mengajarkan pendidikan akhlak, sopan santun pada Reyhan. Bahkan ia juga menekankan pentingnya sosialisasi dan penanaman jiwa sosial yang tinggi pada sang buah hati, terlebih lagi Reyhan merupakan anak tunggal.

“Meski Reyhan anak tunggal, namun saya memiliki beberapa anak asuh. Itu salah satu cara saya untuk menumbuhkan jiwa sosial terhadap anak saya. Bahkan saya pernah mengatakan ke anak saya, percuma kamu pintar tapi tidak punya teman. Makanya kamu harus selalu berbagi, biar banyak teman, karena buat saya, satu musuh terlalu banyak dan seribu teman terlalu sedikit,” pungkasnya.

Meski dirinya kini mengikuti jejak sang ayah dan eyang sebagai seorang politisi, namun Novita tidak ingin mengarahkan bahkan mendikte anaknya untuk kelak mengikuti jejaknya. Ia lebih menyerahkan sepenuhnya kepada keinginan dan bakat sang anak. Sebagai orangtua, Novita dan suami berkomitmen hanya memberikan masukan terkait bidang-bidang profesi yang ada, sementara keputusan untuk menekuni bidang apa, keduanya sepakat untuk membebaskannya kepada sang anak selagi apa yang dipilihnya berada di jalur yang benar dan positif. (AYU) FOTO: NAEFU-ROJI, DOK. PRIBADI/PARLE/IW



Tim Kunker Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Muhidin M Said meninjau pantai Congot-lokasi bandara internasional Kulon Progo

YOGYA SEGERA MILIKI BANDARA INTERNASIONAL KULON PROGO

Sebanyak 20 anggota Komisi DPR dipimpin Wakil Ketua Muhidin M. Said pada reses masa persidangan I tahun 2015-2016 lalu mengunjungi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain memantau dan menggali aspirasi masalah yang berkaitan dengan bidang tugas, juga menyodorkan solusi jika ada kendala yang menghambat kelancaran proyek pembangunan.

Salah satu yang menonjol dalam kunker kali ini adalah pembangunan bandara internasional Kulon Progo. Komisi V DPR RI menilai pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo, Yogyakarta sudah sangat mendesak sehingga harus diberi prioritas. Peralnya kapasitas bandara Adisucipto sudah tidak memadai, semula dirancang untuk menampung 1,2 juta penumpang tapi tahun 2014 lalu sudah mencapai 6,2 juta.

Selain itu, Bandara Adisucipto tidak bisa dikembangkan lagi karena keterbatasan lahan dan kendala alam berupa gunung dan sungai. "Karena sudah merupakan prioritas maka Pemda dan masyarakat Kulon Progo harus mendukung. Ini perlu disosialisasikan sehingga mendapat dukungan segenap masyarakat dan bisa selesai tepat waktu," ungkap Muhidin M. Said.

Sebelumnya, Tim Komisi V menggelar pertemu-

an dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X dan jajaran serta Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo. Dilanjutkan dengan meninjau lokasi calon bandara pantai Congot dan pantai Glagah.

Menurut Gubernur DIY, Bandara Kulon Progo perlu lahan seluas 645,73 ha mencakup lima desa yakni Jangkaran, Glagah, Sindutan, Palihan dan Kebonejo. Lahan ini dihuni oleh 2.539 warga dan sebanyak 43 warga melakukan gugatan ke PTUN dikabulkan, namun di tingkat kasasi kalah dan memenangkan Pemda.

Selanjutnya dengan dasar keputusan tersebut tanggal 28 Oktober lalu PT Angkasa Pura II menyerahkan pengadaan tanah kepada BPN dan tanggal 10 November dimulai sosialisasi dan pengukuran tanah.

BPN menargetkan pada awal Juni sudah dilakukan pembayaran dan akhir 2016 ganti rugi selesai. Ditargetkan proyek pembangunan bandara yang menelan biaya Rp 8,1 Triliun ini selesai Tahun 2020 dan 2021 bisa beroperasi.

DIBAYAR SERENTAK

Masalah klasik yang selalu menyertai dalam proyek-proyek besar adalah persoalan ganti rugi

tanah warga. Karena itu kepada Komisi V DPR Sri Sultan HB X berpesan agar dalam pembayaran ganti rugi dilakukan serentak. Dia minta supaya ganti rugi lahan maupun bangunan untuk pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo Yogyakarta bisa dilakukan serentak. Artinya begitu *appraisal* (tim penilai) harga tanah telah memutuskan, ganti rugi segera dibayarkan.

“Saya mohon begitu harga tanah sudah diputus, masyarakat yang sudah setuju langsung dibayar. Jangan sampai ada kasus untuk menunda. Kalau ditunda, kepentingan lain akan masuk sehingga akan makin sulit,” katanya.

PT AP I menyatakan kesiapannya membangun bandara tersebut, begitu pembayaran ganti rugi selesai maka dilakukan *land clearing* dan dijadwalkan tahun 2020 selesai. “Pembangunan bandara baru selama 3 tahun sudah termasuk cepat, diharapkan tahun 2021 bisa beroperasi,” tambah pejabat AP I.

KOTA SATELIT BARU

“Jika Bandara Internasional Kulon Progo terwujud, maka kota kabupaten ini akan menjadi kota satelit baru. Nanti Kulon Progo akan jadi rebutan, dan dampak ikutannya luar biasa bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Muhidin.

Menurut politisi Golkar ini, bila bandara baru ini selesai maka dampak dari pembangunan bandara baru sangat besar. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga meningkatkan posisi dari agak tertinggal menjadi lebih sejahtera.

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi V Yoseph Umarhadi, keputusan Pemerintah yang akan segera membangun bandara Internasional Kulon Progo Yogyakarta harus membawa dampak positif bagi masyarakat. “Bagi saya masyarakat harus mendapatkan ganti untung, bukan ganti rugi. Artinya kehidupan mereka harus lebih baik,” ungkap Yoseph.

Masyarakat Kulon Progo juga harus dilibatkan. “Mereka jangan sampai hanya jadi penonton. Mereka juga harus dilibatkan dalam kemajuan Kulon Progo

dan bisa menikmati dampak positif dari pembangunan ekonomi di situ, apakah karyawan atau pegawai Angkasa Pura, pedagang, pengusaha travel maupun usaha lainnya,” terang dia.

Pembangunan Bandara Sipil Kulon Progo merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Pasalnya, kata Yoseph, Bandara Adisutjipto yang ada sekarang merupakan bandara milik TNI AU. Padahal semakin lama Yogya sebagai daerah tujuan wisata dalam negeri maupun mancanegara kian meningkat, diperkirakan 20 juta wisatawan akan datang ke Yogyakarta.

“Kita tidak ingin pendidikan penerbang di Yogya terganggu karena frekuensi penerbangan di Adisucipto makin besar. Pemandangan ke bandara Internasional Kulon Progo merupakan suatu kebutuhan supaya masyarakat dapat memahami dan mendukung. Memang terkait pemindahan itu akan ada korban sebab mau tidak mau harus memilih tempat kosong yang kini makin terbatas.

“Lokasi itu bagus, ideal. Bandara harus menghindari sesedikit mungkin tumpangtindih. Disitu rendah dan di pinggir pantai. Bukan soal penerbangannya tetapi ketersediaan lahan sebagian be-

Tak kalah penting menyiapkan mental, budaya, kesiapan secara sosial tradisional. Masyarakat Kulon Progo biasanya tradisional, tiba-tiba ada pembangunan modern. Maka kesiapan mental terhadap masuknya budaya modern harus dilakukan. Banyak investor yang berminat dari Jepang, Korea dari Cina untuk ikut *share*. Yang pasti akan *digrojo* investasi yang begitu besar.

Dengan dana sebesar 8,1 T akan bisa dimanfaatkan sebagiannya untuk bahan baku lokal dalam jumlah besar seperti batu, pasir besi, semen pasti akan menghidupkan ekonomi. Intinya komponen lokal harus diperhatikan. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, perlu pula dipertimbangkan, meski bandara modern tetapi jangan meninggalkan ciri-ciri khas budaya Yogya

“Masa depan Kulon Progo sudah bisa kita bayangkan akan menjadi daerah yang sangat modern dan berkembang. Perumahan, industri, pasar akan berkembang, juga sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Saya kira dampak positifnya akan banyak,” ujar politisi Dapil Jabar VIII (Cirebon).

Komisi V juga mengapresiasi Pemda Kulon Progo yang sudah menyiapkan lahan pengganti bagi masyarakat se-



Tambak-tambak baru bermunculan

sar milik masyarakat dan kita himbau dengan besar hati melepaskan lahannya dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kesesuaian harga. Jangan sampai pemindahan membuat kehidupan mereka makin sengsara. Harus dicari lokasi sesuai penghidupan sebelumnya, bila petani maka lahan penggantinya juga harus bisa bercocok tanam lagi,” paparnya.

luas 200 m2 hingga 500 m2 per KK. Relokasi, tanah dekat desanya dan sudah diidentifikasi dengan estimasi 200 m2/KK yang dipindah maksimal 500 m2. Lahan pertanian juga disiapkan, sebab pada tahap sosialisasi sudah banyak komunikasi dengan masyarakat bahwa mereka ingin pindah tidak terlalu jauh dari kampung halaman sebelumnya. (MP)

FOTO: MASTUR PRANTONO/PARLE/IW

DPR INGATKAN KADES HATI-HATI GUNAKAN DANA DESA



Tim Kunker Komisi II DPR di Kantor Camat Sunggal, Deli Serdang, Sumut

Dalam masa Reses Persidangan I tahun sidang 2015-2016, Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Utara. Anggota Komisi II, Sa'aduddin mengingatkan kepada para kepala desa di Sumatera Utara agar berhati-hati menggunakan dana desa.

"Hati-hati menggunakan dana desa, jangan sampai terjadi kekeliruan sebab payung hukum belum ada, belum jelas," kata Sa'aduddin kepada para kepala desa se Kab Deli Serdang yang hadir dalam pertemuan Komisi II DPR RI di kantor camat Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis.

"Jangan sampai salah guna, para kepala desa harus paham dan betul-betul cermat. Kalau tidak bisa berakibat hukum," imbuah politisi PKS itu.

Patut diketahui, Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan yang mengatur Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hingga per 21 Oktober dana desa sudah disalurkan Rp 16,61 triliun atau 80 persen dari pagu Rp 20,8 triliun.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Fandi Utomo mempertanyakan kesiapan kepala desa untuk pelaksanaan program dana desa.

"Pencairan dana desa ada tiga tahap dan terakhir tanggal 16 Desember. Apakah para kepala desa siap dengan program-program terkait penggunaan dana desa?" tanya Fandi.

Sedangkan Agung Widyantoro, anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar menegaskan, dana desa diperuntukkan hanya untuk infrastruktur dan pertanian.

"Sesuai SKB 3 menteri, dana desa dipakai untuk Infrastruktur jalan dan pertanian. Diluar itu, tidak boleh," kata mantan bupati Brebes, Jawa Tengah itu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy mengatakan, dana desa bisa jadi alat untuk mengancam para kepala desa oleh bupati, apalagi jelang pilkada.

"Pencairan dana desa bisa saja dipakai sebagai alat untuk mengancam para

kepala desa agar memilih calon tertentu pada pilkada. Jadi Kepala desa diminta untuk melaporkan bila ada hal-hal seperti itu," kata Lukman.

Sedang Camat Kecamatan Sunggal, Kab Deli Serdang, Hendra Wijaya menyatakan, hingga kini, belum ada perda ataupun aturan dalam penggunaan dana desa.

"Dulu pak Menteri (Menteri Desa, Marwan Ja'far) bilang, cukup dengan selebar kertas, selesai urusan dana desa. Tapi kita kan takut juga karena aturannya belum ada seperti perda. Apalagi dana desa itu bisa digunakan bila APBD sudah turun," kata Hendra.

PILKADA SERENTAK

Pada Kunker tersebut, Komisi II meninjau kesiapan pemerintah daerah dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilangsungkan tanggal 9 Desember 2015.

Sebelum melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah provinsi Sumut, rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman melakukan pertemuan di kantor Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Rombongan disambut oleh bupati Deli Serdang yang diwakili oleh Asisten I Bidang Administrasi Umum, Syafrullah dan Camat, Hendra Wijaya.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman menyampaikan, kedatangan Komisi II DPR RI adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi *budgeting*.

"Kami akan minta penjelasan bagaimana soal pelayanan publik, apakah sudah ditingkatkan kapasitas aparatur desa dan aparatur kecamatan, masih ada tidak yang masih honorer dan bagaimana pelayanan soal sertifikat tanah," kata Rambe dalam pertemuan di Kantor camat Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu.

"Soal KTP tolong diceritakan, sebab sulit sekali orang mendapat KTP," imbuah Rambe. Ia juga mengingatkan kepada aparatur kecamatan untuk tidak men-

jadi calo terkait pengangkatan tenaga honorer.

“DPR dan Pemerintah sudah memutuskan untuk pengangkatan tenaga honorer hingga tahun 2018, dan anggarannya akan dimasukkan dalam APBN Perubahan 2016. Jangan ada “agen” berjalan, Komisi II akan awasi,” kata Rambe.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada pejabat di kabupaten Deli Serdang dan aparaturnya kecamatan Sunggal untuk tidak eksodus warganya karena akan ikut pilkada.

“Memang di kabupaten Deli Serdang tidak akan menggelar pilkada serentak tanggal 9 Desember. Tapi jangan ada eksodus ke kabupaten lain, misalnya ke Kotamadya Binjai, ke Kab Deli Serdang Bedagai. Kita akan perkarakan,” kata Rambe.

Camat Kecamatan Sunggal, Hendra Wijaya mengakui, untuk masalah elec-

Kementerian dalam negeri dan Sekretariat Kabinet.

Kesimpulan dalam acara ini menekankan, bahwa soal pelayanan publik pelaksanaan Program Larasita, Sertifikasi Prona, Redistribusi lahan supaya dilaksanakan dengan baik dan harus optimal.

Terhadap kasus Sari Rejo dan eks Hak Huna Usaha (HGU) PTPN II, Komisi II DPR RI setuju untuk terlebih dahulu diselesaikan di tingkat Kementerian, oleh sebab itu Komisi II DPR RI merekomendasikan Sekretariat Kabinet untuk melakukan koordinasi penyelesaian kasus Sari Rejo bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Panglima TNI Menteri Badan Usaha Milik Negara, serta Menteri Keuangan dengan memperhatikan keputusan

Sedangkan, dalam rangka membantu masyarakat/karyawan dan ekonomi kawasan, seluruh proses produksi dan tata niaga harus dibuka kembali sambil menunggu penyelesaian secara komprehensif.

Sebelumnya, Komisi II mempertanyakan lambannya BPN eksekusi tanah di Sari Rejo, Medan. Anggota Komisi II DPR RI, Rufinus Hotma Hutahuruk menilai lambannya eksekusi putusan Mahkamah Agung tahun 1995 tentang eksekusi tanah di Sari Rejo, Polonia, Medan Sumatera Utara oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

“Mengapa soal tanah di Sari Rejo belum juga dieksekusi sesuai dengan putusan MA sehingga rakyat mendapatkan haknya dan bisa digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata Rufinus

Ia juga mempertanyakan periode kasus-kasus tanah di Sumatera Utara, seharusnya BPN bisa melakukan eksekusi karena sudah putusan pengadilan.”Saya tidak dengar penjelasan Kanwil BPN Sumut soal periode kasus-kasus tanah yang terjadi. Sebab ada semacam *carry over* kasus masa lalu. Di Sumatera Utara banyak sengketa. Padahal ada sekitar 100 sengketa tanah di Sumut” sebut politisi Hanura asal daerah pemilihan Sumatera Utara II itu.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Budiman Sudjatmiko mengakui, untuk penyelesaian kasus sengketa tanah dengan TNI sangat sulit. “Kasus yang berkaitan dengan angkatan sangat susah. Padahal kasusnya sama, *case* nya sama, cuma wilayahnya beda,” kata politisi PDIP itu.

Selain kasus Sari Rejo, Komisi II DPR RI juga mempertanyakan data-data lahan yang mau ditata ulang di Padang Lawas. “Datanya beda-beda soal Padang Lawas. Penyelesaian Padang Lawas harus dilakukan dengan menata ulang kembali. Tapi berapa yang mau ditata ulang, apakah 178 ribu hektar, apakah 47 ribu hektar. Ini harus jelas sebab bila tak ada data jelas, maka akan sulit untuk kita membantu masyarakat di Padang Lawas,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy. (AS) FOTO: AGUNG/PARLE/IW



Para anggota Komisi II DPR RI

tronic KTP, memang mengalami masalah karena provider, teknologi. Di sini, providernya Indosat. Solusinya kami minta masyarakat untuk mengurus e-KTP ke kantor bupati,” kata Hendra.

KANWIL BPN SUMUT

Dalam Kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara tersebut, KOMISI II mengadakan Rapat Dengar pendapat dengan Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional (KANWILBPN) Sumut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumut, Pemda Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Dihadiri juga perwakilan masyarakat Sari Rejo, dan Perwakilan Koperasi/perusahaan, serta perwakilan

incraht oleh Mahkamah Agung (MA).

Selain itu, Komisi II DPR RI meminta Menteri ATR/BPN, Gubernur Sumatera Utara, dan Kementerian Dalam Negeri, untuk melengkapi kembali data-data lahan di Padang Lawas dan Padang Lawas Utara sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan kasus-kasus lahan tersebut.

Komisi II DPR RI juga meminta kepada Pemerintah untuk mentaati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) dari MA terhadap kasus-kasus tersebut. Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/BPN untuk segera merevisi tata ruang di Sumatera Utara, khususnya kawasan register 40.



Tim Komisi III DPR RI foto bersama dengan Kapolda Prov. Sulsel dan BNNP Sulsel

Dari Pengawasan WNA Hingga Gayus-gayus Makassar

Keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu diawasi. Bukan tidak mungkin, WNA ini memiliki modus untuk mencari suaka politik di Indonesia, namun sebenarnya melakukan transaksi narkoba di Tanah Air.

“Apakah ada orang asing yang ditahan karena kasus narkoba di Sulsel,” tanya Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, selaku Ketua Tim Kunker dalam pertemuan dengan Kakanwil Kemenkum HAM dan jajarannya, di Makassar, belum lama ini.

Politikus Fraksi Partai Demokrat ini menyatakan, pihaknya ingin mendapatkan informasi mengenai hal ini. Karena penanganan orang asing ini dikaitkan dengan kasus-kasus narkoba.

“Kita ingin mendapatkan penjelasan dan data kebangsaan, ini ada hubungannya dengan penanganan orang asing, seperti kebangsaan Afghanistan, Somalia, Sudan, Afrika, Nigeria dan se-

bagainya,” pinta politikus asal dapil NTT itu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Keimigrasian Sulawesi Selatan, Ramli HS mengatakan ada satu orang asing berkebangsaan Thailand tertangkap terkait dengan kasus narkoba. “Sudah kita tahan di Rutan Maros,” jelasnya.

Ramli juga menjelaskan bahwa jumlah warganegara asing pencari suaka di Sulsel ini berjumlah 2.120 orang bahkan ini yang paling banyak di seluruh Indonesia. Sebagian besar dari warganegara asing pencari suaka ini adalah berkebangsaan Afghanistan.

Menyangkut jumlah warganegara asing yang bekerja atau berada di wilayah Sulsel, Ramli menjelaskan, di Sulsel, warganegara asing berjumlah 4.284 orang, dimana diantaranya pemegang izin tinggal kunjungan 1.117 orang, izin tinggal terbatas 951 orang, izin tinggal tetap 94 orang, warganegara binaan masyarakat karena kasus narkotik dan kasus keimigrasian 2 orang, dan se-

bagai pencari suaka 2.120 orang.

Dari 951 orang pemegang izin tinggal terbatas ini, tambah Ramli, yang murni melakukan kegiatan bekerja di wilayah Sulsel ini berjumlah 415 orang. 234 orang berstatus mengikuti suami atau kepala rumah tangganya, 264 orang sebagai mahasiswa atau pelajar, 29 orang status sebagai peneliti, 7 orang wisatawan lanjut usia, dan 2 orang eks warganegara Indonesia yang ingin mengakhiri masa hidupnya di Indonesia.

“Oleh karena itu mereka ini diberikan fasilitas izin tinggal terbatas. Jadi pada prinsipnya sebagaimana data yang ada sama kami keberadaan mereka-mereka ini memang melakukan kegiatan secara legal dan mereka juga dibekali perizinan yang legal,” jelas Ramli.

PENGAMANAN PILKADA SERENTAK

Komisi III DPR mempertanyakan persiapan aparat hukum di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam mengha-

dapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

Ketua Tim Kunker Komisi III DPR, Benny K Harman menegaskan, hal ini sebagai masukan untuk DPR dalam menjalankan fungsinya.

“Bagaimana persiapan dan kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka Pilkada Serentak 2015 di Provinsi Sulsel,” tanya Benny, saat pertemuan dengan Kapolda Sulsel Irjen Pol Pudji Hartanto dan Kepala BNNP Sulsel Brigjen Pol Agus B Manalu beserta para pejabat utama Polda Sulsel dan BNNP Sulsel, di Aula Anindhita Mapolda Sulsel.

Selain masalah Pilkada, Tim Kunker juga menyoroti potensi kejahatan di Sulsel. Anggota Komisi III DPR Ichsan Soelistio mengatakan bahwa Provinsi Sulsel ini merupakan wilayah maritim dengan potensi pariwisata dan jalur-jalur perdagangan, yang di satu sisi berpotensi pula menjadi tempat kejahatan terorganisasi dan kejahatan transnasional seperti *human trafficking*, *illegal logging*, *illegal fishing*, atau peredaran narkoba.

“Kenapa Kapal Speed Patroli Laut hanya ada satu unit. Kalau hanya satu bagaimana mengatasi pencegahan kejahatan di laut seperti penyelundupan terutama barang-barang ilegal, belum lagi pupuk-pupuk dari Malaysia yang masuk melalui Pare-pare dan Sidrap. Jadi tolong Kapolda mengajukan anggaran untuk pembelian kapal tersebut, dan Komisi III DPR akan memperjuangkan dalam hal ini,” kata Ichsan seraya menambahkan bahwa kapal tersebut untuk pencegahan kejahatan di laut.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Pudji Hartanto menyatakan, pihaknya siap dalam menghadapi Pilkada Serentak mendatang di 11 Kabupaten di Sulsel dan 4 Kabupaten di Sulbar. Begitu pula dengan kesiapan *back up* pasukan dari Brigade Mobile (Brimob), Pengendalian Massa (Dalmas), Staff dan Polres dalam mengamankan Pilkada Serentak 2015.

“Kami akan turunkan anggota 2/3 dari jumlah kekuatan kita. Kira-kira 13 ribu personil. Kita punya kekuatan sekitar 20 ribu lebih anggota,” ujarnya seraya menambahkan 2/3 personil Polri

tersebut adalah petugas di 11 Polres penyelenggara Pilkada di Sulsel, ditambah personil dari Bantuan Kendali Operasi (BKO) Polda Sulsel dan Brimob yang siap diturunkan kalau sewaktu-waktu ada permintaan penambahan kekuatan.

Dalam pertemuan dengan jajaran Peradilan Sulsel, anggota Komisi III DPR Ahmad Zacky Siradj (F-PG) menyampaikan keluhan atas langkanya hakim di Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menilai, hal ini dapat mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal keadilan. Sehingga, hal ini perlu menjadi perhatian juga bagi Komisi III DPR, selaku Komisi Hukum.

“Bagaimana kita ingin melayani keadilan kepada rakyat apabila hakim saja langka, hakim saja tidak ada. Bagaimana rakyat bisa dilindungi oleh kita tentang keadilan. Saya kira ini persoalan yang serius bagi kita karena keadilan adalah hak dasar bagi warga negara, kewajiban negara dalam melindungi rakyat,” tegas Zacky.

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Andi Suryadarma Belo menyatakan bahwa masih perlu penambahan formasi tenaga hakim, pejabat struktural dan staf pegawai yang pada umumnya di semua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar. Pasalnya, semua pengadilan negeri mengalami kekurangan tenaga hakim dan pegawai.

GAYUS-GAYUS MAKASSAR

Dalam rangkaian kunker ini, Benny K. Harman menyoroti persoalan “Gayus-Gayus” Makassar. Penyebutan “Gayus” Makassar ini dilontarkan lantaran Muhammad Jusmin Dawi Bin Semi, terpidana kasus korupsi kredit fiktif kepemilikan mobil pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah diduga beraksi seperti terpidana kasus pajak Gayus Tambunan.

Berdasarkan informasi, Jusmin dapat menjalani aktivitas di luar tahanan. Bahkan, sejak bulan Oktober lalu, Jusmin didapatkan dapat keluar masuk Lapas Klas I Makassar.

“Kita tanyakan kepada Kakanwil Kemenkum HAM Sulsel, apakah Kakanwil Kemenkum HAM Sulsel akan mengam-

bil langkah tegas terhadap aparat yang selama ini memfasilitasi penghuni Lapas itu untuk keluar-masuk Lapas,” kata Benny usai meninjau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Makassar, Jalan Sultan Alauddin.



Tim Komisi III DPR RI meninjau Lapas Klas I Makassar

Komisi III DPR yang membidangi hukum dan peradilan ini meminta pertanggungjawaban dari Lapas. Bahkan, jika memang ada indikasi Kepala Lapas dan Penjaga Lapas, memberikan fasilitas keluar masuk Lapas kepada napi, maka lebih baik diberhentikan dari pekerjaannya.

“Ini harus menjadi perhatian Menteri Hukum dan HAM, karena selama ini Menkumham tidak respon terhadap masalah ini,” tegas politikus Fraksi Partai Demokrat itu..

Kakanwil Kemenkum HAM Sulsel, Rachmat Prio Sutardjo, menegaskan, dalam kurun waktu kurang lebih 10 hari ke depan, pihaknya akan langsung ambil langkah agar tidak ada lagi nara pidana yang keluar-masuk secara ilegal.

“Narapidana keluar adalah dalam rangka program pembinaan, dan itu sudah saya lakukan. Kalau ada narapidana melakukan program pembinaan, dia mengajukan permohonan itu dan kita sidangkan, kita setuju atau tidak, kalau kita menyetujuinya maka Kalapaslah yang mengeluarkan SK pengeluarannya,” jelas Rachmat.

Rachmat menambahkan, pihaknya juga sudah membentuk tim pemeriksa untuk menyelidiki kelalaian pihak Lapas, dan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Lapas Klas I Makassar dan jajarannya. (IW) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/IW



Tim Kunker Komisi VII DPR meninjau lokasi pembangunan PLTB Samas Bantul

KOMISI VII DUKUNG PEMBANGUNAN PLTB SAMAS BANTUL

Dalam Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015 – 2016 Komisi VII DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 9-12 November 2015. Ketua rombongan Kardaya Warnika sampaikan bahwa kunjungan ke DIY dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan-perkembangan yang terkait dengan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi di DIY.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Rani Sjamsinarsi kepada Komisi VII sampaikan bahwa terdapat 238 Dusun di Yogyakarta yang belum berjangkaran listrik resmi.

Menanggapi data yang disampaikan Pemda DIY, Anggota Komisi VII Dapil DIY Agus Sulistyono mengaku kaget dengan adanya data Pemda DIY yang

menyebutkan masih adanya 4,6 persen atau 238 dusun dari 5.122 dusun di DIY belum berjangkaran listrik resmi menjadi suatu ironi bagi DIY.

Komisi VII mendesak agar pemda DIY dan kabupaten proaktif mengupayakan agar 2 tahun ke depan seluruh warga mendapatkan sambungan jaringan listrik. Misalnya melalui program listrik desa untuk rumah tangga keluarga tidak mampu,” ungkap Agus.

PLTB I DI INDONESIA.

Komisi VII DPR meninjau langsung proyek pembangunan Pembangkit Tenaga Angin pertama di Indonesia yang berada di Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada Selasa (10/11). Pembangkit listrik tenaga angin di Pantai Samas yang kerap disebut sebagai proyek *Wind Farm* itu sendiri merupakan PLT Bayu yang pertama kali dibangun

di Indonesia. Direncanakan oleh PLN, menyusul berikutnya dikembangkan pula di Nusa Tenggara Timur.

Diperkirakan, Proyek *Wind Farm* dapat membangkitkan listrik dengan kapasitas total 50 MW yang akan dicapai dengan membangun antara 16 – 33 unit turbin angin dengan kapasitas masing-masing antara 1,5 – 3 MW. Dimana setiap turbin diperkirakan dapat menghasilkan daya untuk memenuhi kebutuhan listrik tahunan 1500 – 3000 rumah di Indonesia atau secara total proyek ini dapat memenuhi kebutuhan tahunan ± 160 ribu konsumen listrik Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bersama penggunaan energi baru dan terbarukan sebagai pembangkit listrik merupakan salah satu strategi dalam upaya memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat Indonesia. Selain berfungsi sebagai pembangkit listrik, diharapkan PLT Bayu Samas ini juga dapat lebih dikembangkan sebagai destinasi wisata bagi Provinsi DIY.

Proyek PLTB dikembangkan oleh *Independent Power Producer (IPP) Internasional UPC Renewables Indonesia* bekerjasama dengan perusahaan nasional PT Binaték Energi Terbarukan. PLTB Samas Bantul berkapasitas 50 MW akan menjadi PLTB skala besar pertama di Pulau Jawa dan pertama di Indonesia.

“Kita ingin melihat bukti bukan janji, kita ingin membuktikan sudah dibikin atau belum, apakah janjinya sesuai buktinya, kita berharap proyek ini akan bisa direalisasikan dengan baik dan cepat, sehingga baik bagi Yogya, Indonesia, dan semuanya,” ungkapnya.

Komisi VII memandang bahwa pengembangan energi terbarukan merupakan suatu impian karena akan menyelamatkan Indonesia dari ketergantungan energi bahan bakar fosil yang semakin langka selain itu akan menjadi pembangkit listrik yang aman, ramah lingkungan dan tanpa menimbulkan polusi udara sehingga bisa mengurangi

dampak pemanasan global.

“Tentu, proyek PLTB Samas Bantul jika berhasil akan menjadi daerah percontohan di Indonesia untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga angin ini. Banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi dan angin yang stabil untuk dikembangkan PLTB,” terangnya.

Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Samas Bantul memberikan harapan baru untuk mengatasi masalah kurangnya ketersediaan listrik di Yogyakarta dan Indonesia umumnya. PLTB merupakan alternatif energi terbarukan yang aman, ramah lingkungan dan tanpa emisi. Selain itu PLTB akan berkontribusi pada target energi hijau Indonesia sebesar 23 persen pada tahun 2025.

“Saya sangat mendukung proyek PLTB, karena ini nantinya yang bisa menyelamatkan Indonesia dari kekurangan

dan matahari,” terang Kardaya.

Menurut Kardaya, dengan adanya PLTB ini akan berdampak pada harga listrik yang murah nantinya, ketika sumber energi dari fosil susah didapat, atau dibanding listrik yang dihasilkan dari energi konvensional.

“Ke depan pasti harganya murah, karena mahal hanya pada pembangunan di awal, karena tidak ada biaya bahan bakar, dan angin ini gratis, sehingga akan lebih murah,” jelasnya

Dalam peninjauan ke lokasi pembangunan proyek PLTB, Kardaya mengatakan, pihaknya bisa memastikan proyek pengembangan PLTB yang bisa membangkitkan energi hingga 50 megawatt itu tidak hanya rencana. Pasalnya investor akan mulai pembangunan fisik pada 2016 dan target mulai operasi 2017.

Sementara itu, anggota Komisi VII Kurtubi berharap pembangunan proyek



Tim Kunker Komisi VII DPR bertemu dengan jajaran Pemda dan pengembang PLTB Bantul

energi pada masa depan,” ungkap Kardaya.

“PLTB bisa menyelamatkan Indonesia dari kekurangan energi, karena sumber energi dari pembangkit ini adalah bayu atau angin dan matahari yang bisa didapat dengan mudah serta tidak akan habis,” ungkapnya

“Coba kalau kita mengandalkan energi fosil lainnya seperti minyak dan batu bara yang jelas selain merusak lingkungan juga akan habis, makanya ini potensi kita dengan memanfaatkan tenaga angin

PLTB bisa segera direalisasikan dan segera beroperasi dan PLTB bisa dikembangkan PLTB di daerah lain terutama di Daerah Pemilihanya yaitu Nusa Tenggara Barat.

“Kita berharap PLTB Samas Bantul segera diselesaikan dan setelah itu PLTB dikembangkan di Dapil saya NTB. Selama ini di NTB sangat kekurangan listrik dimana hampir setiap hari terjadi pemadaman listrik bergilir,” ungkap Kurtubi.

(SKR) FOTO: SINGGIH/PARLE/IW



Tim Kunker Komisi X DPR RI saat meninjau PPLP di Provinsi Gorontalo

Minat Sekolah Olahraga Tinggi, Minim Fasilitas

Senin, 2 November 2015, setelah melalui 5 jam penerbangan melalui Bandara Soetta dan transit 35 menit di Makassar, cuaca cerah Bandara Djalaluddin menyambut kedatangan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Gorontalo.

Setelah beristirahat sejenak di ruang VVIP Bandara, Tim Kunker Komisi X DPR RI dipimpin H.M. Ridwan Hisyam langsung meninjau Pusat Pendidikan dan Latihan olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Gorontalo, Mud Mada mengungkapkan minimnya fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di PPLP.

Dari 37 siswa yang terdaftar hanya tersedia 16 kamar, hal ini tentu dirasa masih kurang memadai. Pihaknya sangat berharap perhatian dari pemerintah pusat (Kemenpora) melalui Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI. “Dengan hadirnya Anggota Komisi X DPR RI kami juga memohon dipertimbangkan untuk

dibangun Sekolah Khusus Olahraga,” ujarnya penuh harap.

Menjawab harapan Kadispora, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI H.M. Ridwan Hisyam berkomitmen akan memperjuangkan segala kebutuhan Pusat Pendidikan dan Latihan olahraga Pelajar (PPLP) untuk pengembangan dan pembinaan olahraga di Provinsi Gorontalo.

“Kami sudah mendengar dan melihat langsung semua kebutuhan dan harapan pengelola PPLP. Dengan hanya ada 16 kamar sementara jumlah atlet mencapai 37 siswa tentu belum mencukupi, serta masih minimnya fasilitas, sarana dan prasarana pendukung lainnya,” ungkap Ridwan.

Politisi Golkar ini menambahkan bahwa pembangunan PPLP tersebut melalui bantuan APBN dimana pihak Pemda yang menyiapkan lahannya.

“Semoga tahun depan bisa kami alokasikan anggarannya dan nanti kita juga akan bahas pada rapat kerja dengan Kemenpora soal usulan pembangunan

Sekolah Khusus Olahraga (SKO), Insya Allah kita berusaha memenuhi makanya segera diusulkan permohonannya secara resmi,” jelas Politisi Dapil Malang Jawa Timur ini.

Sementara itu, Mud Mada juga mengungkapkan bahwa di Gorontalo banyak siswa-siswa yang berbakat di bidang olahraga bahkan mencapai prestasi hingga tingkat nasional.

“Dibangunnya SKO akan memudahkan kami dalam mencari dan menempa bibit-bibit unggul atlet nasional dari Gorontalo,” demikian Mud Mada.

MUSEUM Pendaratan SOEKARNO MEMPRIHATINKAN

Komisi X DPR menyoroti kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi Museum Pendaratan Pesawat Amphibi Catalina yang dinaiki Presiden Soekarno tahun 1963 silam.

Museum yang berada di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo itu, menurut Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah perlu mendapat perhatian serius. “Kami sudah datangi museumnya, saya merasa miris sekali melihatnya, karena masalahnya itu sudah ditulis museum,” kata Anang saat Kunjungan Kerja di Gorontalo bersama Tim Komisi X DPR RI yang dipimpin M. Ridwan Hisyam.

Dihadapan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dan jajarannya, Politisi PAN ini menjelaskan sesuai Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2015, museum adalah tempat untuk memelihara, menyumbangkan, memanfaatkan dan menginformasikan sejarah kepada masyarakat dengan tujuan untuk penelitian, pendidikan dan rekreasi.

“Ini sangat penting sekali. Kalau museumnya sudah tidak diperhatikan, saya jadi ragu untuk melihat yang lainnya,” ujarnya di Rumah Dinas Wagub, semalam.

Politisi Dapil Jawa Timur IV ini menambahkan, Gorontalo memiliki sejarah yang cukup panjang karena merdeka lebih dulu yakni 23 Januari 1942. “Berarti



Tim Kunker Komisi X DPR RI saat berdialog dengan Wagub dan Jajaran SKPD Provinsi Gorontalo

sejarah Gorontalo ini sangat menarik. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian,” tegasnya.

Terkait sentra budaya, Anang mengaku dirinya bersama Tim Kunker Komisi X telah melihat langsung Museum Purbakala di Jalan Bypass yang memiliki areal cukup luas dan dukungan dari pemerintah pusat yang begitu besar.

“Harapan saya Pemda bisa berfikir kreatif dan inovatif, membangun sinergitas antar semua pihak diprovinsi, kalau terjadi ego sektoral maka ini tidak akan jalan,” pungkas Anang.

LISTRIK SERING MATI, BOPTN PUN KECIL, UNSRAT SULIT BERSAING

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X menerima pengaduan tentang kerapnya aliran listrik mati di area Kampus Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Sulawesi Utara. Kondisi ini jelas mengganggu kegiatan perkuliahan bahkan dampak lebih jauh merusak sejumlah riset yang sedang berlangsung di laboratorium kampus.

“Masalah mati listrik ini akan kami perhatikan. Saya bisa bayangkan misalnya laboratorium biologi yang sedang meneliti pembiakan sel menggunakan alat pendingin untuk mendapatkan suhu tertentu, ternyata karena mati listrik tak berfungsi dengan semestinya, maka wassalam, gagal sudah penelitian itu. Ini sangat memprihatinkan,” kata Ketua Tim Kunker Abdul Kharis Al masyhari dalam pertemuan di aula universitas.

Tim kunker dalam kesempatan itu juga merasakan perjuangan civitas akademika naik tangga sampai ke lantai empat karena fasilitas elevator yang tersedia, rusak karena seringnya mati hidup listrik di kampus yang menjadi pilihan bagi masyarakat di kawasan Indonesia Timur ini.

Pemadaman listrik yang dialami 2-3 jam tiap harinya ini hanya sebagian kecil dari permasalahan yang diungkapkan oleh rektor dan para dekan Unsrat. Wakil Rektor Bidang IV Sangkertadi memaparkan secara posisi Unsrat adalah universitas negeri yang berada di perbatasan dengan akreditasi B dan belum ISO. Ia juga memaparkan fakta semakin banyak yang memilih kuliah di negara Jiran, Filipina dari pada perguruan tinggi negeri sendiri.

“Masalah pembiayaan operasional pendidikan bagi kami di Indonesia bagian timur ini berat sekali. Kami meneri-

boratorium dan sebagainya yang minim menjadikan Unsrat masih belum mampu berakreditasi A.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah Unsrat hanya memiliki 4 orang profesor. “Beberapa dari kami sudah 4-5 tahun lulus doktor tapi untuk mendapatkan profesor itu sangat sulit, karena standar yang diberikan oleh LIPI itu sangat sulit.” ungkapnyanya lagi.

Menanggapi hal tersebut, Kharis yang juga Wakil Ketua Komisi X menjelaskan telah meminta majelis rektor Indonesia untuk menyusun BOPTN seperti apa yang diinginkan. “Jadi kami menentukan variabel apa yang dimasukkan, hingga tercapai kesepakatan apa yang dibutuhkan PTN adalah 5,7 triliun, dimana pembahasan APBN kemarin baru disepakati,” jelasnya.

Mengenai SDM dan kurangnya Profesor, politisi FPKS ini berpendapat seharusnya sudah tidak menjadi masalah



Tim Kunker Komisi X DPR RI saat pertemuan di Unsrat Manado

ma mahasiswa dari Papua, Maluku, yang berasal dari SMA yang keadaannya masih membutuhkan penyesuaian, matrikulasi pelajaran tambahan, uangnya dari mana, kami sudah di pinggir, janganlah dipinggirkan lagi.” ujar Sangkertadi.

Dijelaskannya pula UKT (Uang Kuliah Tunggal) persemester tidak sampai 3 juta rupiah seharusnya mendapatkan BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) yang besar. Tetapi BOPTN yang didapat saat ini sejumlah 17 milyar masih sangat kecil. Sehingga pembangunan Unsrat dapat dikatakan berjalan lamban. Fasilitas olahraga, la-

lgi, karena penelitian di Indonesia ini cukup bagus dan serapan anggarannya sebenarnya masih sedikit.

“Jadi risetnya saja yang perlu ditingkatkan, ditambah harus diadakan kerjasama antara Sam Ratulangi dengan perguruan tinggi yang ternama di pulau Jawa maupun Sulawesi, Unhas misalnya semacam pembimbingan agar mereka bisa menghasilkan jurnal-jurnal yang dipublikasikan internasional terindeks scopus sebagaimana yang disarankan Kementerian Pendidikan Tinggi.” Imbuh Kharis. (ODJI,RISKA) FOTO: NAEFUROJI, RIZKA/PARLE/IW

SOROTAN

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

SURAT EDARAN HANYA UNTUK INTERN POLRI

Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Badrodin Haiti No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau *hate speech* menuai pro-kontra. Edaran itu dianggap perlu dikaji lebih dalam sebelum betul-betul diterapkan.



Surat edaran Kapolri yang diteken Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 lalu itu bukan merupakan produk hukum dalam tata perundangan. Kapolri pun menyatakan bahwa surat edaran ini sebatas untuk intern Polri.

Untuk membahas hal ini, Reporter Sofyan dan Juru Foto Denus dari Parlemen pun menemui Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Agus Hermanto (F-PD). Politisi asal dapil Jawa Tengah ini pun membeberkan penilaian tentang surat edaran itu. Berikut kutipan wawancaranya;

Bagaimana anda melihat surat edaran Kapolri ini?

Surat edaran Kapolri tentang ujaran kebencian ini merupakan tata laksana dari Polri, sehingga sifatnya lebih intern. Surat edaran ini bukan merupakan produk hukum dalam perundang-undangan. Sehingga, kalau menyangkut dengan hukum, itu berada di prioritas yang agak di bawah. Karena yang tertinggi adalah Undang-undang Dasar, Undang-undang, dan lain-lainnya.

Surat edaran itu mesti diselaraskan terlebih dulu dengan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, yakni dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ataupun UU Polri.

Tentunya, jika surat edaran ini dijadikan sesuatu untuk mengikat seseorang, aturan ini harus sesuai dengan hukumnya. Surat edaran ini hanya sebagai alat daripada Polri, terlebih untuk Anggota Kepolisian yang ada di daerah, untuk melaksanakan UU Polri ataupun UU ITE, dan lain sebagainya.

Bagi kami, tentunya ini silahkan saja dilaksanakan. Yang penting dan jelas, jangan sampai ada seseorang yang tersangkut dengan surat edaran ujaran kebencian ini, menjadi dipidanakan. Karena surat edaran bukan

landasan hukum, sehingga yang dipidanakan malah bisa melanggar UU di atasnya.

SURAT EDARAN ITU MESTI DISELARASKAN TERLEBIH DULU DENGAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA DI INDONESIA. DALAM HAL INI, YAKNI DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, (UU ITE) ATAUPUN UU POLRI.

Bisa dikatakan, surat edaran ini bukan landasan hukum?

Surat edaran ini menjadi tingkat pelaksanaan daripada UU ITE atau UU Polri. Kalau dilihat dari produk hukum yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, surat edaran ini sifatnya tidak di atas, tapi di bawah. Sehingga, jika seseorang melakukan ujaran kebencian, tidak dapat dipidanakan dengan menggunakan landasan surat edaran ini, landasannya harus UU ITE atau UU Polri.

Apakah SE ini mengekang kebebasan berekspresi?

Ya bisa saja. Sepanjang memang ekspresinya juga tidak bertentangan dengan UU ITE, rasanya tidak masalah. Tapi, kita memang juga tidak boleh kebablasan, ada rambu-rambunya, yakni UU ITE. Cuma kalau berlandaskan UU ini, pelaksanaannya belum rinci, sehingga ada lompatan-lompatan. Maka dibuatlah pelaksana yang rinci.

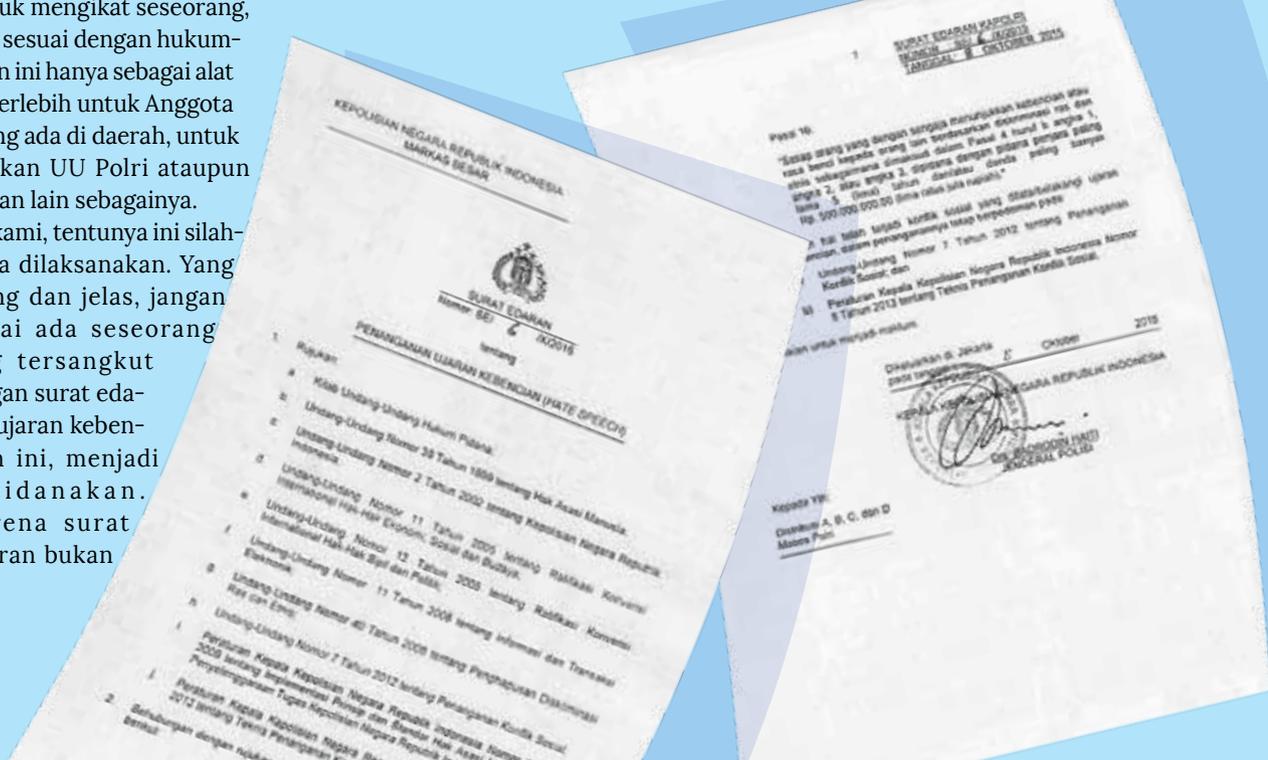
Sekarang memang kita tidak bisa terlalu bebas atau seenaknya dalam berekspresi, seperti yang kemarin-kemarin. Secara demokrasi, diakui ini memang ada penurunan. Kalau dulu kan orang-orang lebih antusias dan mudah melampirkan kritik. Kalau sekarang ada batasannya.

Perlu sosialisasi kepada masyarakat?

Tentu saja. Polisi tentunya sudah melakukan sosialisasi. Manfaat surat edaran ini lebih kepada Anggota Kepolisian yang ada di daerah-daerah.

Sikap DPR terhadap surat edaran ini?

Ini sesuatu ide untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga yang paling tahu adalah Polri itu sendiri. Jika tidak bertabrakan dengan UU, atau dengan aturan yang lain, dan bersifat intern, ya tentu diperbolehkan. Namun, apabila bertabrakan dengan UU di atasnya, ini tidak boleh dilaksanakan. (SF) FOTO: DENUS/PARLE/IW



SURAT EDARAN KAPOLRI TIDAK BOLEH JADI LANDASAN HUKUM BARU

Surat Edaran Kapolri Jendral (Pol) Badrodin Haiti mengenai Penanganan Ujaran Kebencian atau *hate speech* tak pelak juga mendapat perhatian dari Anggota Dewan. SE Kapolri tidak boleh menjadi landasan hukum baru.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa landasan hukum atau regulasi tetap harus mengacu pada Undang-undang. Sehingga, SE dengan Nomor SE/06/X/2015 dan diteken Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 lalu tidak boleh menjadi hukum baru. Jika memang SE itu akan dijadikan aturan, menurut Fahri, hal itu harus dilakukan dalam cara yang benar atau dengan mengundang aturan tersebut.

“Segala bentuk peraturan itu harus dibuat dalam kerangka menyusun regulasi dan surat edaran tidak bisa digunakan untuk menegakan hukum karena hukum harus ditegakkan dengan UU,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, beberapa waktu yang lalu.

Politisi F-PKS itu menambahkan, tugas lembaga kepolisian adalah memberikan penerangan kepada masyarakat agar UU yang sudah disahkan dan memiliki kekuatan itu diimplementasikan sehingga masyarakat tidak boleh melakukan tindakan yang bisa menyerat ke pidana. Polisi tidak berhak membuat aturan sendiri untuk menegakan hukum.

“Jadi jelas tidak benar kalau Surat Edaran (SE) dijadikan

landasan hukum karena surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum. Apalagi jika ada penangkapan dilakukan berdasarkan surat edaran,” imbuh politisi asal dapil NTB itu.

Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Fadli Zon mengatakan, SE Kapolri harus secara tegas harus membedakan antara ujaran kebencian dengan kritik. Jangan sampai penyampai kritik malah dijerat hukum. SE Kapolri harus memuat dengan jelas pembeda antara kritik dan ujaran kebencian.

Politisi F-Gerindra itu menilai, maksud surat edaran tersebut baik, hanya saja tidak boleh untuk kepentingan politik. Dia khawatir mereka yang selalu menuangkan kritik tajam kepada pemerintah malah dijerat sebagai ujaran kebencian.

“Saya kira maksudnya baik, mau mengontrol berbagai macam isu yang ada di sosial media. Tapi saya kira harus dipisahkan antara fitnah dan kritik. Kalau kritik, kita bebas melakukannya. Yang tidak boleh itu fitnah. Misalnya memfitnah presiden,” imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah



Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil

BATASI KEBEBASAN DEMOKRASI

Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa justru mempertanyakan kepada siapa surat edaran dari Kapolri itu ditujukan. Alasannya, aturan tersebut dinilai membatasi kebebasan demokrasi warga negara Indonesia.

Bahkan, kata politisi F-Gerindra itu, aturan tentang *hate speech* itu belum jelas lantaran tidak menegaskan batasan apakah penanganan ujaran kebencian itu berlaku untuk polemik silat lidah antar-masyarakat, atau justru berkenaan dengan antisipasi kebencian dari masyarakat terhadap peme-

rintah.

“Jadi ini ditujukan pada siapa, apakah semua warga negara dikenakan atau hanya ketakutan rezim Jokowi atas kritikan saat ini. Kalau tujuannya agar tidak ada masyarakat yang kritik pemerintah, maka itu sudah kebablasan,” tegas politisi asal dapil Banten itu.

Namun hal berbeda disampaikan Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, yang menilai positif surat edaran Kapolri. Arsul menganggap ruang penegakan hukum yang dipilih Polri merupakan langkah preventif-persuasif dalam menyikapi peristiwa atau kejadian yang mengandung dugaan adanya ujaran kebencian.

Politisi F-PPP itu juga menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir mengekspresikan kebebasan berpendapatnya selama berpedoman pada norma kesantunan. Bahkan, masyarakat perlu mengawal konsistensi penerapan langkah-langkah preventif-persuasif yang hendak diupayakan Polri dalam kasus nyata. “Mengkritisi tidak harus dengan ujaran yang kasar dan menyakitkan pihak lain,” ujar politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil (F-PKS). Ia mendukung langkah Kapolri yang menerbitkan surat edaran tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) itu. Namun ia memberi catatan, perlu adanya sosialisasi yang masif terhadap surat edaran tersebut agar nantinya tidak disalahgunakan.

“Kami harap ada sosialisasi yang masif soal aturan ini bagi aparat Polri agar nanti tidak disalahgunakan dan sosialisasi untuk mempertegas bentuk-bentuk ujaran kebencian itu seperti apa,” kata politisi asal dapil Aceh itu.

KAPOLRI: SURAT EDARAN ITU HANYA UNTUK INTERNAL

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti menegaskan, bahwa surat edaran dengan Nomor SE/06/X/2015 yang telah dikeluarkan, diperuntukkan kepada anggota Polri. Badrodin menjelaskan, bahwa surat edaran tersebut bukan hanya baru, dan bukan hal yang luar biasa

“Surat edaran hanya untuk memberitahu orang-orang internal kita. Bukan pada masyarakat. Kami ingin anggota tahu bentuk-bentuk ujaran kebencian. Bagaimana anggota polisi bisa mencegah, kalau dia *enggak* paham,” ujar Badrodin.

Pada intinya, jelas Badrodin, ujaran kebencian yang masuk ke obyek SE ini adalah ujaran yang bertujuan mengha-



Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti

lut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat yang dibedakan dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, jender, kaum difabel, dan orientasi seksual.

Badrodin menegaskan, dirinya tidak akan mencabut surat edaran tersebut, termasuk tidak akan merespons berbagai komentar negatif tentang SE secara berlebihan. Berbagai komentar itu dianggap sebagai ragam pemikiran pihak lain yang harus dihormati. Ia menganggap surat edaran itu didasari oleh niat yang tulus dan kajian yang benar. (SF) FOTO: IWAN ARMANIAS, NAEFU-ROJI/PARLE/IW

BELAJAR PADA INDUSTRI KREATIF TIONGKOK

Tiongkok sangat maju dalam mengelola industri kreatif. Produk-produk usaha kecil menengah (UKM) Tiongkok berhasil menembus pasar ekspor. Di ambang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia perlu belajar pada Tiongkok dalam memberdayakan para pelaku UKM.

Saatnya produk UKM Indonesia merebut pasar regional di tengah pemberlakuan MEA. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (KSAP) DPR RI pada pertengahan November lalu, menggali banyak informasi di Tiongkok, bagaimana negeri tirai bambu itu merumuskan kebijakan hingga memproduksi barang-barang produk kreatif agar bisa diterima di pasar global.

Delegasi BKSAP yang dipimpin Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf (F-PD) itu, berdialog dengan pelbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta. BKSAP bertemu dengan Parlemen Tiongkok (*the National People's Congress/NPC*), Badan Negara untuk Pers, Publikasi, Radio, Film, dan Televisi Tiongkok (SAPPRFT), KADIN Tiongkok (*the China Council for the Promotion of International Trade/CCPIT*), dan perusahaan ICT Huawei.

Selain Nurhayati, hadir pula anggota BKSAP lainnya, yaitu Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Sudin (F-PDIP), Betti



Delegasi kunjungan BKSAP sedang mendengarkan pemaparan dari Huawei sebagai pelaku industri digital

Shadiq Pasadigoe (F-PG), dan Sumail Abdillah (F-Gerindra). Nurhayati menegaskan bahwa Indonesia-Tiongkok memiliki hubungan sangat panjang dan sangat baik. Oleh sebab itu, parlemen juga memberikan dukungan penguatan dan pengembangan hubungan antar-pemerintah kedua negara.

Ada beberapa isu penting yang dibahas dengan Parlemen Tiongkok. Ada tiga peran penting NPC dalam pembangunan industri kreatif, yaitu menyediakan perangkat hukum, pengawasan secara khusus atas industri kreatif,

dan kepastian hukum dengan pemberlakuan hukum secara sungguh-sungguh untuk menjamin perkembangan industri kreatif. Di Tiongkok ada UU Kemajuan Teknologi Tahun 1993 yang mendorong inovasi, teknologi, sekaligus riset.

Ada pula UU Transfer Hasil Teknologi tahun 1996 yang mendorong hasil inovasi dilempar ke pasar dan perusahaan diwajibkan melaksanakan hasil inovasi tersebut serta pemerintah memberikan insentif memadai bagi para peneliti. Ada pula UU Hak Cipta tahun 1984 yang melindungi produk industri kreatif Tiongkok.

Tiongkok sendiri memiliki strategi untuk memajukan industri kreatif melalui tiga hal, yaitu perbaikan lingkungan, perbaikan birokrasi, dan perbaikan hukum. Perlemen Tiongkok tentu memiliki peran pengawasan terkait pelaksanaan hukum UU terkait UKM dan industri kreatif. Selain itu juga mengawasi pem-



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf bertukar cinderamata dengan Country Manager Huawei for Indonesia Mr. Zhou Shougang



Delegasi BKSAP diwakili Mahfudz Abdurrahman (F-PKS) bertukar cenderamata dengan Wakil Ketua Komisi Ekonomi Parlemen RRT Hon. Mr. Shao Ning

bangunan berkelanjutan serta menerima laporan dan penelitian yang hasilnya dijadikan topik utama tahunan Parlemen Tiongkok.

Sementara itu, saat berkunjung ke SAPPRFT, delegasi

BKSAP juga mendapat penjelasan bahwa lembaga inilah yang bertanggung jawab atas inovasi kebudayaan yang selaras dengan kebudayaan nasional. Produksi film di Tiongkok sudah dimulai sejak tahun 1895. Kemudian pada 1978 seiring dengan era keterbukaan, perusahaan swasta yang memproduksi film bermunculan. Saat ini saja sudah ada sekitar 7000-an perusahaan swasta.

Sejak era keterbukaan, pembuatan film tidak perlu lagi izin pemerintah. SAPPRFT hanya melihat dan mengawasi kontennya saja. Tercatat, sekitar 600 film diproduksi pada 2014. Keuntungannya, mencapai lima sampai tujuh juta USD. SAPPRFT juga menyebutkan bahwa sekitar 5% dari keuntungan film akan dialokasikan untuk memajukan produksi film-film berikutnya.

Pemerintah Tiongkok sendiri sangat konsen membuat undang-undang terkait pengembangan industri film. Secara regular, Tiongkok mengirim sineas-sineas berbakatnya ke luar negeri untuk mendalami industri film. SAPPRFT juga selalu mengundang sejumlah negara untuk hadir dalam pelatihan singkat industri perfilman. Nurhayati meminta agar Tiongkok juga dapat mengundang sineas-sineas Indonesia untuk mengikuti pelatihan tersebut. (MH) FOTO: DOK.BKSAP/PARLE/IW



Delegasi BKSAP bersama dengan Ketua Komisi Asia Chinese Council for International Trade

Memberdayakan UKM Menyambut MEA

MEA tinggal menghitung hari. Banyak sektor industri di negara-negara ASEAN yang sedang dibenahi. Tak ketinggalan produk usaha kecil menengah (UKM) juga menjadi sektor yang perlu ditata.



Pertemuan Delegasi BKSAP dengan Kementerian Perdagangan Thailand

Dalam kunjungan delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI pertengahan November lalu ke Thailand, terungkap negeri gajah putih itu sedang giat membenahi UKM-nya. Thailand termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi kreatif yang tinggi. Bahkan, terbaik di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia.

Thailand mengembangkan produk UKM dengan sistem *one tambon one product* (OTOP). Setiap provinsi memiliki produk unggulannya sendiri dan diproduksi secara profesional. OTOP diadopsi Thailand dari Jepang. Pemerintah Thailand sangat serius menggarap sektor UKM agar mampu memena-

ngi persaingan di pasar ASEAN.

UKM Indonesia pun tak boleh ketinggalan mengembangkan produk-produk kreatifnya untuk menyambut pasar bebas ASEAN. Delegasi BKSAP yang berkunjung ke Thailand, banyak mengungkap sistem dan perbandingan UKM di Thailand dan Indonesia. Menurut Melani, UKM di Indonesia masih banyak menghadapi kendala terutama dengan pajak.

Pemerintah Indonesia, kata Melani, sedang membenahi regulasi pajak khusus untuk para pelaku UKM. Regulasi perizinan usaha juga sedang ditata. Ini semua untuk kepentingan Indonesia dalam menghadapi persaingan di MEA. DPR juga sedang mengamati persiapan

negara-negara ASEAN dalam menyongsong pemberlakuan MEA di sektor UKM. Bahkan, DPR ikut membantu menyusun regulasi untuk memajukan sektor UKM.

Di Thailand, delegasi BKSAP bertemu dengan Wakil Ketua KADIN Thailand, Phairush Burapachaisri. Melani, misalnya, menanyakan soal insentif yang diberikan kepada pelaku UKM di Thailand. Phairush menjelaskan, KADIN tak memungut biaya apa pun bagi pelaku UKM yang bergabung di KADIN. Kini, sudah ada 82 ribu unit UKM yang terdaftar di KADIN Thailand. Pemerintah Thailand selalu memberi fasilitas kemudahan bagi para pelaku UKM.

Pemerintah Thailand selalu membantu promosi dagang UKM yang ingin

memasarkan produk kreatifnya ke luar negeri. Melihat kenyataan ini, Phairush menyerukan agar ada kerja sama yang erat antara UKM Thailand dan UKM Indonesia. Keduanya bisa saling menguntungkan dalam memproduksi dan memasarkan hasil produknya. “Akan lebih baik apabila Badan Ekonomi Kreatif Indonesia dapat bekerja sama dengan lembaga kreatif di Thailand,” harap Melani.

Andika Pandu Puragabaya Anggota BKSAP lainnya berpendapat, Indonesia tampaknya belum siap 100 persen menghadapi MEA. Indonesia, kata politisi Partai Gerindra ini, seperti janin yang belum siap dilahirkan. “Kita harus menggodok kembali, apakah MEA merupakan suatu pencapaian bagi Indonesia, atau malah *suicide*?” ujarnya.

Sementara Siti Masrifah Anggota BKSAP yang juga ikut dalam rombongan, menyorot seputar produk kosmetik impor yang kerap mengandung bahan berbahaya. Produk kosmetik seperti itu tentu dilarang masuk ke pasar Indonesia. Dari kunjungan ini, diharapkan kedua negara mengontrol produk-produk ekspornya agar tak ada produk yang membahayakan kesehatan manusia.

Masrifah juga menyoal kebijakan kontrol tembakau yang diberlakukan Thailand. Indonesia bisa mencontoh Thailand dalam mengendalikan iklan



Kunjungan Delegasi BKSAP ke AEC Information Center, Kementerian Perdagangan Thailand

rokok. Dampaknya, angka peningkatan perokok di Thailand sangat rendah. Ini penting diperhatikan dalam pasar bebas ASEAN. Pemerintah Indonesia juga harus kembali memperketat iklan rokok di media publik.

Dalam pertemuan dengan KADIN Thailand tersebut, ada semangat persaudaraan yang kuat untuk saling bantu dan menghargai. KADIN Thailand mendukung adanya perubahan-perubahan regulasi agar produk di kedua negara menjadi lebih baik. Otoritas KADIN

Thailand menyatakan, masalah yang dihadapi Indonesia adalah masalah Thailand juga. Saling bantu sebagai sesama saudara tua menjadi keniscayaan.

Selain bertemu KADIN, delegasi BKSAP juga mengadakan pertemuan dengan Parlemen Thailand dan Departemen Negosiasi Perdagangan Kerajaan Thailand. Banyak persamaan persepsi yang telah dibangun dari kunjungan ini. Pasar Thailand penting bagi Indonesia, begitu pula sebaliknya. (MH) FOTO: DOK. BKSAP/PARLE/IW



Pertemuan Delegasi BKSAP dengan masyarakat Indonesia di KBRI Bangkok

SOIMAH PANCAWATI

PEMERINTAH KURANG PEDULI SENIMAN



Yo woyo woyo woyo ...
Woyo woyo woyo...
Hatiku kau woyo woyo...

Petikan lagu bergenre dangdut hiphop itu dipopulerkan oleh Soimah. Berbicara tentang artis multi talenta ini tentu sangat menarik. Tidak hanya wajahnya yang terlihat apik di layar kaca. Namun juga kemampuannya yang sangat mumpuni dalam dunia hiburan tanah air. Ya, jika awalnya publik lebih mengenalnya sebagai sinden di acara Opera Van Java, namun masyarakat pun semakin dibuat terkesima oleh berbagai bakat lain dari wanita kelahiran Pati, Jawa Tengah, 29 September 1980 ini. Sebut saja ketika ia dipercaya menjadi presenter atau host salah satu program talkshow bertajuk namanya sendiri, "Show Imah". Disini ia tidak hanya mampu berdialog dengan nara sumber (bintang tamu) dengan menarik, namun ia juga mampu melontarkan *joke-joke* yang membuat acara tersebut cukup hidup.

Ketika ia dipercaya menjadi komentator ajang *Stand Up Comedy Academy* di Indosiar bersama Eko Patrio (komedian sekaligus anggota DPR RI-red), Raditya Dhika, dan Abdel, disini pemilik nama lengkap Soimah Pancawati ini tidak hanya mampu menyegarkan suasana lewat *jokes-jokes* nya yang cukup mengocok perut, namun ia juga mampu memberikan "ilmu-ilmu" di bidang entertainem yang bermanfaat bagi para junior-juniornya peserta ajang tersebut. Ia didapuk menjadi *acting coach* ajang Dangdut Academy Asia yang disiarkan secara langsung oleh Indosiar.

Ada sebuah kebiasaan baru yang kini seolah menjadi "trade mark" atau ciri khas Soimah. Wanita yang belakangan kerap disapa dengan sebutan Ma'e oleh rekan-rekan seprofesinya ini. Kini Soimah terlihat sering memberikan hadiah-hadiah bagi para juniornya yang notabene menjadi kontestan ajang yang "digawangi" Soimah. Misalnya ketika ia memberikan sejumlah uang untuk beberapa peserta ajang *stand up comedy academy* yang dikomentary. Begitupun ketika ia menjadi komentator acara dangdut, ia tak segan membelikan peserta baju dan sepatu. Bahkan akibat kebiasaan itu tidak sedikit masyarakat menganggapnya *gimmick* atau *settingan* yang sengaja ditampilkan hanya untuk kepentingan program acara.

"Terserah ya orang mau bilang apa, yang pasti ketika saya melihat mereka (para peserta program komedi dan dangdut-red) seolah seperti membalikkan ingatan saya ketika awal saya merintis karir dulu. Saat itu saya ingin membeli beberapa keperluan untuk manggung, tapi saya belum punya cukup uang. Oleh karena itu saya berpikir alangkah bahagianya mereka jika ada yang membantu membelikan keperluan untuk karir mereka. Jadi itu benar-benar murni dari hati saya, tidak ada yang menyuruh atau meminta," jelas Soimah yang akibat dari kebiasaannya itu mendapat julukan baru, "orang kaya".



Saat ditanya perhatian pemerintah terhadap seniman-seniman yang baru merintis karir, putri kelima pasangan Hadinarko dan Kasmiyati ini menilai bahwa kepedulian pemerintah terhadap seniman, apalagi seniman yang baru muncul memang masih terbilang kurang. Namun seperti pengalamannya terdahulu, hal tersebut tidak lantas menjadikannya berdiam diri. Baginya, seniman atau pekerja seni harus memiliki kreatifitas untuk dapat terus "hidup" dan berkembang. Dan jikapun sudah berkembang dan maju, sejatinya harus pula membantu para juniornya. Sehingga tidak hanya mengandalkan pada niat baik dari pemerintah saja.

Masih diingatnya, sebelum namanya melambung seperti saat ini, Soimah disebuah kesempatan sempat dikucilkan artis lain yang sudah lebih dulu terkenal darinya. Peristiwa itu terjadi ketika dia baru merintis karier di dunia entertainment. Ia sempat minder dan dendam. Namun ia tidak ingin berlama-lama menyimpan hal negatif itu. Ia berusaha untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang positif.

"Aku sampai bilang ke artis itu, 'Kamu enggak ada apa-panya sama aku. Lihat nanti,'" kisah Soimah yang ditemuinya di acara konferensi pers Dangdut Academy Asia di studio SCTV, Senayan Jakarta ini.

Berbicara tentang berbagai bakat seni yang dimilikinya, Soimah mengaku hal itu menurun dari keluarganya. Meski sang ayah, hanya penjual ikan, namun *bulek* (tante-red) Soimah, MM Ngatini merupakan istri dari pemilik padepokan tari Bagong Kussudiardjo yang ada di Yogyakarta. Sang tante melihat ada bakat terpendam dalam diri keponakannya. Oleh karena itu ia menyarankan Soimah untuk bergaul dengan berbagai komunitas seni. Selepas SMP, ia memutuskan untuk melanjutkan sekolah di SMKI (Sekolah Menengah Karawitan Indonesia) jurusan karawitan.

Disana tidak hanya kepiawaiannya dalam menari yang mulai terlihat, namun juga kemampuan olah vokalnya yang semakin terasah. Beberapa kali ia memenangkan lomba menyanyi, seperti juara pertama lomba nyanyi Bintang Karaoke Dangdut Se-Jawa Tengah & DIY, Juara Pertama Bintang Televisi dan Juara Dara Ayu. Tawaran untuk menyanyi dan menaripun mulai berdatangan, bahkan karena pembawaannya yang kocak, ia juga kerap diminta untuk melawak di berbagai kesempatan, hingga kemudian kesempatan untuk "unjuk gigi" dari salah satu stasiun tivi pun datang kepadanya, yang akhirnya melambungkan namanya seperti saat ini. (AYU) FOTO: NAE-FUROJI/PARLE/IW



Kepala BKD
Johnson Rajagukguk

DENGAN BKD, DUKUNGAN KEAHLIAN MUDAH DIKOORDINASIKAN

Badan Keahlian Dewan (BKD) merupakan suatu lembaga baru sebagai pendukung kinerja Dewan. Badan ini memang mempunyai landasan atau latar belakang pemikiran hal yang baru. “Sekarang ini dukungan yang sesungguhnya sudah diberikan kepada Dewan, akan tetapi koordinasi yang ada selama ini masih tersebar di beberapa Deputi. Dengan terbentuknya Badan Keahlian ini maka koordinasinya berada pada satu organisasi, satu atap yaitu Badan Keahlian Dewan (BKD),” ungkap Kepala Badan Keahlian Dewan Johnson Rajagukguk kepada Parlementaria di ruang kerjanya.

Menurutnya, DPR periode sekarang ini menginginkan adanya lembaga keahlian yang secara khusus mendukung kerja Dewan. Sebelumnya sudah ada dukungan administrasi, teknis dan dukungan keahlian di Sekretariat Jenderal DPR meski masih terpisah. “Nantinya lembaga khusus ini dapat

memberikan dukungan keahlian dan diharapkan fokus memberikan dukungan keahlian. Itulah sebenarnya landasan dibentuknya Badan Keahlian Dewan,” tegasnya.

Lebih lanjut Johnson Rajagukguk yang dilantik tanggal 17 September 2015 lalu mengungkapkan, Badan Keahlian Dewan terdiri dari Pusat Rancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Analisa APBN atau Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, dan yang terakhir adalah Pusat Penelitian. “Inilah yang akan memberikan dukungan keahlian kepada Dewan untuk 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” jelas dia.

Diharapkan nanti dukungan dari keahlian ini akan semakin terpola karena berada dalam satu organ tetapi tetap berada pada struktur Sekretariat yang juga tadinya memberikan dukungan adminis-

trasi teknis.

Badan Keahlian Dewan ini dibentuk berdasarkan Perpres, No. 27 Tahun 2015 kemudian pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR dan itu sudah di terbitkan hanya memang sekarang ini yang baru dilantik Kepala Badannya menyusul pejabat dan aparat di bawahnya.

Dia berharap, BKD bisa semakin fokus bisa betul-betul direalisasikan, dan pada persidangan yang akan datang diharapkan semua struktur yang berkaitan dengan Badan Keahlian itu sudah terbentuk.

Dalam catatan Parlemenaria, Sekjen DPR Winantuningtyastiti telah melantik 14 pejabat baru terdiri pejabat Eselon II, III dan IV yang bertugas di BKD. BKD merupakan badan baru yang menyiapkan semua kebutuhan kajian, data akademis dan hasil penelitian. "BKD harus betul-betul profesional bekerja tanpa harus dicampuri kepentingan politik," pesan Win.

DUKUNGAN LEGISLASI LEBIH TINGGI

Dukungan yang diberikan, tidak semata-mata terkait dengan 3 fungsi tetapi ada juga hal-hal lain yang berkaitan secara tidak langsung yang memerlukan dukungan atau kajian-kajian berdasarkan keilmuan, berdasarkan keahlian. Tentu saja, tambah Johnson, juga akan diberikan dukungan-dukungannya.

Dia mengakui, memang pekerjaan kita sekarang ini cukup padat terutama dalam pembentukan strukturnya, setelah itu akan melakukan tugas-tugas operasional untuk mendukung Dewan. Sesungguhnya dukungan yang paling nyata selama ini kepada Dewan adalah kegiatan legislasi, maka nanti akan memberi dukungan yang lebih tinggi tanpa mengesampingkan dukungan pada fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan.

Dengan terbentuknya pusat-pusat, maka semua kegiatan yang berkaitan dengan keahlian termasuk rancangan analisa APBN serta pengawasannya, dukungan dari Badan Keahlian akan semakin mudah dikoordinasikan. "Itu

yang paling inti, dibentuknya BKD maka semua dukungan keahlian akan mudah dikoordinasikan, sudah berada dalam satu atap," katanya lagi.

Dukungan yang diberikan BKD, lanjut dia, sesuai dengan keahlian itu dengan pemikiran-pemikiran yang konseptual, misalnya berkaitan dengan rancangan undang-undang, yang berkaitan perancangan. Pertama adalah berkaitan dengan naskah akademis karena anggota Komisi atau Badan Legislasi atau Badan Anggaran menyusun naskah akademis. Kemudian merancang undang-undang itu juga yang akan diberikan dukungannya oleh lembaga atau badan keahlian ini.

NANTINYA LEMBAGA KHUSUS INI DAPAT MEMBERIKAN DUKUNGAN KEAHLIAN DAN DIHARAPKAN FOKUS MEMBERIKAN DUKUNGAN KEAHLIAN. ITULAH SEBENARNYA LANDASAN DIBENTUKNYA BADAN KEAHLIAN DEWAN

Sementara dalam kaitan analisa APBN, BKD tidak akan membuat Rancangan Undang-Undang APBN karena secara konstitusional RUU APBN itu diajukan oleh pemerintah yaitu Presiden. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu bahwa penetapan APBN itu berdasarkan persetujuan DPR.

Sedangkan dalam dukungan pada fungsi pengawasan, banyak hal yang berkaitan dengan tugas Komisi-Komisi, manakala ada permintaan maka BKD akan mendukungnya. Ketika Komisi melakukan tugas pengawasan terkait dengan pelaksanaan undang-undang, apakah memang sudah dilakukan dan bagaimana peraturan pelaksanaannya, akan dikaji oleh Badan Keahlian.

Kemudian, apakah undang-undang itu sudah diimplementasikan sesuai dengan apa yang diatur dalam rangka *law enforcement*. Kemudian berkaitan

dengan fungsi anggaran, selain kajian normatifnya juga terkait dengan sasaran-sasaran APBN serta program-program yang sudah disusun atau ditetapkan APBN. "Apakah sudah dijalankan," tegas Johnson.

Saat ditanya mengenai dukungan personal, ia mengatakan, meskipun memang kalau dilihat dari jumlah tenaga yang ada saat ini masih jauh dari cukup. Tetapi akan tetap berupaya secara optimal menjalankan tugas memberikan kajian-kajian terhadap pelaksanaan APBN yang berkaitan dengan posisi pengawasan.

Sementara dukungan keahlian yang berkaitan dengan pengawasan, kata Johnson, terkait kebijakan pemerintah, apakah dalam penyelenggaraan pemerintahan itu di buat sesuai aturan dan target yang ditetapkan. Juga dikaji, apakah tidak ada pertentangan-pertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Itu yang akan BKD lakukan berupa dukungan kaitan dengan fungsi pengawasan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 27 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), BKD bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR, begitu juga kalau dikaitkan dengan Tata Tertib (Tatib) dan juga Peraturan Presiden. "Sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada Pimpinan tentu harus kita atur bagaimana bentuk pertanggung jawabannya, karena tidak mungkin Kepala Badan mengatur tata cara dan tugas-tugasnya terhadap alat-alat kelengkapan," tegasnya.

Dia berharap, perlu ada satu aturan yang dikeluarkan oleh Pimpinan bagaimana Badan ini memberikan atau melaksanakan tugasnya ke Komisi, ke Badan-Badan. Dan juga kalau memungkinkan nanti sampai kepada anggota bagaimana mereka menjalankan tugas, harus ada aturan mengenai hal itu.

"Sekarang kami sudah mempersiapkan itu, dan kami beri judul Tata Cara Pelaksanaan Tugas Badan Keahlian Dewan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama sehingga ada tertib pelaksanaan tugas-tugas BKD," tutup Johnson. (SPY,MP) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/IW



PARLEMEN DAN PERAN RUANG PUBLIK DI JERMAN



Oleh: Sa'dan Mubarak, Danny Satya Brata, dan Muhammad Adinda Rizki (Peneliti CEPP FISIP UI)

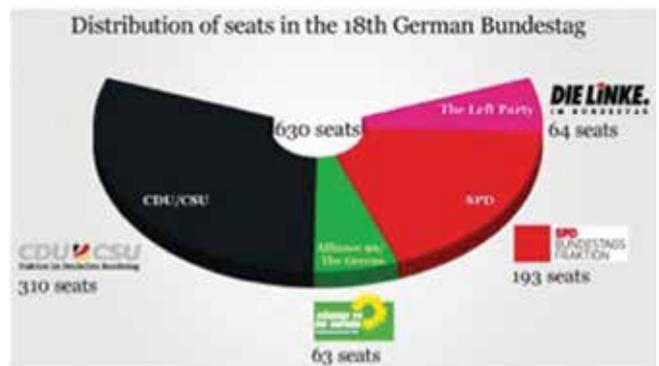
Republik Federal Jerman (*Bundesrepublik Deutschland*) merupakan hasil reunifikasi antara Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1990. Proses reunifikasi membawa Jerman sebagai negara dengan populasi terbesar, ekonomi terkuat, dan pengaruh politik yang luas di kawasan daratan Eropa. Republik Federal Jerman memiliki sistem politik yang unik. Hal ini terlihat dari kehadiran presiden dalam sistem demokrasi parlementer yang mana kekuasaan

eksekutif berada di tangan kanselir. Sistem *hybird* ini membuat Republik Federal Jerman memiliki tiga formasi pemimpin yaitu Presiden Jerman sebagai kepala negara, Ketua DPR (*President of Bundestag*) sebagai pemimpin parlemen, dan Kanselir sebagai pemimpin eksekutif yang membawahi menteri-menteri dalam kabinet.

Sebagai negara demokrasi parlementer, peran *Bundestag* sangat kuat dan menempati posisi penting dalam sistem politik Jerman. Komposisi *Bundestag* menentu-



kan koalisi pemerintahan dan arah kebijakan Jerman. Komposisi *Bundestag* juga dipengaruhi oleh sistem kepartaian yang berlaku di Jerman. Sejak tahun 1980 telah terjadi pergeseran dari sistem tiga partai menjadi sistem lima partai dengan kemunculan Partai Hijau (Aliansi 90) dan Partai Kiri (*Die Linke*). Dalam sistem kepartaian di Jerman, Uni Demokrat Kristen (CDU) menjadi partai politik terbesar karena memiliki basis di seluruh negara bagian kecuali Bavaria. CDU kemudian membentuk koalisi permanen di *Bundestag* bersama dengan Uni Sosial Kristen (CSU) yang berbasis di Bavaria. Pada pemilu tahun 2013, koalisi CDU-CSU memperoleh kursi sebesar 310 kursi atau 49,2%. Partai Sosialis Demokrat (SPD) menjadi partai politik terbesar kedua di Jerman dengan perolehan kursi parlemen dalam pemilu tahun 2013 sebesar 193 kursi atau 30,6%. Partai Hijau mendapatkan kursi sebanyak 63 kursi atau 10%. Partai Kiri, *Die Linke* memperoleh 64 kursi atau 10,2% di *Bundestag* dalam pemilu tahun 2013. Bersama Partai Hijau *Die Linke* membentuk kekuatan oposisi di *Bundestag*.



RUANG PUBLIK DAN DEMOKRASI DELIBERATIF

Demokrasi yang dijalankan di Jerman bukanlah demokrasi elit sebagaimana yang dipraktikkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Indonesia. Demokrasi di Jerman



kat melalui publisitas.

Kehadiran ruang publik dalam sebuah sistem politik selanjutnya melahirkan demokrasi deliberatif. Proses deliberasi yaitu proses konsultasi atau diskursus publik dengan melibatkan masyarakat untuk memberikan kritik, saran, opini, maupun pendapat terhadap sebuah kebijakan atau undang-undang yang dibuat oleh parlemen akan melahirkan undang-undang yang tidak hanya memiliki legitimasi, melainkan juga memiliki jiwa rakyat. Hal ini sesuai dengan konsep demokrasi yaitu *Regierung der Regierten* (Pemerintahan oleh yang Diperintah).²

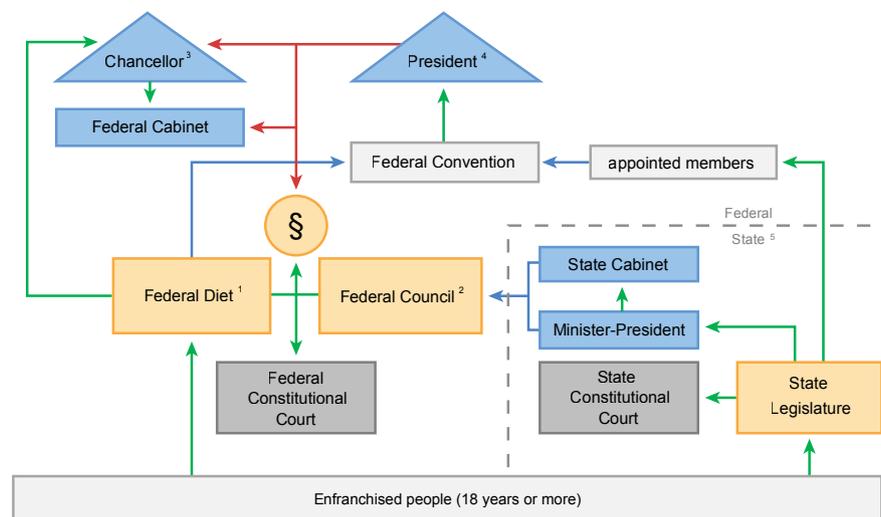
Dalam rangka menciptakan ruang publik secara fisik, dalam proses pembangunan gedung *Bundestag* juga disertakan lapangan yang sangat luas yang dikenal sebagai *Platz Der Republik*. Plaza Republik merupakan lapangan luas tanpa pagar dan menjadi ruang terbuka bagi publik. Hikayat Plaza Republik sudah ada sejak Era Republik Weimar yang saat itu bernama *Koenigsplatz* (tempat/lapangan raja). Pasca kekalahan Jerman terhadap sekutu di Perang Dunia II, *Koenigsplatz* diganti lagi menjadi *Platz der Republik*.

Saat ini *Platz Der Republik* menjadi tempat yang layak untuk menggelar demonstrasi, aksi damai dan aksi pro-

lebih bercorak demokrasi rakyat. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh *Bundestag* bersama dengan Kanselir yang pro-rakyat seperti jaminan sosial dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Implementasi kebijakan tersebut lahir dari gagasan parlemen yang terbuka, yang bersifat *bottom up*. Gagasan Parlemen terbuka lahir sebagai tuntutan demokrasi dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan politik.

Dalam konsep ilmu politik gagasan tersebut bernama ruang publik. Konsep ruang publik diperkenalkan oleh filsuf Jerman yang bernama Jurgen Habermas. Menurut Habermas ruang publik adalah tempat di mana warganegara bisa berunding mengenai hubungan bersama mereka sehingga merupakan sebuah arena institusi untuk berinteraksi pada hal-hal yang berbeda.¹ Ruang publik ini

ditujukan sebagai mediasi antara masyarakat dan Negara dengan memegang tanggung jawab negara pada masyarakat



Legislative branch
 Executive branch
 Judicial branch
→ elects / appoints
→ sends / member of
→ formally appoints / veto-power

1: Every 4 years, election of direct mandates and parties
 2: State chamber. Apportionment is based on each states' population
 3: Head of government with policy-making power. Is proposed by the President
 4: Head of state. "Neutral power" - only in state of emergency increased power
 5: The state levels and names of the organs vary widely from state to state

1. Craigh Calhoun, *Habermas and the Public*

Sphere, MIT Press, 1993, hlm.110-111.

2. F. Budi Hardiman, *Filsafat Fragmentatis*, Yogyakarta: Kansius, 2009. Hlm 126.



tes dari berbagai kelompok penekan dan kelompok kepentingan. *Platz Der Republik* juga digunakan oleh kelompok environmentalis, kelompok anti-perang, kelompok anti-imigran, maupun kelompok pro-imigran untuk menekan pemerintah federal agar mempertimbangkan aspirasi mereka. Hal ini yang membuat proses sistem politik berjalan dengan relatif baik di Jerman.

PELAJARAN BAGI INDONESIA

Pengalaman Jerman dalam menghadirkan ruang publik yang selanjutnya menciptakan sebuah demokrasi yang deliberatif menjadi pelajaran bagi Indonesia. Proses demokratisasi yang telah berlangsung sejak reformasi 1998 memang telah menghadirkan ruang publik dalam proses sistem politik di Indonesia. Namun, Indonesia belum mencapai tahapan demokrasi deliberatif karena belum adanya kesadaran dari elit. Saat ini undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI cenderung lebih banyak berasal dari aspirasi elit ketimbang aspirasi



Platz Der Republik

rakyat.

Oleh karena itu, perlu didukung gagasan mengenai parlemen yang terbuka dan modern yang mengakomodasi proses deliberasi. Sebagai tahap pertama untuk menciptakan demokrasi deliberatif adalah mempersiapkan sarana fisik berupa ruang publik seperti *Platz*

Der Republik di kompleks Parlemen DPR RI. Semoga dengan adanya ruang publik yang dekat dengan DPR RI dapat mewujudkan proses pembentukan undang-undang yang deliberatif dengan melibatkan masyarakat sebagai tuan dari wakil rakyat. ***

YANG PENTING NAWAITU

Suasana rapat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) antara Pansus DPR dengan 6 kementerian Rabu (25/11) berlangsung agak cair. Rapat-rapat sebelumnya yang berlangsung serius, kini ada sedikit canda tawa. Ini terjadi lantaran, anggota Pansus Tifatul Sembiring menyampaikan usulan dengan sedikit canda yang dibuka dan ditutup dengan pantun menarik.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Pansus Muhammad Arwani Thomafi didampingi Wakil Ketua Lili Asjudiredja dan I Gusti Agung Rai Wirajaya, Tifatul yang juga mantan



Anggota Pansus RUU Minol Tifatul Sembiring (F-PKS) didampingi Sungkono (F-PAN)

Menteri Kominfo ini mengimbau dalam membahas RUU Minol ini yang penting nawaitu (niat).

“Saya himbau, dalam pembahasan RUU ini *nawaitu* dulu, *nawaitu* untuk menyelesaikan RUU ini. RUU yang ditargetkan selesai pada Juni 2016 terlalu panjang. Tapi kalau dengan *nawaitu* sama-sama, berniat untuk menyelesaikan UU ini Insya Allah akan tercapai. Ini perlu *kalimatun sawa*,” ungkap politisi PKS ini.

Kesamaan sikap dan niat itulah, katanya, akan bisa memperlancar pembahasan RUU. Karena itu dia berharap ada satu titik temu,



poin-poin sama dulu. “Sebab kalau tanpa ini, nggak jalan, RUU nggak akan selesai,” tukas dia.

Mengungkapkan pengalamannya di Komisi I, lanjut Tifatul, pembahasan suatu RUU lama, di ulur-ulur sehingga tidak selesai. Itu terjadi karena *nawaitu* dan *kalimatun sawanya* tidak ketemu. “Jadi susun poin-poin dari kita (Pansus) dan dari pemerintah lalu dibahas bersama, akan cepat selesai,” ia menambahkan.

Tanpa kedua hal itu, kata Tifatul, maka ada istilah *semalam bisa nangis Bombay*, tidak akan ketemu. “Itu dulu yang mana mau kita atur, bagian mana poin-poin pokoknya. Soal dengar pendapat siapa saja masuk, oke saja. Nggak masalah, namanya saja masukan. Kalau tokoh agama pasti semua nolak, tapi kalau pengusaha hotel nggak mau pasti itu,” ujarnya.

Argumen pasti banyak dan akan ada pro-kontra termasuk di masyarakat. Tapi anggota DPR khususnya Pansus ini diberi amanat untuk mengayomi dan mengurus masyarakat. Kalau ada *nawaitu* menyelesaikan RUU ini akan cepat, tapi kalau nggak ada akan panjang. Jangan sampai seperti kata orang Melayu *menarik kambing ke air*—susah. Kalau kesamaan sikap dan poin-poin dibahas bersama maka akan sampai pada titik temu.

Suasana rapat bertambah ceria karena mantan Presiden PKS ini membuka dan menutup sesi pertanyaan dengan pantun.

“Anak burung berdasi coklat, biar mendung tetap semangat”.

“Neneknya sofyon mengunyah sirih, cukup sekian dan terima kasih”. (MP) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/IW

Bung PARLE



KABAR DPR
MENUJU PARLEMEN MODERN
BAGAIMANA YA ?

JALAN... WALAUPUN MASIH
DALAM TAHAP PENATAAN, PENATAAN
BUKAN HANYA PROYEK PEMBANGUNAN FISIK
SAJA, TAPI JUGA KETIGA FUNGSI DEWAN
DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
HARUS DIKUATKAN



MAKANYA DPR PERLU
SARANA PRASARANA YANG
NYAMAN. DPR INGIN LEBIH
TERTATA, BERWIBAWA TANPA
MENINGGALKAN CITA-CITA
AWAL SEBAGAI RUMAH
RAKYAT DAN UNTUK
MEWUJUDKAN ITU DPR
HARUS PUNYA ALUN ALUN
DEMOKRASI...

ALUN-ALUN DEMOKRASI ?



YA...
TEMPAT MENYALURKAN
ASPIRASI MASYARAKAT,
BERORASI TENTANG FIKIRAN
DAN IDE MEREKA. PARLEMEN
NEGARA LAIN SUDAH
MENYIAPKAN HAL INI.



MANTAP...
JADI DPR DAN
RAKYAT JADI
SEMAKIN DEKAT
YA....

BETUL... SEMOGA
NIAT BAIK MEWUJUDKAN
DPR YANG ASPIRATIF, MODERN
BISA TERLAKSANA
YA...